



SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA

Sekolah Kader Muhammadiyah dan Pemimpin Bangsa



Disusun oleh :
Anestya Pramesti, S.Pd.

Modul Pembelajaran
GEOGRAFI

Untuk Kalangan Sendiri

KELAS
XI
Semester 1

KATA PENGANTAR KEPALA SEKOLAH SMA MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat karunia kepada kita semua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran.

Salah satu bentuk sumber belajar dan bahan ajar adalah buku, modul, ensiklopedia, dan bentuk cetakan lainnya. Modul sebagai salah satu bahan ajar berbentuk cetak maupun *softfile* sangat baik digunakan dalam pembelajaran terutama saat pembelajaran *online*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyusunan modul yang dilakukan oleh guru SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta bertujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri. Dengan pembelajaran *online* karena kondisi pandemi covid 19 ini, keberadaan modul diharapkan dapat membantu siswa belajar.

Modul yang disusun berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada kondisi khusus (darurat pandemi covid 19). Selain membantu peserta didik dapat belajar secara mandiri dan disusun memuat materi pembelajaran yang jelas dan terperinci, peserta didik juga dapat melakukan evaluasi pembelajaran sehingga dapat mengetahui sejauh mana kemampuan penguasaan materi dari pembelajaran yang sudah mereka lakukan sendiri serta dapat digunakan sebagai salah satu rujukan atau referensi untuk materi pelajaran tertentu dan yang berkaitan.

Kepada Bapak/Ibu guru SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta yang sudah menyelesaikan penyusunan modul ini kami ucapkan selamat dan terimakasih, semoga modul ini dapat digunakan oleh peserta didik sebagai sumber belajar dan bahan ajar sehingga peserta didik SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dapat belajar secara mandiri untuk mengembangkan potensi akademiknya. Semoga Allah SWT meridhloi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala Sekolah,



Drs. H. Heryngroho, M.Pd.
NIP. 19650211990031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayahNya, atas selesainya buku ini dan akhirnya dapat hadir di hadapan pembaca.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan dalam mempelajari geografi khususnya di masa sulit pandemi Covid-19 seperti yang terjadi saat ini. Dengan buku ini diharapkan peserta didik mampu untuk memahami gejala alam dan kehidupan dalam keterkaitan keruangan dan pengembangan kewilayahan. Penulisan buku ini jugabertujuan untuk membantu peserta didik dalam rangka mengembangkan sikap kritis dan ilmiah dalam memecahkan berbagai permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat dari adanya interaksi antara manusia dan lingkungan sekitarnya.

Buku ini ditulis dengan pemaparan yang sederhana, namun mudah untuk dipahami dan dipelajari dalam pemikiran peserta didik. Isi dan urutan setiap babnya terdiri atas tujuan pembelajaran, apresepsi, dan uraian materi, di mana setiap pergantian subbab terdapat , tugas-tugas baik individu maupun kelompok, tugas ketrampilan, rangkuman, dan uji kompetensi di setiap akhir bab dalam bentuk pilihan ganda dan esay. Dalam buku ini juga dihadirkan berbagai gambar, peta, diagram, foto, tabel, dan grafik untuk mendukung kelengkapan materi.

Untuk mempelajari buku ini pertama-tama peserta didik harus mempelajari dan memahami tujuan pembelajaran pada setiap bab. Hal ini perlu ditekankan karena tujuan pembelajaran merupakan target dan sasaran belajar bagi peserta didik. Setelah itu hendaknya peserta didik memahami uraian materi, serta semua pengayaan sampai akhirnya benar-benar paham akan hakikat dan isi uraian materi pada setiap bab. Setelah mempelajari dan memahami uraian materi, peserta didik diharapkan mampu untuk mengerjakan kegiatan siswa dan soal-soal uji kompetensi, hal ini untuk melihat dan mengukur kemampuan dari peserta didik.

Akhirnya penulis berharap, buku ini mampu membawa mata pelajaran geografi menjadi mata pelajaran yang lebih hidup dan menarik, serta bermanfaat bagi peserta didik dan para guru dalam mengembangkan wawasan keilmuannya. Selamat belajar, berjuang, dan sukses selalu.

Yogyakarta, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA SEKOLAH.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PENDAHULUAN.....	vii
BAB I	1
KONSEP WILAYAH DAN TATA RUANG	1
1. KEGIATAN BELAJAR I	1
KONSEP WILAYAH DAN TATA RUANG	1
1.1 KD DAN IPK	1
1.2 MATERI	1
A. Wilayah dan Pewilayahan	1
B. Tata Ruang	5
C. Perwilayahan (Regionalisasi)	7
D. Perwilayahan Formal dan Fungsional.....	8
1.3 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN).....	10
2. KEGIATAN BELAJAR II	11
PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH.....	11
2.1 KD DAN IPK	11
2.2 MATERI	11
A. Faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan wilayah.....	11
B. Pengaruh Pusat Pertumbuhan	12
C. Wilayah Pusat Pertumbuhan Indonesia	13
D. Kutub dan Pusat Pertumbuhan Wilayah	14
2.3 TES FORMATIF (PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN).....	19
3. KEGIATAN BELAJAR III	20
3.1 KD DAN IPK	20
3.2 MATERI	20
A. Pembangunan dan Pertumbuhan Wilayah	20
B. Pembangunan wilayah berkelanjutan	25
C. Pengertian Daya Dukung Lingkungan dan Wilayah	29
3.3 TES FORMATIF (PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN).....	33
4. KEGIATAN BELAJAR IV	34
4.1 KD DAN IPK	34
4.2 MATERI	34
A. Perencanaan, Ruang dan Tata Ruang, Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang, Rencana Tata Ruang, Wilayah, Wilayah Nasional, dan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	34

B. Jangka Waktu Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).....	35
C. Muatan Tata Ruang Wilayah Nasional.....	35
D. Konsep Perencanaan Tata Ruang.....	42
E. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi.....	43
F. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten.....	84
G. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota.....	90
H. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.....	94
I. Permasalahan Dalam Penerapan Tata Ruang Wilayah.....	95
4.3 TES FORMATIF (PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN).....	106
Rangkuman	106
EVALUASI.....	108
BAB II.....	111
POLA KERUANGAN DESA DAN KOTA.....	111
1. KEGIATAN BELAJAR I.....	111
Pengertian dan perkembangan desa kota.....	111
1.1. KD DAN IPK.....	111
1.2. MATERI.....	111
A. POLA KERUANGAN DESA	111
4.4 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN).....	119
2. KEGIATAN BELAJAR II.....	120
Struktur keruangan desa kota.....	120
2.1. KD DAN IPK.....	120
2.2. MATERI.....	120
A. POLA KERUANGAN KOTA	120
4.5 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN).....	131
3. KEGIATAN BELAJAR III.....	132
Faktor yang menyebabkan terbentuknya interaksi desa kota.....	132
3.1. KD DAN IPK.....	132
3.2. MATERI.....	132
A. INTERAKSI DESA DAN KOTA	132
B. TEORI INTERAKSI DESA DAN KOTA	136
5.1 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN).....	141
4. KEGIATAN BELAJAR IV.....	142
Usaha pemerataan pembangunan desa kota dan dampak interaksi desa kota.....	142
4.1. KD DAN IPK.....	142
4.2. MATERI.....	142
A. USAHA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOTA DESA DAN KOTA	142
B. DAMPAK PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP MASYARAKAT DESA DAN KOTA ...	151

5.2 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN)	156
EVALUASI.....	159
PENUTUP	164
DAFTAR PUSTAKA.....	165



PENDAHULUAN

Modul geografi adalah model revisi dari modul sebelumnya. Namun tetap sama berisi tentang materi konsep wilayah dan tata ruang serta pola keruangan desa kota. Setelah mempelajari modul ini Ananda diharapkan dapat memahami konsep wilayah dan tata ruang serta pola keruangan desa kota pada wilayah asanya sendiri.

Petunjuk Belajar Modul ini disusun sedemikian rupa, agar Ananda dapat mempelajari secara mandiri. Kami yakin kalau sungguh-sungguh Ananda akan dapat mempelajari modul ini dengan baik. Oleh karena itu untuk mempelajari modul ini hendaknya menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berdo'alah minta kepada Allah swt. agar Ananda diberi rahmat dan kekuatan untuk dapat memahami materi pelajaran yang terdapat dalam modul ini.
2. Di samping mempelajari modul, Ananda dianjurkan untuk membaca buku-buku Geografi SMA lainnya tentang konsep wilayah dan tata ruang serta pola keruangan desa kota
3. Baca baik-baik dan pahami indikator yang ingin dicapai dalam mempelajari modul ini.
4. Pelajari materi secara berurutan, dimulai dari kegiatan 1 menyusul kegiatan 2 dan seterusnya. Karena materi yang dibahas pada kegiatan sebelumnya berkaitan erat dengan materi yang dibahas pada kegiatan berikutnya.
5. Pelajari baik-baik dan pahami uraian materi yang ada pada setiap kegiatan.
6. Setelah selesai mempelajari satu kegiatan Ananda diminta untuk mengerjakan tugas pengetahuan dan ketrampilan dengan baik.
7. Setelah semua kegiatan dipelajari dan semua tugas dapat Ananda kerjakan dengan benar, kemudian tanyakan pada diri Ananda sendiri apakah Ananda telah menguasai seluruh materi seperti yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran. Apabila jawabannya belum, pelajari sekali lagi bagian mana yang belum Ananda kuasai tersebut.
8. Apabila Ananda telah menguasai seluruh materi yang ada, kerjakan soal Evaluasi pada setiap akhir Bab dengan tenang dan baik. Ananda dinyatakan berhasil kalau sedikitnya 75% jawaban Ananda benar, sehingga Ananda dipersilahkan untuk mempelajari Bab berikutnya.
9. Ananda dikatakan berhasil jika memperoleh nilai sedikitnya 75 atau lebih, dengan demikian Ananda diperbolehkan mempelajari modul berikutnya.

BAB I

KONSEP WILAYAH DAN TATA RUANG

1. KEGIATAN BELAJAR I

KONSEP WILAYAH DAN TATA RUANG

1.1 KD DAN IPK

Kompetensi Dasar	Indikator
3.1 Memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	3.1.1 Menganalisis konsep wilayah dan tata ruang

1.2 MATERI

A. Wilayah dan Pewilayahan

1. Pengertian Wilayah

Pengertian Wilayah menurut ahli:

- Taylor: Wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu
- Rustiadi: wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Batasan wilayah tersebut tidak selalu dengan kenampakan fisik dan pasti, melainkan bersifat dinamis.

Berdasarkan pengertian wilayah menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa wilayah mempunyai batas-batas tertentu yang dapat digunakan untuk mengenali karakteristiknya sehingga dapat dibedakan dengan wilayah tetangganya.

2. Konsep Wilayah

Secara umum konsep wilayah di permukaan bumi dibedakan menjadi keadaan alamiah

(*natural region*) dan keadaan tingkat kebudayaan penduduknya (*cultural region*).

a. Berdasarkan keadaan alamiah

- Berdasarkan variasi iklim, terdapat wilayah tropiok, subtropik, sedang, arid (gersang), dan kutub.
- Berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi, terdapat wilayah dataran rendah, dataran tinggi dan dataran pantai.
- Berdasarkan persebaran vegetasi, terdapat wilayah hutan hujan tropis,

hutan campuran, hutan musim, hutan berdaun jarum, tundra, sabana dan stepa.

b. Berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk

Wilayah yang didasarkan tingkat kebudayaan penduduk berupa wilayah agraris, wilayah industri, dan wilayah perikanan.

- 1) Apabila wilayah didasarkan satu kenampakan disebut generic region, contohnya areal tebu, areal gandum dan areal padi.
- 2) Apabila wilayah didasarkan ciri-ciri khusus lokasi dan kekhasannya dibanding wilayah lain, disebut specific region, contoh wilayah Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Tenggara.

Jadi, dapat dipahami bahwa konsep wilayah adalah konsep dasar yang penting dalam geografi karena bermanfaat untuk memahami dan menganalisis interaksi keruangan migrasi manusia, barang dan jasa, serta perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil interaksi antara manusia dan alam.

Adapun konsep-konsep wilayah menurut Rustiadi, dkk., (2011: 32) meliputi sebagai berikut ini.

a. Wilayah homogen

Wilayah Homogen (uniform region) yaitu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan, termasuk iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian atau penggunaan lahan. Uniform region juga disebut dengan wilayah formal. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam ataupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah pegunungan kapur (karst), wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Adapun wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, seperti wilayah suku Asmat, wilayah industri tekstil, wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan wilayah pertanian sawah basah. Uniform Region atau wilayah formal dicirikan oleh sesuatu yang dimiliki atau melekat pada manusia dan alam secara umum, seperti bahasa tertentu yang digunakan penduduk, agama, kebangsaan, budaya, dan identitas politik serta tipe iklim tertentu, bentuk lahan, dan vegetasi.

Konsep wilayah homogen lebih menekankan pada aspek homogenitas dalam kelompok dan mengoptimalkan perbedaan (kompleksitas, variasi dan ragam) antarkelompok tanpa memperhatikan bentuk hubungan fungsional (interaksi) antarwilayah-wilayah di dalamnya. Sebagai contoh wilayah homogen adalah pekerjaan, iklim, cuaca, topografi, kebudayaan, kehidupan sosial, pertanian, dan sebagainya.

Pada peta curah hujan, setiap wilayah memiliki curah hujan yang berbeda-beda dan ada yang sama dengan penyebaran yang bervariasi. Wilayah tersebut tidak mengenal batas administrasi, tetapi batas-batas wilayah berdasarkan fenomena alam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh letak suatu tempat. Melalui peta tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi fenomena geosfer yang ada di dalamnya, seperti pengaruh perubahan curah hujan terhadap kondisi pertanian di Indonesia, kejadian bencana, dan sebagainya.

b. Wilayah Nodal

Wilayah nodal (nodal region) adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya (hinterland). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi.

Batas wilayah nodal di tentukan sejauh mana pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi bila digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya. Hoover (1977) mengatakan bahwa struktur dari wilayah nodal dapat di gambarkan sebagai suatu sel hidup dan suatu atom, dimana terdapat inti dan plasma yang saling melengkapi. Pada struktur yang demikian, integrasi fungsional akan lebih merupakan dasar hubungan ketergantungan atau dasar kepentingan masyarakat di dalam wilayah itu.

Konsep wilayah nodal lebih memfokuskan pada pengendalian pusat dan ketergantungan terhadap pusat, bila dibandingkan dengan batas wilayah. Pembagian wilayah seperti nodal berdasarkan fungsi, asal usul, dan perkembangannya. Sebagai contoh adalah kota satelit merupakan penamaan pewayalahan secara fungsional yang berdasarkan fungsi daerah tesebut sebagai penyangga agar penduduk dan kegiatan yang berada di sekeliling kota utama dapat beralan dengan baik. Misalnya kota-kota yang berada di sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor yang merupakan koat satelit bagi Kota Jakarta. Daerah penyangga yang secara fungsional sebagai penyangga bagi daerah yang berada di daerah yang berada di daerah lainnya. Misalnya hutan mangrove sebagai penyangga wilayah pantai dari abrasi.

c. Wilayah Perencanaan/ Pengelolaan Khusus

Wilayah perencanaan adalah wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Wilayah perencanaan mengalami perubahan-perubahan penting dalam pengembangannya dan memungkinkan persoalan-persoalan perencanaan sebagai suatu kesatuan.

Wilayah perencanaan mempunyai ciri-ciri:

- 1) cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi,
- 2) mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada,
- 3) mempunyai struktur ekonomi yang homogen,
- 4) mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (growth point),
- 5) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan,
- 6) masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan- persoalannya.

Wilayah perencanaan bukan hanya dari aspek fisik dan ekonomi, namun ada juga dari aspek ekologis. Wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus tidak dibatasi oleh administratif, namun juga dibatasi alami seperti DAS. Pengelolaan daerah aliran sungai harus direncanakan dan dikelola mulai dari hulu sampai hilirnya. Contoh wilayah perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Wilayah Pembangunan JABOTABEK (termasuk sebagian kecil wilayah kabupaten sukabumi). Pada wilayah ini dikembangkan berbagai aktivitas

industri yang tidak tertampung di Jakarta.

- 2) Wilayah Pembangunan Bandung Raya. Wilayah ini dikembangkan pusat aktivitas pemerintahan daerah, pendidikan tinggi, perdagangan daerah, industri tekstil. Untuk konservasi tanah dan rehabilitasi lahan kritis di pusatkan di wilayah- wilayah kabupaten Garut, Cianjur, Bandung, dan Sumedang.
 - 3) Wilayah Pembangunan Priangan Timur. Wilayah ini meliputi daerah kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis.
 - 4) Wilayah Pembangunan Karawang. Wilayah ini dikembangkan sebagai produksi pangan (beras/padi) dan palawija. Meliputi pula daerah-daerah dataran rendah pantai utara (Pantura) seperti Purwakarta, Subang, dan Karawang. Pusatnya Kota Karawang.
 - 5) Wilayah Pembangunan Cirebon dan sekitarnya. Wilayah ini dikembangkan sebagai pusat industri pengolahan bahan agraris, industri, petrokimia, pupuk, dan semen. Untuk keperluan tersebut, pelabuhan Cirebon ditingkatkan fungsinya untuk menampung kelebihan arus keluar masuk barang dari pelabuhan Tanjung Priok.
 - 6) Wilayah Pembangunan Banten. Wilayah ini berpusat di Kota Serang dan Cilegon, terdiri atas 4 zone yaitu Bagian Utara diutamakan untuk perluasan dan intensifikasi areal pesawahan teknis, selatan untuk wilayah perkebunan dan tanaman buah- buahan, wilayah Teluk Lada diperuntukkan bagi intensifikasi usaha pertanian, dan daerah sekitar Cilegon dikembangkan sebagai pusat industri berat (besi baja).
- d. Wilayah administratif

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerinatah umum di daerah.

Wilayah administrasi adalah wilayah perencanaan yang memiliki landasan yuridis politis yang paling kuat. Contohnya wilayah administrasi adalah desa, kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Wilayah administrasi disebut juga daerah otonom, yakni daerah yang memiliki kekuasaan melakukan pengambilan kebijakan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya di dalamnya. Kesatuan wilayah administrasi memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi.

Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti propinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan. Wilayah dalam pengertian administratif sering disebut juga daerah. Wilayah administrasi berupa propinsi dan kabupaten atau kota merupakan daerah otonom dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan wilayah administrasi disebabkan oleh dua faktor, yakni berdasarkan satuan administrasi dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah, dan wilayah didasarkan pada satuan administrasi pemerintahan untuk mempermudah dianalisis dalam pengumpulan data di berbagai bagian wilayah. Namun, dalam kenyataannya, pembangunan tersebut

sering kali tidak hanya dalam suatu wilayah administrasi, sebagai contoh adalah pengelolaan pesisir, pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan lingkungan dan sebagainya, yang batasnya bukan berdasarkan administrasi namun berdasarkan batas ekologis dan seringkali lintas batas wilayah administrasi. Sehingga penanganannya memerlukan kerja sama dari suatu wilayah administrasi yang terkait.

TANGGAP FENOMENA

1. Di manakah Anda tinggal?
2. Coba Anda deskripsikan jika dipandang dari segi wilayah, tempat tinggal Anda termasuk ke dalam jenis wilayah apa saja?
3. Kerjakan sebagaimana tabel berikut. Kerjakan di buku tugas Anda!
4. Kumpulkan hasil pekerjaan Anda kepada bapak atau ibu guru untuk dinilai!

No	Alamat: Jl. Kutilang No.2 RT. 01 RW. 02 Kota Surakarta	
1.	Berdasarkan pembagian waktu	Termasuk waktu Indonesia Barat (WIB) karena kota Surakarta terletak di Pulau Jawa.
2.	Berdasarkan ... dst
	Ulasan

B. Tata Ruang

1. Pengertian Tata Ruang dan Penataan Ruang

Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusatpusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat (struktur ruang) yang peruntukannya terbagi bagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang). Proses perencanaan dari tata ruang, pemanfaatannya dan pengendaliannya, yang dilakukan secara sistematis disebut penataan ruang.

2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan. Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- c. Keberlanjutan. Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Keberdayagunaan dan

keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

- e. Keterbukaan. Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.
 - f. Kebersamaan dan kemitraan. Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
 - g. Perlindungan kepentingan umum. Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
 - h. Kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
 - i. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.
3. Klasifikasi Penataan Ruang

Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selanjutnya ditegaskan sebagai berikut:

- a. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- c. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana.
- b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan
- c. Geostrategi, geopolitik, Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota harus dilakukakan secara berjenjang dan komplementer. Komplementer yang dimaksud disini adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah

provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam penyelenggaraannya tidak terjadi tumpah tindih kewenangan.

C. Perwilayahan (Regionalisasi)

Regionalisasi berarti membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan tujuan tertentu. Hal ini disebabkan lokasi-lokasi di permukaan bumi jumlahnya sangat banyak sehingga diperlukan usaha untuk menyederhanakan informasi menurut kriteria tertentu guna tujuan tertentu agar lebih efisien dan ekonomis. Contohnya, pembagian wilayah berdasarkan iklim sangat berguna untuk mengetahui perberan hewan dan tumbuhan.

Perwilayahan dapat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, antara lain sebagai berikut.

4. Memisahkan sesuatu yang berguna dan kurang berguna.
5. Mengurutkan keanekaragaman kondisi permukaan bumi.
6. Menyederhanakan informasi dari berbagai gejala di permukaan bumi yang sangat beragam.
7. Memantau perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi.

Tujuan perwilayahan adalah sebagai berikut:

1. Menyebarkan dan meratakan pembangunan sehingga dapat menghindari adanya pemusatan kegiatan.
2. Menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah.
3. Memberikan pengarahannya kegiatan pembangunan, tidak saja kepada aparat pemerintah di pusat atau daerah, tetapi juga kepada masyarakat dan para pengusaha.

Untuk menentukan regionalisasi wilayah harus diperhatikan fisik yang meliputi iklim, morfologi, sumber daya alam, dan keadaan sosial budaya yang meliputi penduduk dan budayanya. Beberapa contoh pewilayahan antara lain sebagai berikut:

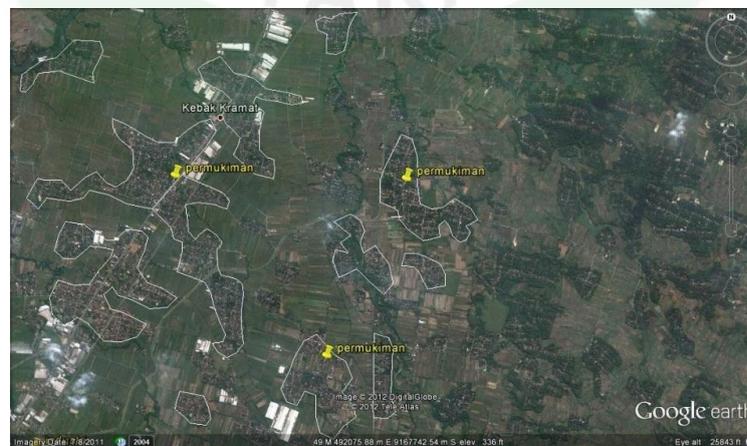
1. Pewilayahan muka bumi berdasarkan tipe iklim matahari, antara lain sebagai berikut.
 - a. Zone iklim tropis antara $23,5^{\circ}$ LU– $23,5^{\circ}$ LS.
 - b. Zone iklim subtropis antara $23,5^{\circ}$ LU– 35° LU dan $23,5^{\circ}$ LS– 35° LS.
 - c. Zone iklim sedang antara 35° LU - $66,5^{\circ}$ LU dan 35° LS– $66,5^{\circ}$ LS.
 - d. Zone iklim kutub antara $66,5^{\circ}$ LU - 90° LU dan $66,5^{\circ}$ LS– 90° LS.
2. Pulau Jawa berdasarkan kondisi fisiografinya, meliputi antara lain sebagai berikut.
 - a. Wilayah dataran rendah Jakarta (zona Jakarta).
 - b. Wilayah antiklinorium Bogor (zona Bogor).
 - c. Wilayah dataran antarmontana atau antarpegunungan (zona Bandung).
 - d. Wilayah pegunungan selatan.
3. Pewilayahan Indonesia berdasarkan wilayah waktu, meliputi pewilayahan sebagai berikut.
 - a. Wilayah Waktu Indonesia Barat (WIB).
 - b. Wilayah Waktu Indonesia Tengah (WITA).

- c. Wilayah Waktu Indonesia Timur (WIT).
4. Pewilayahan muka bumi berdasarkan tipe vegetasinya, meliputi tipe sebagai berikut.
 - a. Wilayah hutan hujan tropis
 - b. Wilayah hutan musim
 - c. Wilayah hutan desidius
 - d. Wilayah hutan conifer (hutan berdaun jarum)
 - e. Tundra
 - f. Taiga
5. Pewilayahan Negara Indonesia berdasarkan kondisi geologisnya, antara lain sebagai berikut.
 - a. Wilayah Paparan Sunda (landas kontinen Asia), meliputi Pulau Sumatra, Jawa, dan sebagian Kalimantan.
 - b. Wilayah Paparan Sahul (landas kontinen Australia), meliputi Pulau Papua dan wilayah di sekitarnya.
 - c. Wilayah laut dalam, meliputi daerah di kawasan Indonesia bagian tengah.

D. Perwilayahan Formal dan Fungsional

8. Wilayah Formal

Wilayah formal disebut juga wilayah uniform, yaitu suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan (homogenitas), misalnya kenampakan kesamaan dalam hal fisik muka bumi, iklim, vegetasi, tanah, bentuk lahan, penggunaan lahan yang ada dalam wilayah tersebut, baik secara terpisah maupun berupa gabungan dari berbagai aspek. Karena itu, wilayah yang demikian, mempunyai bentuk-bentuk kenampakan penggunaan lahan dengan pola umum dari aktivitas industri, pertanian, permukiman, perkebunan, dan bentuk-bentuk penggunaan lahan lain yang relatif tetap. Karena itu, wilayah formal lebih bersifat statis. Misalnya, lembah sungai yang dicirikan oleh daerah alirannya, di kota besar daerah CBD (Central Business District), zone permukiman, zone pinggiran kota juga merupakan region formal.



Gambar: Persebaran wilayah permukiman di sebagian kecamatan Kebakkramat, Karanganyar

Wilayah formal berdasarkan proses klasifikasinya antara lain:

- c. Wilayah Menurut Kekhususannya. Klasifikasi wilayah ini merupakan daerah tunggal, mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus. Jenisnya disebut *specific region*. Contohnya: Wilayah waktu Indonesia bagian Timur, di mana daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus, yaitu yang lokasinya di Indonesia bagian timur.
- d. Wilayah yang Menekankan Perbedaan Kepada Jenisnya disebut *generic region*. Dalam hal ini fungsi wilayah kurang diperhatikan, yang ditekankan adalah jenis perwilayahan saja. Contohnya: wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah fisiografi, wilayah pertanian, dan wilayah yang menghasilkan hasil bumi.
- e. Wilayah Berdasarkan Keseragaman atau Kesamaan Dalam Kriteria Tertentu. Wilayah seperti ini disebut *uniform region*. Contohnya: wilayah pertanian, di mana terdapat keseragaman atau kesamaan antara petani atau daerah pertanian dan kesamaan ini menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk wilayah.

9. Wilayah Fungsional

Wilayah fungsional memberikan konsep tentang wilayah berbeda dengan wilayah formal yang menitik beratkan pada homogenitas sedangkan wilayah fungsional berdasarkan pada heterogenitas, sehingga pandangannya menitik beratkan pada hubungan fungsional, maka wilayah seperti itu disebut wilayah fungsional. Seperti pandangan J. W. Alexander, dia memandang eksistensi jenis wilayah ini pada adanya kesamaan pusat aktivitas hubungan dari sistem yang ada, sehingga istilah yang dipakainya adalah *modal region*. Menurut P. Vidal de La Blache, suatu wilayah adalah tempat (dominan) tertentu yang didalamnya terdapat banyak sekali perbedaan, namun secara artifisial tergabung bersama, saling menyesuaikan untuk membentuk kebersamaan.

Dari uraian di atas menggambarkan wilayah fungsional yaitu wilayah geografik yang memperhatikan suatu hubungan fungsional antar wilayah formal yang interdependansi dan batas wilayah tersebut terkontrol oleh sebuah titik pusat. Untuk itu wilayah fungsional disamping menekankan pada ide heterogenitas, juga menekankan pada ide sentralitas. Contoh wilayah desa dengan wilayah kota, keduanya mempunyai hubungan yang saling ketergantungan, desa berfungsi memasok bahan baku ke kota, sedangkan kota berfungsi sebagai pusat melayani kebutuhan berupa hasil industri untuk penduduk desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional adalah:

- a. Wilayah formal bersifat pasif dan statis / selalu berubah sedangkan wilayah fungsional bersifat aktif, dinamis / selalu berubah, dan sentralistik.
- b. Wilayah formal bersifat keseragaman / homogenitas, sedangkan wilayah fungsional menekankan kemajemukan / heterogenitas.
- c. Wilayah fungsional mempunyai hubungan ketergantungan satu sama lain / interdependensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah formal.
- d. Wilayah formal umumnya ditemukan di desa, sedangkan wilayah fungsional umumnya ditemukan di kota.
- e. Wilayah formal seperti desa berfungsi memasok bahan baku ke kota, sedangkan wilayah fungsional seperti kota berfungsi sebagai pusat untuk melayani kebutuhan desa berupa hasil industri.

1.3 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN)

Jawablah soal essay di bawah ini dengan jelas!

1. Wilayah yang memiliki karakter seragam disebut sebagai wilayah
2. Karakteristik wilayah nodal yaitu
3. Pegunungan karst dan hutan mangrove termasuk dalam klasifikasi perwilayahan
4. Wilayah dataran rendah dan dataran tinggi, termasuk *uniform region* karena
5. Suatu wilayah merupakan ekosistem yang terdiri ata



2. KEGIATAN BELAJAR II

PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.1 KD DAN IPK

Kompetensi Dasar	Indikator
3.1 Memahami konsep wilayah dan pewayalahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	3.1.2 Menganalisis pembangunan dan pertumbuhan wilayah

2.2 MATERI

A. Faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan wilayah

Wilayah dapat berkembang dengan pesat, baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya karena adanya pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan suatu magnet sebagai penarik dan juga sebagai pendorong perkembangan suatu wilayah. Pusat pertumbuhan wilayah dapat terbentuk secara alami maupun secara terencana. Wilayah selalu berkaitan dengan pengelolaan dan penataan ruang yang didalamnya terdapat pertumbuhan pembangunan baik dibidang fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan wilayah antara lain sebagai berikut :

1. Faktor fisik

Faktor fisik sangat mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan wilayah. Faktor fisik meliputi topografi, iklim, keadaan tanah, keadaan air, dan sebagainya. Kondisi fisik suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk pengembangan wilayah akan lebih cepat berkembang. Misalnya , topografi datar, ketersediaan air mencukupi, kondisi tanah stabil, terhindar dari banjir, tanah longsor, gempa dan sebagainya, maka wilayah tersebut akan lebih cepat berkembang.

2. Faktor pengambil kebijakan

Tidak semua wilayah dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan, meskipun dari beberapa faktor yang sangat mendukung. Perencanaan pembangunan terhadap perkembangan

n wilayah juga turut menentukan perkembangan suatu wilayah. Kebijakan- kebijakan yang diambil haruslah menguntungkan bagi perkembangan wilayah seperti kebijakan penggunaan lahan, rencana dalam ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan lahan, dan sebagainya.

3. Faktor ekonomi

Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Misalnya , suatu wilayah tidak mampu menyediakan kebutuhan seperti bahan pangan. Sementara

wilayah yang lain memiliki potensi untuk penyediaan bahan pangan, begitu sebaliknya. Maka akan terjadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.

4. Faktor sosial

Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan wilayah apabila wilayah tersebut kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan masyarakatnya lebih terjamin bila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan dapat terbentuk secara alami yaitu masyarakat mulai sadar akan kebutuhan tersebut dan secara terencana, yaitu terdapat perencanaan mengenai pembangunan dan peningkatan pendidikan, pendapatan, dan kesehatan.

5. Faktor sarana pendukung

Ketersediaan sarana pendukung seperti jaringan, jenis transportasi, sarana ekonomi, pendidikan, dan fasilitas lainnya berperan dalam pengembangan wilayah. Semakin meningkatnya perkembangan wilayah menuntut adanya peningkatan sarana pendukung. Dengan tersedianya sarana pendukung tersebut, dapat mendukung perekonomian suatu wilayah. Sarana pendukung memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi, misalnya transportasi memudahkan dalam distribusi barang dan memudahkan mobilitas penduduk. Pasar dan mal memberikan kemudahan dalam kegiatan jual beli, transaksi, memasarkan hasil produksi, dan sebagainya. Wilayah-wilayah yang ada tidak tumbuh dalam waktu yang bersamaan, jangka waktu yang berbeda, perkembangan yang berbeda, dan tingkat keteraturan yang berbeda pula.

Fungsi pusat pertumbuhan wilayah sebagai berikut :

- a. Memudahkan dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan wilayah
- b. Memantau perkembangan wilayah
- c. Pemerataan pembangunan wilayah

B. Pengaruh Pusat Pertumbuhan

Suatu pusat pertumbuhan akan memberikan pengaruh pada wilayah sekitarnya. Pengaruh yang ditimbulkan dari pusat pertumbuhan yang berkembang di suatu wilayah sebagai berikut.

1. Pemusatan Sumber Daya Manusia

Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. Para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Arus migrasi penduduk dari daerah pedesaan menuju pusat pertumbuhan atau kota di Indonesia menunjukkan peningkatan seiring dengan perkembangan pusat pertumbuhan atau kota itu. Sebagai contoh, penambangan batu bara di wilayah Kalimantan memerlukan banyak tenaga kerja dari luar wilayah.

2. Perkembangan Ekonomi

Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah itu. Kesempatan kerja yang banyak dari berbagai bidang dan arus barang kebutuhan hidup berdampak pada perkembangan usaha-usaha ekonomi lain. Sebagai contoh, munculnya pusat pertumbuhan yang berawal dari kegiatan penambangan batu bara merangsang tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi lain, seperti warung makan, pasar, penginapan, toko kelontong, usaha transportasi, dan tempat hiburan. Dari usaha transportasi sendiri akan mendorong

tumbuhnya penjualan alat-alat transportasi dan perbengkelan.

Banyak penduduk pendatang dan penduduk lokal membuka usaha atau melakukan kegiatan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Mereka bekerja sebagai wiraswata, pedagang, karyawan, buruh, dan penjualan jasa. Kawasan industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan pertanian merupakan wilayah yang dapat dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Kegiatan ekonomi yang berkembang di wilayah pusat pertumbuhan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk.

3. Perubahan Sosial Budaya

Wilayah pusat pertumbuhan cenderung memiliki penduduk yang makin padat. Kepadatan penduduk yang meningkat serta kemajuan komunikasi dan transportasi akan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya penduduknya. Pengaruh pusat pertumbuhan yang semakin berkembang terhadap sosial budaya antara lain sebagai berikut.

- a. Penduduk termotivasi untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan guna mengatasi masalah akibat perubahan sosial budaya.
- b. Menyebabkan akulturasi dan asimilasi nilai budaya akibat mobilitas penduduk, baik yang melalui migrasi maupun pertambahan alami dari berbagai latar belakang budaya.
- c. Membuka arus informasi dan komunikasi dari luar wilayah semakin meningkat yang akan mempercepat pertumbuhan daerah tersebut.
- d. Membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan luas sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat dan status sosial mereka akan meningkat seiring peningkatan kesejahteraan hidup.
- e. Melatih masyarakat untuk mengatur waktu, disiplin, bersikap hemat, serta tidak terpengaruh oleh tuntutan barang dan jasa yang berlebihan.

C. Wilayah Pusat Pertumbuhan Indonesia

Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas banyak pulau berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan. Pembangunan nasional akan lancar apabila pelaksanaannya tidak terpusat dalam satu wilayah, misalnya Jawa, tetapi menyebar dan menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Atas dasar ini, maka pembangunan nasional Indonesia dilaksanakan dengan sistem perwilayahan (regionalisasi) dan kota-kota utama yang ada dijadikan sebagai pusat-pusat pertumbuhannya. Bappenas membagi wilayah di Indonesia menjadi empat pusat pertumbuhan, yaitu wilayah A sampai D. Masing-masing wilayah dibagi lagi menjadi beberapa wilayah pembangunan. Pembagian wilayah Indonesia tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Regional	Pusat Pertumbuhan	Wilayah	Daerah-Daerah Cakupan
1	A	Medan	I	Aceh dan Sumatera Utara, pusatnya di Medan.
			II	Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, pusatnya di Pekanbaru
			III	Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung pusatnya di Palembang.

2	B	Jakarta	IV	Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DI Yogyakarta, Pusatnya di Jakarta
			V	Kalimantan Barat, pusatnya di Pontianak
3	C	Surabaya	VI	Jawa Timur dan Bali, pusatnya di Surabaya.
			VII	Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, pusatnya di Balikpapan dan Samarinda.
4	D	Makassar	VIII	Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat, pusatnya di Makassar.
			IX	Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo, pusatnya di Manado
			X	Maluku, Maluku Utara dan Papua, pusatnya di Sorong

Pembagian wilayah seperti ini bermanfaat untuk mencapai pembangunan yang serasi dan seimbang, baik antarsektor di dalam suatu wilayah pembangunan maupun antarwilayah pembangunan. Prinsip perwilayahan di atas juga diterapkan dalam skala yang lebih kecil yaitu provinsi-provinsi itu sendiri, dengan memperhatikan hubungan yang saling berkaitan antara kabupaten dan kecamatan dalam satuan wilayah yang lebih kecil. Penetapan empat wilayah pusat pembangunan utama disertai sepuluh wilayah pembangunan tersebut dimaksudkan agar wilayah benar-benar berfungsi sebagai penggerak dalam pemerataan pembangunan di Indonesia secara menyeluruh. Bila disajikan dalam peta, pusat pertumbuhan di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :



Sistem perwilayahan tersebut juga diterapkan dalam lingkup daerah yang lebih kecil di setiap provinsi. Dengan demikian, terjadi hubungan antara kabupaten dan kecamatan, antarkabupaten, serta antarkecamatan yang merupakan wilayah administrasi lebih kecil.

D. Kutub dan Pusat Pertumbuhan Wilayah

1. Teori Dasar Kutub Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan Wilayah
 - a. Teori Tempat yang Sentral (Central Place Theory)

Teori tempat yang sentral (Central Place Theory) pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli geografi bangsa Jerman pada tahun 1933, yang bernama Walter Christaller. Dalam teori tersebut, Christaller menitik beratkan pada penentuan banyaknya kota, besarnya kota, dan persebaran kota. Untuk menganalisis

penentuan banyaknya kota, besarnya kota, dan persebaran kota menggunakan dua konsep sebagai berikut.

- 1) Jangkauan (range) adalah jarak yang perlu ditempuh orang untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan.
- 2) Ambang (threshold) adalah jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kelancaran dan keseimbangan suplai barang.

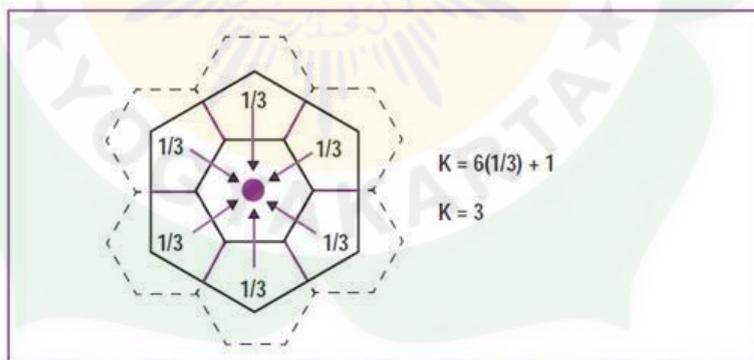
Sutau lokasi pusat aktivitas yang senantiasa melayani berbagai kebutuhan penduduk harus berada pada pusat yang sentral. Maksud tempat yang sentral adalah suatu tempat atau kawasan yang memungkinkan partisipasi manusia yang jumlahnya maksimal, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun mereka yang menjadi konsumen dari barang-barang pelayanan yang dihasilkan.

Tempat yang sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam. Daerah segi enam merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya yang mampu terlayani oleh tempat yang sentral tersebut.

Tempat yang sentral dapat berupa kota besar, pusat perbelanjaan, pasar, rumah sakit, ibukota provinsi, dan kabupaten. Tempat yang sentral memiliki pengaruh yang berbeda-beda sesuai dengan besar kecilnya wilayah tersebut, maka terdapat hierarki atau tingkatan tempat yang sentral. Kawasan dengan daya pengaruh yang berbeda-beda berdasarkan jenis pada pelayanan, hierarki tempat yang sentral dapat dibedakan menjadi tempat sentral yang berhierarki 3, 4, dan 7.

- 1) Tempat sentral berhierarki 3 (K-3)

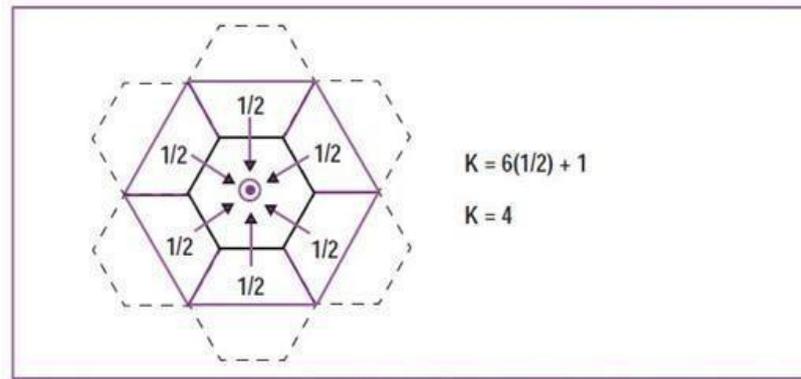
Tempat sentral yang berhierarki 3 (K-3) disebut juga situasi pasar optimal. Hierarki 3 merupakan pusat pelayanan yang berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi daerah disekitarnya. Kasus pasar optimal memiliki pengaruh $\frac{1}{3}$ bagian dari wilayah tetangga di sekitarnya yang berbentuk heksagonal.



Sumber: Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan, 1981

- 2) Tempat sentral berhierarki 4 (K-4)

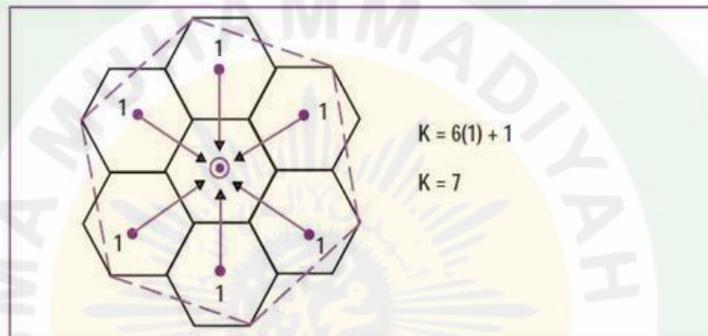
Tempat sentral yang berhierarki 4 disebut juga disebut dengan situasi lalulintas optimum. Artinya, di daerah tersebut dan daerah-daerah sekitarnya yang terpengaruh tempat sentral akan senantiasa memberikan kemungkinan rute lalulintas yang paling efisien. Situasi lalu lintas optimum memiliki pengaruh $\frac{1}{2}$ bagian dari wilayah-wilayah tetangga disekitarnya yang berbentuk heksagonal.



Sumber: Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan, 1981

3) Tempat sentral berhirarki 7 (K-7)

Tempat sentral berhierarki 7 (K-7) disebut sebagai situasi administrasi optimum. Tempat sentral ini mempengaruhi seluruh bagian wilayah tetanggaya, selain mempengaruhi wilayah sendiri. Tempat sentral yang berhierarki 7 dapat berupa kota pusat pemerintahan.



Sumber: Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan, 1981

Ada dua syarat untuk menerapkan teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Christaller, yaitu keadaan topografi yang seagam sehingga tidak ada daerah yang mendapat pengaruh lereng atau pengaruh alam lainnya dalam hubungannya dengan jalur transportasi. Syarat yang kedua adalah tingkat ekonomi penduduk yang relatif homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer, misalnya yang menghasilkan padi, kayu, dan batu bara.

b. Teori Polarisasi Ekonomi

Teori ini dikemukakan oleh Guntur Myrdad yaitu setiap wilayah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya Tarik bagi tenaga buruh dari pinggiran. Bahkan bukan hanya tenaga buruh, melainkan banyak hal misalnya tenaga terampil dan modal. Teori ini mengungkapkan bahwa semakin lama interaksi tersebut terjalin akan menimbulkan kenampakan baru yakni polarisasi pertumbuhan ekonomi atau disebut juga dengan kutub pertumbuhan ekonomi yang cenderung merugikan daerah pinggiran. Dengan adanya backwash effect terjadi ketimpangan wilayah meningkatnya kriminalitas, dan kerusakan di daerah pinggiran.

c. Teori Kutub Pertumbuhan

Teori kutub pertumbuhan atau dikenal dengan istilah growth poles theory. Pertama kali dikemukakan oleh peroux 1955. Porroux dalam penelitiannya lebih menekankan pada proses-proses pembangunan. Pendapat mengenai teori kutub pertumbuhan menjelaskan bahwa pembangunan bukan merupakan suatu proses

yang terjadi secara serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda. Wilayah yang dijadikan pusat pembangunan disebut kutub pertumbuhan.

Pemusatan wilayah-wilayah pertumbuhan dibedakan menjadi 3 komponen berikut.

- 1) Wilayah khusus, misalnya daerah terbelakang dan daerah aliran sungai
- 2) Prinsip homogenitas, misalnya wilayah geografi fisik atau sosial, wilayah budaya dan wilayah ekonomi
- 3) Konsep hubungan ruang, yaitu wilayah fungsional yang disebut juga wilayah terpusat

Industri baru akan memilih tempat yang berdekatan dengan daerah industri yang telah ada karena telah tersedia fasilitas yang memadai, seperti listrik, air bersih, dan jalan. Daerah yang maju disebut dengan pusat pertumbuhan, sedangkan daerah yang belum maju disebut dengan pinggiran.

Proses pembentukan pusat pertumbuhan mengikuti fase-fase pertumbuhan sebagai berikut.

- 1) Fase I, yaitu fase praindustri

Pada masa awal terdapat wilayah yang belum berkembang, yang ditandai oleh banyak kota kecil yang tersebar merata dan setiap kota tidak mendominasi kota yang lain. Kondisi ekonomi wilayah-wilayah tersebut cenderung tidak berkembang dan setiap kota hanya melayani wilayah sendiri.

- 2) Fase II, yaitu fase industri awal

Fase ini terjadi pada salah satu kota yang berkembang lebih cepat daripada yang lainnya, sehingga tumbuh menjadi primate city. Kota dapat berkembang lebih cepat karena memiliki kelebihan baik di bidang sumber daya alam maupun pada sumber daya manusia. Primate city merupakan kota terbesar yang menjadi pusat wilayah atau disebut dengan core (C) = Pusat, yang mendominasi kota-kota lainnya. Pada fase ini terjadi perpindahan tenaga terampil, sumber daya alam, dan modal dari daerah pinggiran.

- 3) Fase III, yaitu fase transisi

Pada fase ini industri industri yang sedang berkembang, pada primate city akan mendominasi sebagian besar wilayah. Namun, tidak sekuat fase kedua karena sekitar primate city mulai berkembang pusat-pusat pertumbuhan. Bahan mentah, tenaga terampil, dan modal tidak hanya mengalir di primate city, tetapi juga menuju ke pusat-pusat pertumbuhan yang lain. Pada fase ini perkembangan wilayah belum stabil karena masih terdapat kantong-kantong wilayah yang berkembang.

- 4) Fase IV, yaitu integrasi spasial

Pada fase ini setiap kota telah berkembang sesuai dengan hierarkinya, sehingga sudah terbentuk pusat-pusat pertumbuhan yang saling berinteraksi dengan pusat pertumbuhan yang lainnya. Setiap wilayah telah terintegrasi secara nasional dan tidak ditemukan lagi katalog-katalog wilayah yang terbelakang. Jika semua wilayah telah berinteraksi dengan wilayah lain secara fungsional, akan terbentuk hierarki kota dengan baik.

2. Interaksi antara Pusat Pertumbuhan Daerah dan Sekitarnya

Interaksi antara pusat pertumbuhan secara sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu

pengetahuan memiliki interaksi tibal balik antara pusat pertumbuhan dengan daerah disekitarnya.

d. Sistem Keruangan Pertumbuhan Kota menurut Hagget

- 1) Perbedaan keruangan dalam berapa kelompok masyarakat menyebabkan adanya keinginan untuk berinteraksi sehingga akan muncul pola perpindahan.
- 2) Proses pola perpindahan terlihat tanpa ada rintangan dan bergerak ke seluruh arah tanpa melalui jalur tertentu. Umumnya perpindahan itu melalui jalur kanal atau koridor. Gambaran tersebut menjelaskan elemen kedua yang perlu dijadikan sebagai analisis adalah karakteristik perpindahan melalui kanal, yaitu jarring- jaring dari pinggiran sampai ke pusatnya. Hal ini sebagai cerminan dari sistem transportasi dari pinggiran ke kota dan berakhir pada lokasi yang unggul sebagai pusat suatu sistem.
- 3) Proses dekomposisi, yaitu pembentukan pusat atau nodes, Kemunculan dekomposisi dari pusat-pusat wilayah (nodal region) yang disebabkan oleh keunggulan dari beberapa lokasi pusat yang satu akan unggul dari yang lainnya.
- 4) Perkembangan proses dekomposisi yang mengarah pada terbentuknya perjenjangan hierarki pusat-pusat tersebut merupakan suatu sistem organisasi dari pusat wilayah.
- 5) Perlu analisis daerah-daerah pembentukan asosiasi, tempat elemen yang ada di permukiman tersebut. Surface yang berupa areal lahan yang disita terdapat fenomena pusat pemukiman dan jarring-jaring jalan yang tersusun dalam bentuk bermacam-macam penggunaan lahan.
- 6) Perubahan yang terjadi tidak merata di seluruh permukaan bumi, hanya terjadi pada satu atau beberapa lokasi tertentu. Lokasi tersebut disebarkan sepanjang rute melalui pusat tertentu dan menyebar dengan sistem perjenjangan. Proses perubahan melalui ruang dan waktu disebut difusi keruangan.

e. Karakteristik Pertumbuhan Kota menurut Houston J.M

- 7) Stadium pembentukan inti kota (*nuclear phase*)
Stadium ini merupakan tahap pembentukan central business district (CBD). Pada masa ini baru dirintis pembangunan gedung-gedung utama sebagai penggerak kegiatan yang ada dan baru mulai meningkat. Pada saat ini pula daerah yang mula-mula terbentuk oleh banyak gedung yang berumur tua dan berbentuk klasik serta pengelompokan fungsi kota yang termasuk penting. Pada tahap ini, kenampakan kota akan berbentuk bulat karena masih berada pada awal pembentukan kota, kenampakan kota yang berbentuk hanya meliputi daerah yang sempit
- 8) Stadium formatif (*formative phase*)
Pada tahap ini perkembangan industri dan teknologi mulai meluas termasuk sector transportasi, komunikasi, dan perdagangan. Semakin maju sector industri, transportasi, dan perdagangan, semakin meluas dan kompleks keadaan pabrik dan kondisi perumahan masyarakat kota. Daerah-daerah perkembangan tersebut lokasinya berbeda disepanjang jalur transportasi dan komunikasi.

9) Stadium moderen (*modern phase*)

Pada tahap ini kenampakan kota jauh lebih kompleks dan mulai timbul gejala penggabungan dengan pusat-pusat kegiatan di kota satelit dan kota lainnya. Usaha identifikasi kenampakan kota mengalami kesulitan, terutama pada penentuan batas-batas fisik terluar dari kota yang bersangkutan. Kenyataan ini terjadi karena persebaran fungsi pelayanan telah masuk ke daerah pedesaan.

2.3 TES FORMATIF (PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN)

1. Jelaskan pengertian pusat pertumbuhan wilayah!
2. Sebutkan tujuan pusat pertumbuhan wilayah!
3. Jelaskan pengaruh pusat pertumbuhan wilayah terhadap perkembangan ekonomi disuatu wilayah!
4. Gambarkanlah peta pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia!
5. Sebutkan perbedaan antara teori Christaller dan Porroux!



3. KEGIATAN BELAJAR III

3.1 KD DAN IPK

Kompetensi Dasar	Indikator
3.1 Memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	3.1.3 Mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah

3.2 MATERI

A. Pembangunan dan Pertumbuhan Wilayah

1. *Batas Wilayah Pertumbuhan*

Menentukan batas dalam membangun suatu wilayah agar sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang tepat. Untuk menentukan hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

a. Kualitatif

Suatu wilayah pertumbuhan memiliki ciri-ciri khusus sehingga dapat dibedakan dengan wilayah pertumbuhan lainnya. Contohnya pada wilayah perkebunan kelapa sawit dan kopi yang memiliki ciri khas daerah yang terhampar luas. Di wilayah inti, penduduk menanam kelapa sawit, dan makin jauh dari wilayah inti, persentase penduduk yang menanam kelapa sawit pun makin berkurang. Adapun makin jauh dari wilayah inti keadaan terbalik, di mana penduduk yang menanam kelapa sawit makin berkurang, dan sebagian besar penduduk menanam pohon kopi. Dengan demikian, pada dua wilayah tersebut terdapat wilayah yang tumpang tindih. Untuk itu, dalam penentuan batas wilayah pada kasus ini dapat dilakukan melalui perkiraan. Namun demikian, penentuan batas wilayah dengan cara ini umumnya kurang memuaskan dan memungkinkan munculnya masalah. Penentuan batas pertumbuhan wilayah dengan cara ini dinamakan dengan penentuan batas secara kualitatif.

b. Kuantitatif

Menentukan batas wilayah pertumbuhan wilayah secara kuantitatif dapat dilakukan dengan beberapa model sebagai berikut.

1) Model Thiesen

Untuk menentukan batas wilayah pembangunan dengan model ini, diperlukan data yang bersifat kuantitatif. Misalnya data jumlah penduduk, curah hujan, dan iklim. Adapun untuk menentukan batas perwilayahan digunakan stasiun-stasiun pengamat cuaca yang tersebar di berbagai wilayah sebagai inti (core). Diantara dua stasiun yang berdekatan dihubungkan garis lurus, kemudian dibuat garis berat. Garis berat ini merupakan batas antara stasiun dengan lainnya. Jika beberapa stasiun yang berdekatan dibuat garis sejenis akan terbentuk poligon yang dikenal dengan nama poligon Thiesen.

2) Model *Reilly's Law*

Model ini didasarkan atas jarak jangkau pengaruh suatu pusat kegiatan. Antara dua pusat pertumbuhan memiliki gaya tarik menarik. Kekuatan daya tarik menarik setiap pusat akan berpengaruh terhadap jarak jangkau pengaruh pusat pertumbuhan yang bersangkutan. Dengan Rumus :

$$D_{A-B} = \frac{d}{1 + \sqrt{\frac{P_B}{P_A}}}$$

D_{A-B} = batas terluar pusat pertumbuhan (kegiatan) dihitung dalam mil/km sepanjang jalan dari A menuju B

P_A = jumlah penduduk kota A

P_B = jumlah penduduk Kota B

d = jarak Kota A dan Kota B (dalam mil/km)

2. *Kerjasama Antarwilayah*

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki setiap daerah di Indonesia bisa saja menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Oleh karena itu, daerah dituntut lebih proaktif dalam melakukan inovasi untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut untuk mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kerjasama antardaerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 195 Ayat

(1) dan Pasal 196 Ayat (1), yaitu “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahwa daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan”.

a. Tujuan kerjasama antarwilayah

- 1) Menunjang upaya mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
- 2) Memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam membangun dan menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum.

- 3) Menanggulangi masalah yang timbul, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
 - 4) Mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak, baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan teknologi untuk dimanfaatkan bersama secara timbal balik.
- b. Pengaturan kerjasama antarwilayah
- Pengaturan kerjasama antarwilayah telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 195 sebagai berikut.
- 1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan.
 - 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antardaerah yang diatur dengan keputusan bersama.
 - 3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
 - 4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- c. Faktor pendorong kerjasama antarwilayah
- 1) Adanya perbedaan sumber daya alam antardaerah.
 - 2) Mobilitas faktor produksi dan pemasaran rendah.
 - 3) Perbedaan kualitas SDA, teknologi, dan modal.
 - 4) Adanya perbedaan hasil produksi setiap daerah.
 - 5) Perbedaan jumlah dan penyebaran penduduk.
 - 6) Kurang lancarnya perdagangan antardaerah.
 - 7) Kegiatan konsentrasi ekonomi berbeda-beda.
 - 8) Untuk mencukupi kebutuhan daerah.
- d. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kerjasama antarwilayah
- 1) Perlu adanya upaya dari semua pihak untuk mendorong tumbuhnya pemahaman akan urgensi pelaksanaan kerjasama antarwilayah. Hal ini dapat ditindaklanjuti dengan sikap dan komitmen menempatkan urusan kerjasama antarwilayah sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah dalam bentuk produk-produk hukum.
 - 2) Untuk mendukung realisasi tersebut, pemerintah daerah dituntut menyegerakan langkah-langkah untuk urusan pemerintahan dalam kerangka kerjasama antarwilayah.
 - 3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan secara terus menerus dan

berkelanjutan yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

- 4) Koordinasi yang lebih optimal antar pemerintah terkait, mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Upaya koordinasi yang intensif diperlukan untuk menyamakan persepsi, sinkronisasi program, dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nantinya.
 - 5) Antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu adanya upaya peningkatan kerjasama diantara aparaturnya penyelenggara kerjasama karena hal ini turut menentukan tingkat keberhasilan kerjasama. Adapun dalam hal peningkatan kualitas pemahaman tentang arti kerjasama, pemerintah daerah secara intensif perlu melakukan pembekalan, dan pelatihan bagi semua aparaturnya yang terkait dalam kerjasama tersebut.
 - 6) Mengoptimalkan pelaksanaan model-model peran pemerintah provinsi dalam mewujudkan kerjasama antarwilayah. Bahkan sangat memungkinkan untuk melakukan inovasi dalam upaya mencari model-model peran lain yang dianggap sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi masing-masing wilayah.
 - 7) Menuangkan model-model peran pemerintah provinsi kedalam dokumen kebijakan sebagai landasan legalitas dalam mengoptimalkan peran provinsi dalam kerjasama antarwilayah.
 - 8) Menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan kerjasama antarwilayah. Hal ini tidak boleh diabaikan karena dukungan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan kerjasama antarwilayah.
 - 9) Untuk mendapatkan kesuksesan dalam pembangunan, perlu dilakukan penggabungan proses politik dengan rencana pembangunan hasil proses teknokrat. Kedua proses ini dapat berjalan selaras jika dituntun oleh satu visi jangka panjang.
3. Pengembangan Wilayah Tertinggal

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penyebab tertinggalnya suatu daerah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Geografis
- b. Sumber Daya Manusia
- c. Sumber Daya Alam
- d. Sarana dan Prasarana
- e. Daerah Terisolasi, Rawan Konflik dan Rawan Bencana.

Berdasarkan data RPJMN 2009-2014 terdapat 183 daerah tertinggal, yang kemudian pada tahun 2014 sebanyak 70 kabupaten berhasil diantarkan (Keputusan Menteri PDT No. 141 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kabupaten

Daerah Tertinggal Lepas dari Ketertinggalan tahun 2014). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 masih terdapat 122 daerah tertinggal. Berikut peta persebaran daerah tertinggal Indonesia.



Peta Persebaran Daerah Tertinggal

Berikut daftar daerah tertinggal di Indonesia:

No	Wilayah	Jumlah Kabupaten	%
A	KBI	19	15,57
1	Sumatera	13	10,66
2	Jawa & Bali	6	4,92
B	KTI	103	84,43
1	Kalimantan	12	9,84
2	Sulawesi	18	14,75
3	Nusa Tenggara	26	21,31
4	Maluku	14	11,48
5	Papua	33	27,05
Jumlah		122	100

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019

a. Permasalahan Daerah Tertinggal

- 1) Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal;
- 2) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal;
- 3) Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;
- 4) Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;
- 5) Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;

- 6) Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.
- b. Strategi Dasar untuk mengatasi permasalahan daerah tertinggal.
Dalam mengatasi permasalahan pembangunan daerah tertinggal, dilakukan strategi dasar melalui empat pilar sebagai berikut.
 - 1) Pilar pertama, yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat melalui:
 - a) Pengembangan ekonomi lokal,
 - b) Pemberdayaan masyarakat,
 - c) Penyediaan prasarana dan sarana pedesaan,
 - d) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
 - 2) Pilar kedua, yaitu mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah melalui:
 - a) Penyediaan informasi potensi sumber daya wilayah,
 - b) Pemanfaatan teknologi tepat guna,
 - c) Peningkatan investasi dan kegiatan produksi,
 - d) Pemberdayaan dunia usaha, dan
 - e) Pembangunan kawasan produksi.
 - 3) Pilar ketiga, yaitu memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju melalui:
 - a) Pengembangan jaringan ekonomi antarwilayah,
 - b) Pengembangan jaringan prasarana antarwilayah, dan
 - c) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 4) Pilar keempat, yaitu meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik keterisolasian melalui:
 - a) Pembukaan keterisolasian daerah pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil,
 - b) Penanganan komunitas adat terasing,
 - c) Pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil.

B. Pembangunan wilayah berkelanjutan

Pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki negara secara bijaksana. Tujuan utama pembangunan adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga dapat menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang terus bertambah membawa konsekuensi terhadap adanya pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan pembangunan.

1. Pengertian dan Konsep Pembangunan Wilayah Berkelanjutan

Pengembangan wilayah merupakan salah satu bentuk nyata dalam pembangunan yang lebih baik. Sementara pembangunan adalah bukti nyata adanya pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah berkelanjutan ditunjukkan bagaimana pengelolaan dan proses pembangunan tersebut.

Apabila pembangunan tersebut berkelanjutan, dapat disimpulkan pertumbuhan wilayah juga berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. (Laporan Komisi Sedunia tentang Lingkungan dan Pembangunan [WCED], dalam Soemarwoto, 2009:14)

Bosshard dalam Muta'ali (2012: 5) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang harus mempertimbangkan lima prinsip kriteria, yaitu: (1) Abiotik lingkungan, (2) Botik lingkungan, (3) Nilai-nilai budaya, (4) Sosiologi, dan (5) Ekonomi.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembangunan dalam berbagai sektor (fisik maupun nonfisik) dengan tetap memperhatikan lingkungan. Menurut Muta'ali (2012: 4) perlunya konsep pembangunan berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok berikut:

- a. Proses pembangunan berlangsung terus menerus
- b. Sumber daya alam memiliki ambang batas
- c. Kualitas lingkungan berkorelasi dengan kualitas hidup
- d. Memungkinkan pemilihan alternatif
- e. Pembangunan berkelanjutan mengandalkan transgenerasi

2. Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pertumbuhan dan pengembangan suatu wilayah, antara lain adalah :

a. Banyak Wilayah-Wilayah Yang Masih Tertinggal Dalam Pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain: (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

b. Belum Berkembangnya Wilayah-Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

Banyak wilayah-wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan, antara lain: (1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (2) belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah; (3) belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak pada petani dan pelaku usaha swasta; (4) belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah; (5) masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama

diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan; (6) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi; (7) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta (8) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

c. Kesenjangan Pembangunan antara Desa dan Kota.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain dari pada itu, kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan (*trickling down effects*), justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan (*backwash effects*).

d. Rendahnya Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Sebagai Acuan Koordinasi Pembangunan Lintas Sektor dan Wilayah.

Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas (*degradasi*) dan kuantitas (*depleksi*) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pembangunan fisik, suatu wilayah sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW menjelaskan bagaimana sebuah wilayah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (2011: 42), penataan ruang pada prinsipnya mengatur, mengendalikan dan mengawasi penggunaan lahan. Tata ruang harus menjaga benturan kepentingan tidak terjadi yang nantinya dapat mengganggu kelestarian lingkungan dan arah perkembangan perkotaan.

Tujuan RTRW adalah supaya lahan digunakan sesuai dengan fungsinya. Seringkali kita lihat pada kenyataan, bahwa lahan tidak digunakan sesuai yang tertera di RTRW. Keadaan ini mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan terhadap penggunaan lahan, sehingga pertumbuhan lahan di kota-kota Indonesia kurang terkelola dengan baik.

3. Pengertian dan Dimensi Pertumbuhan Wilayah Berkelanjutan

Pertumbuhan wilayah berkelanjutan adalah proses pertumbuhan yang berprinsip pada pengembangan dan keberlanjutan yang tidak mengorbankan dan

menimbulkan masalah bagi pertumbuhan wilayah lainnya.

Ciri-ciri dari pertumbuhan wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah tersebut setiap tahun berkembang positif dan areal pertumbuhan semakin luas.
- b. Daerah tersebut menjadi incaran penduduk untuk berinteraksi dan bersaha berinvestasi di wilayah tersebut.
- c. Kegiatan ekonomi dan hubungan sosial berlangsung baik.
- d. Hasil dan kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi berjalan lancar.
- e. Sumber daya alam yang ada dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan manusia.
- f. Sarana komunikasi dan transportasi tersedia dengan baik.
- g. Sarana dan prasarana, seperti sekolah, rumah sakit, kebutuhan air, dan kebutuhan listrik tercukupi.
- h. Kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat berlangsung aman.

4. Dimensi Pertumbuhan Ruang Wilayah dalam Hubungannya dengan Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan pertumbuhan wilayah berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keserasian antara jumlah penduduk, kapasitas dan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Dimensi pertumbuhan ruang suatu wilayah dalam hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a. Pengentasan kemiskinan merupakan masalah mendasar yang harus segera ditanggulangi. Kemiskinan adalah salah satu penyebab kemerosotan lingkungan dan berdampak negatif bagi pembangunan. Sebaliknya, kemerosotan daya dukung lingkungan dapat menjadi penyebab munculnya kemiskinan.
- b. Pola konsumsi dan produksi. Pola konsumsi kebutuhan dasar dan pola hidup yang tidak berkelanjutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Hingga saat ini belum ditemui kebijakan yang secara eksplisit mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- c. Dinamika kependudukan dalam perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan upaya memahami keterkaitan antara variabel kependudukan dan lingkungan, serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.
- d. Pengelolaan dan peningkatan kesehatan.
- e. Pembangunan perumahan dan permukiman dalam pemanfaatan ruang suatu wilayah dengan dinamika kependudukan.

5. Tujuan Pertumbuhan dan Pembangunan Wilayah Berkelanjutan

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antargenerasi.
- b. Pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada serta pencegahan terhadap gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik demi generasi mendatang.
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata-mata hanya untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antargenerasi.

- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan, baik masa kini maupun yang mendatang.
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai manfaat jangka panjang maupun lestari antargenerasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antargenerasi sesuai dengan habitat.

C. Pengertian Daya Dukung Lingkungan dan Wilayah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam menyediakan, mendukung kegiatan yang ada di kawasan wilayah itu sendiri, (Armas dan Syahza, 2005:2). Kegiatan yang ada di wilayah meliputi kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Penilaian daya dukung wilayah berdasarkan pada kemampuan lahan (*land capability*), yaitu kemampuannya sebagai ruang gerak untuk mencapai tingkat produksi tertentu.

Daya dukung wilayah tidak hanya meliputi daya dukung sosial, yang mana keduanya saling berkaitan. Daya dukung dipengaruhi oleh faktor ketersediaan sumber daya, sosial, ekonomi, teknologi, budaya, dan kebijakan (Lang dan Armour dalam Muta'ali (2012:19).



Gambar Tanah Longsor sebagai akibat pembangunan yang tidak memerhatikan daya dukung lingkungan.

(Sumber:<http://surabayaonline.co/wp-content/uploads/2016/04/tanah-longsor.jpg>)

Dapat disimpulkan bahwa daya dukung wilayah (*carrying capacity*) adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia. Dengan kata lain populasi yang dapat didukung dengan tak terbatas oleh suatu ekosistem tanpa merusak ekosistem itu.

Prinsip daya dukung wilayah adalah perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan. Ketersediaan yaitu lingkungan (sumber daya alam) jumlah dan letaknya yang terbatas. Sementara kebutuhan jumlahnya tak terbatas dan sewaktu-waktu dapat meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk.

6. Pentingnya Daya Dukung Lingkungan dalam Pembangunan

Analisis daya dukung (*carrying capacity ratio*) merupakan suatu alat perencanaan pembangunan yang memberikan gambaran hubungan antara penduduk, penggunaan lahan dan lingkungan. Dari semua hal tersebut, analisis daya dukung dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam menilai tingkat kemampuan lahan dalam mendukung segala aktifitas manusia yang ada di wilayah yang bersangkutan.

Informasi yang diperoleh dari hasil analisis daya dukung secara umum akan menyangkut masalah kemampuan (daya dukung) yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan dan pengembangan daerah itu, dengan melihat perbandingan antara jumlah lahan yang dimiliki dan jumlah penduduk yang ada. Produktivitas lahan, komposisi penggunaan lahan, permintaan per kapita, dan harga produk agrikultur, semua dipertimbangkan untuk mempengaruhi daya dukung dan digunakan sebagai parameter masukan model tersebut.

Menurut Muta'ali (2012: 8), sumber daya dipakai secara layak apabila daya dukung dimanfaatkan sepenuhnya. Dalam hal daya dukung tersebut tidak dimanfaatkan secara penuh, maka pembangunan tidak efektif. Sebaiknya apabila pemanfaatan sumber daya melampaui daya dukung, maka pembangunan menjadi tidak efisien dan cenderung menurunkan kualitas lingkungan.

Selanjutnya daya dukung lingkungan wilayah dibedakan menjadi tujuh konsep, sebagai berikut:

a. Konsep Ekonomi

Kemampuan wilayah dalam mendukung penduduknya untuk hidup pada tingkat yang layak, di atas garis kemiskinan. Secara operasional, diindikasikan dengan jumlah penduduk miskin.

b. Konsep Sosial

Kemampuan wilayah dalam mendukung penduduknya untuk dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya seperti beribadah, pendidikan dan kesehatan, berbelanja, dsb.

c. Konsep Pangan

Kemampuan wilayah dalam menopang penduduknya dalam mencukupi pangan.

d. Konsep Papan (Permukiman)

Kemampuan wilayah dalam mencukupi lahan sebagai tempat untuk permukiman.

e. Konsep Lingkungan

Kemampuan wilayah dalam memberikan lingkungan yang baik tanpa merusak lingkungan bagi penduduk yang tinggal.

f. Konsep Mobilitas

Kemampuan wilayah dalam memberikan kebebasan dan ruang gerak yang baik kepada penduduknya untuk melakukan mobilitas.

g. Konsep Tata Ruang

Kemampuan wilayah dalam mendukung keseimbangan penggunaan lahan sesuai dengan peruntukannya.

Setiap pembangunan wilayah dalam perencanaannya harus memperhatikan daya dukung wilayah sebagai dasar untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan wilayah. Selain itu, perencanaan wilayah juga perlu pemahaman terhadap fungsi wilayah sesuai peruntukannya.

7. Daya Dukung Wilayah dalam Pembangunan Wilayah

Semakin bertambahnya jumlah penduduk dapat menimbulkan permasalahan baru terutama pada tekanan penduduk terhadap lahan. Lahan yang seharusnya digunakan sebagai lahan pertanian, fungsi lindung, dsb berubah fungsi menjadi budidaya dan lahan yang digunakan tersebut tidak sesuai dengan fungsinya berdasarkan pada daya dukung wilayah.

Menurut Muta'ali (2012), daya dukung wilayah untuk lahan pertanian,

permukiman, fungsi lindung, dan ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Daya dukung lahan pertanian

Daya dukung lahan pertanian merupakan kemampuan suatu lahan dalam memproduksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan di suatu wilayah. Kemampuan daya dukung lahan pertanian dapat diketahui melalui perbandingan antara luas lahan yang ada dengan jumlah petani. Data yang diperlukan untuk mengetahui daya dukung lahan pertanian adalah luas jumlah penduduk, lahan panen, kebutuhan pangan perkapita per tahun, dan produksi lahan rata-rata per tahun.

Daya dukung lahan pertanian dapat dihitung

$$\text{dengan : } \sigma = \frac{Lp/Pd}{KFM/Pr}$$

r

Keterangan :

- σ = Daya dukung wilayah pertanian
- Lp = Luas lahan panen (ha)
- Pd = Jumlah penduduk (jiwa)
- KFM = Kebutuhan pangan per kapita per tahun (kg/kapita/tahun)
- Pr = Produksi lahan rata-rata per hectare (kg/ha)

Kriteria daya dukung lahan pertanian sebagai berikut :

- 1) $\sigma < 1$: wilayah tersebut tidak mampu melaksanakan swasembada pangan, atau jumlah penduduk melebihi jumlah penduduk maksimum.
- 2) $\sigma > 1$: wilayah tersebut mampu swasembada pangan, atau jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk maksimum.
- 3) $\sigma = 1$: wilayah tersebut memiliki daya dukung yang maksimum.

b. Daya dukung wilayah untuk permukiman

Daya dukung wilayah permukiman adalah kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan lahan untuk permukiman dan dalam jumlah penduduk tertentu. Untuk mengetahui daya dukung wilayah untuk permukiman dapat diketahui dengan cara sebagai berikut :

$$DPPm = \frac{LPm/JP}{\sigma}$$

Keterangan :

- DPPm : Daya Dukung Permukiman
- JP : Jumlah penduduk
- σ : Koefisien luas kebutuhan ruang/kapita (m^2 /kapita)
- LPm : Luas lahan yang layak untuk permukiman (m^2)

Kriteria daya dukung permukiman sebagai berikut :

- 1) DPPm > 1, daya dukung permukiman masih tinggi, masih mampu menampung penduduk untuk bermukim di wilayah tersebut.
- 2) DPPm = 1, daya dukung permukiman optimal, terjadi keseimbangan antara

penduduk yang bermukim dan luas wilayah.

- 3) DPPm < 1, daya dukung permukiman rendah, yang berarti wilayah tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim.

c. Daya dukung fungsi lindung

Daya dukung fungsi lindung adalah kemampuan suatu kawasan dengan berbagai penggunaan lahannya dalam menjaga keseimbangan suatu wilayah tertentu. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Penggunaan lahan suatu kawasan dalam mengetahui daya dukung fungsi lindung untuk menjaga fungsinya agar tetap seimbang adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penggunaan Lahan dan Nilai Koefisiensi

No.	Penggunaan Lahan	Koefisien Lindung	No	Penggunaan Lahan	Koefisien Lindung
1.	Cagar Alam	1	9.	Perkebunan Rakyat	0,42
2.	Suaka Margasatwa	1	10.	Persawahan	0,46
3.	Taman wisata	1	11.	Ladang/Tegalan	0,21
4.	Taman Buru	0,82	12.	Padang Rumput	0,28
5.	Hutan Lindung	1	13.	Danau/Tambak	0,98
6.	Hutan Cadangan	0,61	14.	Tanaman kayu	0,37
7.	Hutan Produktif	0,68	15.	Permukiman	0,18
8.	Perkebunan Besar	0,54	16.	Tanah kosong	0,01

Sumber : Rushton dalam Muta'ali (2012:55)

Berdasarkan tabel di atas, untuk mengetahui daya dukung fungsi lindung dapat menggunakan rumus berikut ini:

$$DDL = \frac{\sum Lgl1. \alpha 1 + \sum Lgl1. \alpha 1 + \sum Lgl1. \alpha 1}{LW}$$

Keterangan :

DDL : Daya dukung fungsi lindung

Lgl 1 : Luas guna lahan jenis 1

α : Koefisien lindung untuk penggunaan lahan

LW : Luasan Wilayah (ha)

Nilai daya dukung fungsi lingkungan adalah 0 hingga angka yang diperoleh dalam perhitungan yang mendekati angka 1 maka daya dukung fungsi lindung semakin baik dalam wilayah tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila mendekati 0 maka fungsi lindung di wilayah tersebut semakin buruk.

d. Daya dukung ekonomi wilayah

Daya dukung ekonomi wilayah adalah kemampuan suatu wilayah untuk mendukung kegiatan penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengetahui nilai daya dukung ekonomi wilayah dapat menggunakan rumus :

$$DDE = \frac{PDRB_{tot}}{JP \times K}$$

Keterangan :

DDE	= Daya Dukung Ekonomi Wilayah
PDRB _{tot}	= Produk Domestik Regional Bruto
(Rp) JP	= Jumlah Penduduk (jiwa)
K	= Konsumsi penduduk per kapita (Rp)

Kriteria daya dukung ekonomi wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) $DDE > 1$, potensi ekonomi wilayah masih mampu mendukung kebutuhan kebutuhan dan konsumsi penduduk.
- 2) $DDE < 1$, potensi ekonomi wilayah sudah tidak mampu mendukung kebutuhan ekonomi dan konsumsi penduduk.
- 3) $DDE = 1$, potensi ekonomi wilayah dengan kebutuhan penduduk seimbang.

3.3 TES FORMATIF (PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN)

1. Uraikanlah permasalahan tata ruang wilayah DKI Jakarta!
2. Analisislah permasalahan keruangan wilayah tersebut!

4. KEGIATAN BELAJAR IV

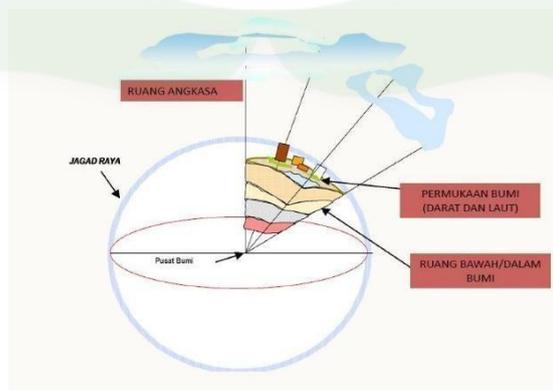
4.1 KD DAN IPK

Kompetensi Dasar	Indikator
3.1 Memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	3.1.4 Menganalisis konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
4.1 Membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten/kota/provinsi berdasarkan data wilayah setempat.	4.1.1 Membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten/kota/provinsi berdasarkan data wilayah setempat 4.1.2 Menyajikan laporan hasil diskusi tentang konsep wilayah dan tata ruang dilengkapi peta

4.2 MATERI

A. Perencanaan, Ruang dan Tata Ruang, Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang, Rencana Tata Ruang, Wilayah, Wilayah Nasional, dan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan **ruang** adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.



Gambar . Visualisasi Ruang

Tata ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Sementara **perencanaan** adalah suatu proses menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Secara resmi di Indonesia, perencanaan tata ruang merupakan bagian dari proses penataan ruang. **Penataan ruang** adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara **perencanaan tata ruang** adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang (Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). **Rencana tata ruang** adalah hasil perencanaan tata ruang. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. **Wilayah nasional** adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jadi, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RTRWN.

B. Jangka Waktu Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

C. Muatan Tata Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:

- 1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional
- 2) Rencana struktur ruang wilayah nasional
- 3) Rencana pola ruang wilayah nasional

Berikut ini penjelasan secara lebih rinci:

a. Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan

- pengecahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
 - 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
 - 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Kebijakan dan Strategi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi:

- 1) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang
Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:
 - a) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
 - b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
- 2) Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, meliputi:
 - a) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
 - b) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
 - c) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional

Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi:

- 1) Sistem Perkotaan
Sistem perkotaan nasional terdiri atas:
 - a) Pusat Kegiatan Nasional atau PKN
Pusat Kegiatan Nasional atau PKN ditetapkan dengan kriteria:
 - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
 - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
 - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
 - b) Pusat kegiatan wilayah atau pkw
Pusat kegiatan wilayah atau pkw ditetapkan dengan kriteria:
 - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung pkn;
 - Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.
- c) Pusat kegiatan lokal atau pkl.

Pusat kegiatan lokal atau pkl ditetapkan dengan kriteria:

- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
- Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Selain sistem perkotaan nasional sebagaimana disebutkan di atas juga dikembangkan pusat kegiatan strategis nasional atau pksn untuk mendorong perkembangan kawasan perbatasan negara. Pusat kegiatan strategis nasional atau pksn ditetapkan dengan kriteria:

- Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
- Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
- Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
- Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.



Gambar . Contoh peta rencana sistem perkotaan

2) Sistem energi

Sistem jaringan energi nasional terdiri atas:

a) Jaringan pipa minyak dan gas bumi

Jaringan pipa minyak dan gas bumi dikembangkan untuk:

- Menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau
- Menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen.

Jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta prioritas pengembangannya ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang minyak dan gas bumi. Jaringan pipa minyak dan gas bumi ditetapkan dengan kriteria:

- Adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut.
- Berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional.

b) Pembangkit tenaga listrik

Pembangkit tenaga listrik dikembangkan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian.

Pembangkit tenaga listrik ditetapkan dengan kriteria:

- Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, perdesaan hingga kawasan terisolasi.
- Mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi.
- Mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan.
- Berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi.
- Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.

c) Jaringan transmisi tenaga listrik.

Jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, atau kabel bawah laut. Jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan dengan kriteria:

- Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan.
- Mendukung pengembangan kawasan perdesaan, pulau-pulau kecil, dan kawasan terisolasi.
- Melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi.
- Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman.
- Merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah.
- Menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo volt.



Gambar . Contoh Peta Rencana Sistem Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

3) Sistem Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi nasional terdiri atas:

a) Jaringan terestrial

Jaringan terestrial dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah nasional. Jaringan terestrial ditetapkan dengan kriteria:

- menghubungkan antarpusat perkotaan nasional.
- menghubungkan pusat perkotaan nasional dengan pusat kegiatan di negara lain.
- mendukung pengembangan kawasan andalan
- mendukung kegiatan berskala internasional.

b) Jaringan satelit.

Jaringan satelit dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi nasional melalui satelit komunikasi dan stasiun bumi. Jaringan satelit ditetapkan dengan kriteria ketersediaan orbit satelit dan frekuensi radio yang telah terdaftar pada Perhimpunan Telekomunikasi Internasional.



Gambar . Contoh Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

4) Sistem Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. Wilayah sungai meliputi wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional. Cekungan air tanah meliputi cekungan air tanah lintas negara dan lintas provinsi. Arah pemanfaatan ruang pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional memperhatikan pola pengelolaan sumber daya air.

Kriteria penentuan wilayah sungai dan cekungan:

- a) Wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas negara ditetapkan dengan kriteria melayani kawasan perbatasan negara atau melintasi batas negara.
- b) Wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas provinsi ditetapkan dengan kriteria melintasi dua atau lebih provinsi.
- c) Wilayah sungai strategis nasional ditetapkan dengan kriteria:
 - Melayani kawasan strategis nasional, PKN, atau kawasan andalan.



Gambar . Contoh Peta Rencana Sistem Pengembangan Jaringan Sumberdaya Air

C. Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional

Rencana pola ruang wilayah nasional terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

1) Kawasan Lindung



Gambar . Contoh Kawasan Lindung

Kawasan lindung nasional terdiri atas:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.

- Kawasan perlindungan setempat.
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.
- Kawasan rawan bencana alam.
- Kawasan lindung geologi.
- Kawasan lindung lainnya

2) Kawasan Budi Daya



Gambar . Contoh Kawasan

Budidaya Kawasan budi daya terdiri atas:

- Kawasan peruntukan hutan produksi
- Kawasan peruntukan hutan rakyat
- Kawasan peruntukan pertanian
- Kawasan peruntukan perikanan
- Kawasan peruntukan pertambangan
- Kawasan peruntukan industri
- Kawasan peruntukan pariwisata
- Kawasan peruntukan permukiman
- Kawasan peruntukan lainnya.

Selain pengembangan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya kebijakan dan strategi perencanaan pola ruang nasional juga dilakukan dengan strategi dan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional. Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional ditetapkan sebagai kawasan andalan. Nilai strategis nasional meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

Kawasan andalan terdiri atas

1. Kawasan andalan darat

Kawasan andalan darat berkembang ditetapkan dengan kriteria:

- Memiliki paling sedikit 3 (tiga) kawasan perkotaan;
- Memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto paling sedikit 0,25% (nol koma dua lima persen);
- Memiliki jumlah penduduk paling sedikit 3% (tiga persen) dari jumlah

- penduduk provinsi;
- d. Memiliki prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan/atau bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi, dan air baku, serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi kawasan; dan
 - e. Memiliki sektor unggulan yang sudah berkembang dan/atau sudah ada minat investasi.
2. Kawasan andalan laut.
- Kawasan andalan laut ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki sumber daya kelautan;
 - b. memiliki pusat pengolahan hasil laut; dan
 - c. memiliki akses menuju pasar nasional atau internasional.

D. Konsep Perencanaan Tata Ruang

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan **ruang** adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sementara D.A.Tisnaamidjaja memaknai **ruang** sebagai wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak. **Tata ruang** adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang.

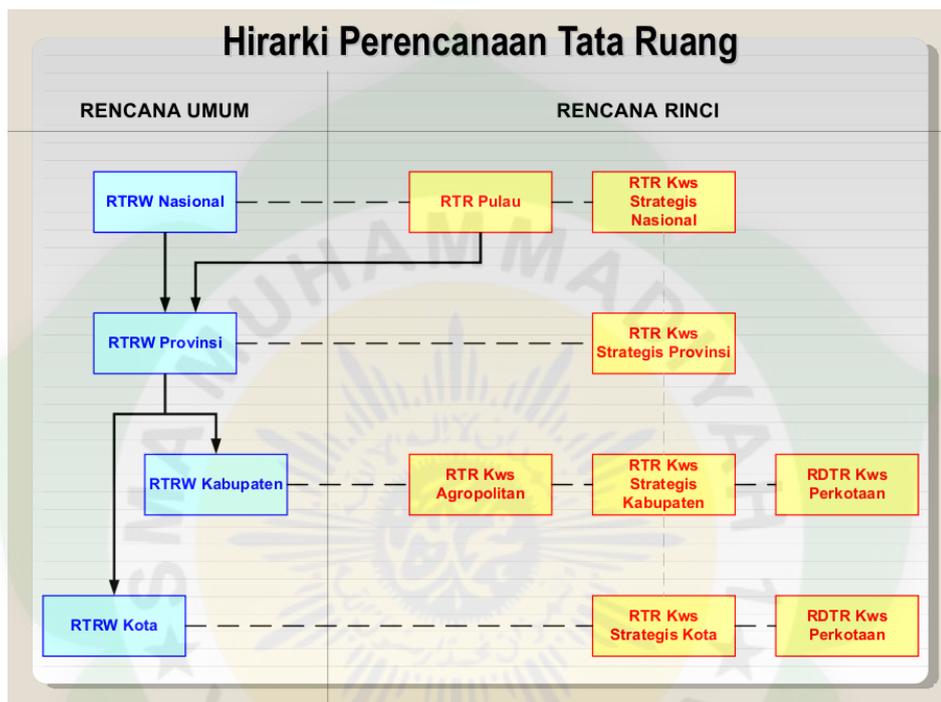
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. **Pola ruang** adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. **Penataan ruang** adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Definisi awal perencanaan tata ruang diambil dari *European Regional/Spatial Planning Charter* (disebut juga Torremolinos Charter), yang diadopsi pada tahun [1983](#) oleh Konferensi Menteri Eropa yang bertanggung jawab atas *Regional Planning* (CEMAT), bahwa "**Perencanaan tata ruang** memberikan ekspresi geografis terhadap kebijakan- kebijakan ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Perencanaan tata ruang juga merupakan sebuah ilmu ilmiah, teknik administrasi, dan kebijakan, yang dikembangkan sebagai pendekatan lengkap dan antar-ilmu, yang diarahkan kepada pengembangan regional dan organisasi fisik terhadap sebuah strategi utama."

Perencanaan tata ruang dirancang untuk menyatukan kebijakan pembangunan dan penggunaan lahan dengan kebijakan dan program lain yang mempengaruhi. Perencanaan tata ruang lebih dari sekedar perencanaan guna lahan tradisional. Perencanaan tata ruang memfasilitasi dan mempromosi keberlanjutan dan keinklusan pola pembangunan kota dan desa. Tidak hanya sekedar perspektif teknik yang sempit, perencanaan tata ruang melibatkan semua lapisan masyarakat dengan pertimbangan semua orang berperan di tiap lokasi tempat tinggal, kerja, dan lingkungannya. Perencanaan tata ruang diartikan sebagai pemikiran kritis terhadap tempat dan ruang sebagai dasar melakukan kegiatan atau intervensi.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan perencanaan tata ruang terkait:

1. Upaya mengalokasikan beragam kegiatan dalam ruang
2. Upaya kompromi terhadap berbagai sudut pandang pemanfaatan ruang atau mekanisme mediasi ruang
3. Alokasi ruang dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu fisik, lingkungan, politik, sosial dan ekonomi.
4. Melibatkan masyarakat dalam prosesnya
5. Dilaksanakan pada berbagai tingkatan pemerintah



Gambar . Hirarki Perencanaan Tata Ruang

E. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

❖ Struktur Ruang Wilayah Provinsi

Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan rencana kerangka tata ruang wilayah provinsi yang dibangun oleh kontelasi pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan) yang berhirarki satu sama lain dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi.

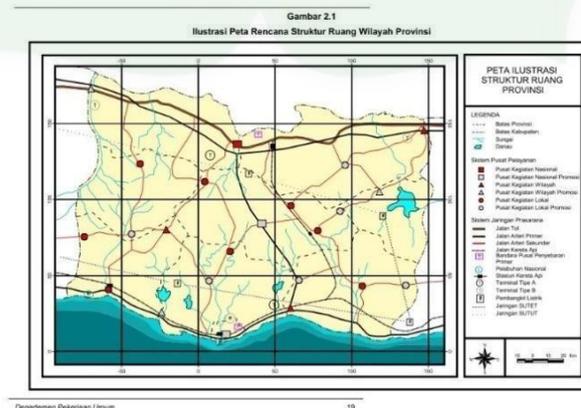
Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang berbatasan
- 2) Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah provinsi bersangkutan
- 3) Pusat-pusat di dalam struktur ruang wilayah provinsi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengadopsi pusat-pusat kegiatan yang kewenangan penetapannya berada pada pemerintah pusat yang terdiri atas pkn, pkw, dan pksn yang berada di wilayah provinsi bersangkutan.
 - b. Memuat penetapan pkl
 - c. Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang wilayah provinsi serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem perkotaan
- 4) Dapat memuat pusat-pusat kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai pkn
 - b. Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai pkw
 - c. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai pkn hanya pusat kegiatan yang sudah berstatus pkw
 - d. Pusat kegiatan yang dapat ditetapkan sebagai pkwp hanya kota-kota yang memenuhi persyaratan pkl
 - e. Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dan harus ditetapkan sebagai kawasan strategis
- 5) Pusat permukiman di dalam kawasan perkotaan metropolitan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pkn dapat ditetapkan menjadi pkl dalam sistem pusat-pusat permukiman dalam struktur ruang wilayah provinsi sesuai dengan fungsi yang diemban dalam skala provinsi.
- 6) Sistem jaringan prasarana wilayah provinsi dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Merujuk pada ketentuan struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas sistem prasarana utama pembentuk ruang dan sistem prasarana lainnya:
 - a) **Sistem prasarana utama** yang merupakan sistem jaringan transportasi, yang terdiri atas:
 - 1) Sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
 - a) Jaringan jalan yang terdiri atas:
 - Jaringan jalan nasional (arteri primer, kolektor primer, jalan tol, dan

jalan strategis nasional) yang ada dalam wilayah provinsi dan jaringan jalan Yang menjadi kewenangan provinsi (kolektor primer dan jalan strategis provinsi) sesuai dengan ketentuan UU 34/2004 tentang jalan

- Terminal tipe A dan B dalam wilayah provinsi
- b) Jaringan kereta api
- Jaringan jalur kereta api (KA), meliputi jaringan jalur KA umum dan jaringan jalur KA Khusus
 - Stasiun KA besar dan sedang
- c) Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan yang terdiri atas:
- Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan danau, serta lintas penyebrangan yang berada di wilayah provinsi
 - Pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyebrangan yang berada di wilayah provinsi
- 2) Sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- (a) Pelabuhan terdiri atas pelabuhan internasional, nasional, regional dan lokal
- (b) Pelabuhan khusus
- 3) Sistem jaringan transportasi udara, meliputi:
- (a) Bandar udara yang telah ditetapkan dalam RTRWN, terdiri atas bandar udara pusat penyebaran primer, sekunder, tersier dan bukan pusat penyebaran. Klasifikasi bandar udara dalam RTRWN provinsi berdasarkan fungsinya (pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran) dan statusnya (internasional, domestik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang bandar udara yang berlaku.
- (b) Bandar udara khusus yang berada di wilayah provinsi
- (c) Ruang udara untuk penerbangan yang terdiri atas:
- Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara
 - Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan
 - Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan
- b) **Sistem prasarana lainnya**, yang terdiri atas:
- 1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan dapat meliputi:
- (a) Pembangkit listrik di wilayah provinsi
- (b) Pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional (jika terdapat di wilayah provinsi)
- (c) Sistem prasarana listrik, terdiri atas jaringan Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah provinsi.
- 2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi dapat meliputi:
- (a) Jaringan terestrial
- (b) Jaringan satelit

- 3) Rencana sistem jaringan sumberdaya air dapat meliputi:
 - (a) Jaringan sumberdaya air lintas negara dan lintas provinsi untuk mendukung air baku pertanian, terdiri atas jaringan primer lintas kabupaten, dan jaringan air baku untuk kawasan pertanian yang bersifat strategis provinsi dan/atau nasional jika ada dalam wilayah provinsi
 - (b) Jaringan sumberdaya air untuk kebutuhan air baku industri untuk mendukung kawasan industri yang bersifat strategis provinsi dan/atau nasional jika ada dalam wilayah provinsi
 - (c) Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum, terdiri atas jaringan air baku dari lokasi pengambilan (intake) sampai ke lokasi pengolahan yang mendukung kawasan perkotaan di wilayah provinsi
 - (d) Sistem pengendalian banjir di wilayah provinsi dan/atau lintas wilayah provinsi
- 4) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan provinsi
- 8) Pemetaan struktur ruang wilayah provinsi mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) Rencana struktur ruang wilayah provinsi harus menggambarkan rencana struktur ruang wilayah nasional yang ada di wilayah provinsi
 - b) Sistem perkotaan dan sistem prasarana utama digambarkan pada satu lembar peta wilayah provinsi secara utuh
 - c) Sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada satu lembar peta wilayah provinsi secara utuh atau dapat digambarkan pada peta tersendiri
 - d) Sistem perkotaan sebagai pusat kegiatan dalam sistem nasional yang terdiri atas PKN, PKW, dan PKS di digambarkan dengan simbol sesuai dengan RTRWN, sedangkan untuk PKL digambarkan dengan simbol
 - e) PKNp dan PKWp digambarkan dengan simbol
 - f) Rencana struktur ruang wilayah provinsi harus digambarkan dengan ketelitian peta setara 1:250.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis. Untuk wilayah provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan laut dapat dilengkapi dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut)
 - g) Penggambaran rencana struktur ruang wilayah provinsi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang
 - 9) Harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait.



Gambar . Ilustrasi Peta Struktur Ruang Wilayah Provinsi

❖ Pola Ruang Wilayah Provinsi

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi:

- 1) Sebagai alokasi ruang untuk kawasan budidaya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi
- 2) Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang
- 3) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun
- 4) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan berdasarkan:

- 1) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional
- 2) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah provinsi
- 3) Kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budidaya dan kawasan lindung
- 4) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- 1) Harus sesuai dengan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan rencana rincinya
- 2) Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah provinsi bersangkutan
- 3) Memperhatikan rencana pola ruang wilayah provinsi yang berbatasan
- 4) Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.
 - 1) Kawasan lindung, terdiri atas:
 - a) Kawasan hutan lindung
 - b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air
 - c) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal
 - d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor,
 - a) kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir
 - b) Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan

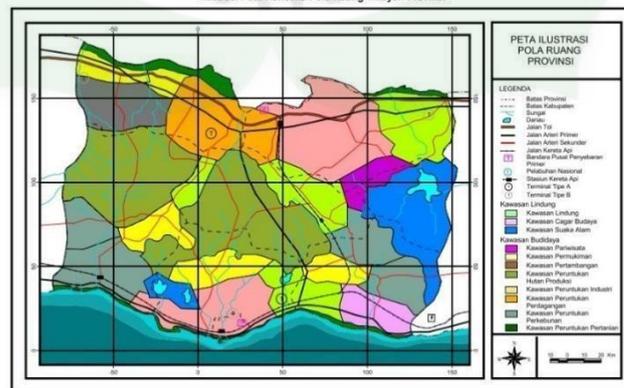
terhadap air tanah

- c) Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi
- 2) Kawasan budidaya, meliputi:
- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonservasi
 - (2) Kawasan hutan rakyat
 - (3) Kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura
 - (4) Kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah provinsi
 - (5) Kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan
 - (6) Kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan
 - (7) Kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri kecil/rumah tangga, industri agro, industri ringan, industri berat, industri petrokimia, dan industri lainnya
 - (8) Kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: semua jenis wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/taman rekreasi, dan wisata lainnya Kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan
 - (9) Peruntukan kawasan budidaya lainnya, yang antara lain meliputi kawasan peruntukan: instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Gambar 2.2

Ilustrasi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi



Departemen Pekerjaan Umum

25

Gambar Ilustrasi Peta Rencana Pola Ruang Provinsi

F. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

❖ Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

1. Mengakomodasi rencana struktur ruang nasional dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan.
2. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan
3. Pusat-pusat permukiman yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Terdiri atas pusat pelayanan kawasan (PPK), pusat pelayanan lingkungan (PPL), serta pusat kegiatan lain yang berhirarki lebih tinggi yang berada di wilayah kabupaten yang kewenangan penentuannya ada pada Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
 - b) Memuat penetapan pusat pelayanan kawasan (PPK) serta pusat pelayanan lingkungan (PPL)
 - c) Harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem wilayah kabupaten
4. Dapat memuat pusat-pusat kegiatan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL
 - b) Pusat kegiatan harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dan mengindikasikan program pembangunannya di dalam arahan pemanfaatannya ruangannya, agar pertumbuhannya dapat didorong untuk memenuhi kriteria PKL
5. Sistem jaringan prasarana kabupaten dibentuk oleh sistem jaringan transportasi

sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

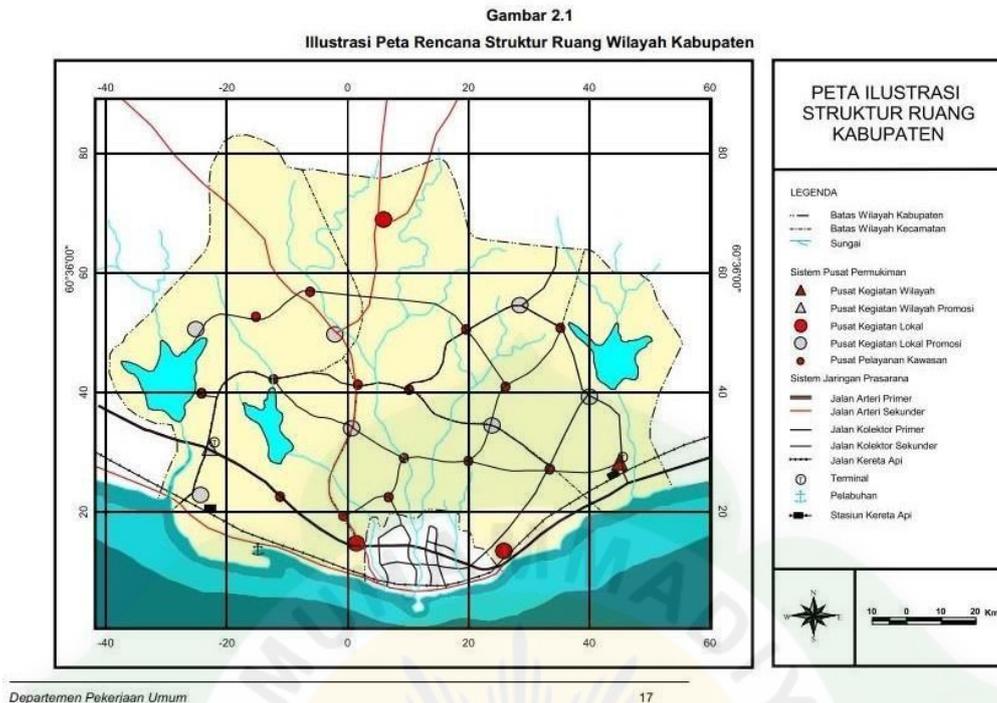
6. Merujuk pada ketentuan struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas sistem prasarana utama pembentuk ruang dan sistem prasarana lainnya:
 - a. **Sistem prasarana utama** yang merupakan sistem jaringan transportasi, yang terdiri atas:
 - 1) Sistem jaringan transportasi darat, meliputi:
 - a) Jaringan jalan yang terdiri atas:
 - Jaringan jalan nasional yang berada pada wilayah kabupaten
 - Jaringan jalan provinsi yang berada pada wilayah kabupaten
 - Jaringan jalan kabupaten yang terdiri atas: jalan kolektor primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan provinsi; jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa; jalan sekunder; dan jalan strategis kabupaten
 - Jalan khusus, berupa jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri
 - Jalan dan jembatan, yang meliputi pembangunan jalan/jembatan baru membuka kawasan terisolasi, untuk meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi, serta untuk meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya lainnya.
 - Lokasi terminal sesuai dengan jenis, kelas pelayanan sebagai terminal antarwilayah (type A), wilayah kota (type B), atau lokal (type C) sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dalam sistem nasional, provinsi/metropolitan, atau sub terminal
 - Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal wilayah, misalnya jalur bus (bus way)
 - b) Jaringan kereta api
 - Jaringan jalur kereta api umum yang berada pada wilayah kabupaten, yang terdiri atas jaringan jalur kereta api antarkota dan jaringan jalur kereta api perkotaan, termasuk *subway* dan monorel
 - Jaringan jalur kereta api khusus yang berada pada wilayah kabupaten
 - Stasiun kereta api
 - c) Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan
 - Alur pelayaran untuk kepentingan angkutan sungai dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau yang terdapat pada wilayah kabupaten
 - Lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten
 - Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau yang terdapat di wilayah kabupaten
 - Pelabuhan penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten

- 2) Sistem jaringan transportasi laut, mencakup:
 - a) Pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang terdiri atas:
 - Pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal
 - Pelabuhan khusus
 - b) Alur pelayaran yang terdapat pada wilayah kabupaten baik internasional maupun nasional
- 3) Sistem jaringan transportasi udara, mencakup:
 - a) Bandar udara umum dan bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten
 - b) Ruang udara untuk penerbangan yang terdiri atas:
 - Ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara
 - Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan
 - Ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan
- c) **Sistem prasarana lainnya**, yang terdiri atas:
 - 1) Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan dapat meliputi:
 - a) Pembangkit listrik (skala besar maupun kecil) di wilayah kabupaten
 - b) Jaringan prasarana energi yang mencakup:
 - Penjabaran jaringan minyak dan gas bumi, dalam wilayah kabupaten (jika ada)
 - Penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah kabupaten (jika ada).
 - Lokasi gardu induk distribusi maupun pembangkit listrik
 - 2) Rencana sistem jaringan telekomunikasi dapat meliputi:
 - a) Infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon
 - b) Infrastruktur telepon nirkabel antara lain lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* (BTS)
 - c) Jaringan telekomunikasi satelit pada wilayah terpencil

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk wilayah berbukit/pegunungan dapat diutamakan sistem nirkabel dengan penutupan wilayah *blankspot*, sedangkan untuk wilayah pulau/kepulauan diarahkan pada penggunaan kabel bawah laut dan/atau sistem telekomunikasi satelit pada sistem utama.

- 4) Rencana sistem jaringan sumberdaya air dapat meliputi:
 - a) Jaringan sumberdaya air lintas negara dan lintas provinsi dan lintas kabupaten pada wilayah kabupaten
 - b) Wilayah sungai kabupaten termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kabupaten
 - c) Jaringan irigasi yang berfungsi mendukung produktivitas usaha tani terdiri atas bangunan, bangunan pelengkap, dan saluran yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri atas jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, serta jaringan irigasi air tanah.
 - d) Jaringan air baku untuk air bersih
 - e) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna
 - (e) Sistem pengendalian banjir di wilayah kabupaten
 - 5) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya dapat meliputi jaringan prasarana lingkungan, mencakup prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri atas sistem jaringan persampahan, sumber air minum kota, jalur evakuasi bencana, dan sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kabupaten.
7. Pemetaan struktur ruang wilayah kabupaten mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten harus menggambarkan rencana struktur ruang wilayah nasional dan wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten
 - b) Sistem perkotaan dan sistem prasarana utama digambarkan pada satu lembar peta wilayah kabupaten secara utuh
 - c) Sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada satu lembar peta wilayah kabupaten secara utuh atau dapat digambarkan pada peta tersendiri
 - d) Sistem perkotaan yang terdiri atas PKN, PKW, PKL, PKSN, PPK, dan PPL digambarkan dengan simbol
 - e) PKLp digambarkan dengan simbol
 - f) Sistem jaringan prasarana jalan harus digambarkan mengikuti terase jalan yang sebenarnya
 - g) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten harus digambarkan dengan ketelitian peta minimum 1:50.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis. Untuk wilayah kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan laut dapat dilengkapi dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut)
 - h) Notasi penggambaran secara struktur ruang wilayah kabupaten harus mengikuti RTRWN dan peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang

8. Harus mengikuti perundang-undangan terkait.



Gambar . Ilustrasi Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

❖ Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
- b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten
- c. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

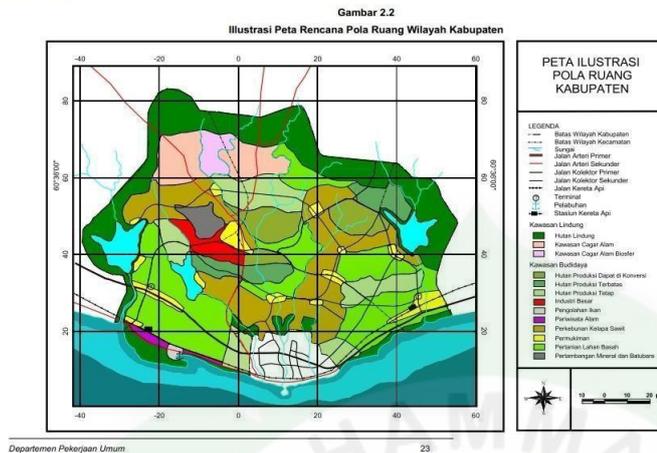
Rencana pola ruang wilayah provinsi dirumuskan dengan kriteria:

- a. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan rencana rincinya
- b. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP dan rencana rincinya
- c. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan

- d. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten /kota yang berbatasan
- 6) Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai berikut:
- 1) Kawasan lindung, terdiri atas:
 - a) Kawasan hutan lindung
 - b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air
 - c) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya
 - d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
 - e) Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir
 - f) Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah
 - g) Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi
 - 2) Kawasan budidaya, meliputi:
 - a) Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dapat dirinci meliputi: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonservasi
 - b) Kawasan hutan rakyat
 - c) Kawasan peruntukan pertanian, yang dapat dirinci meliputi: pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura
 - d) Kawasan peruntukan perkebunan, yang dapat dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten
 - e) Kawasan peruntukan perikanan, yang dapat dirinci meliputi kawasan: perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan, dan kawasan pengolahan ikan
 - f) Kawasan peruntukan pertambangan, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, dan air tanah di kawasan pertambangan
 - g) Kawasan peruntukan industri, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: industri besar, industri sedang, dan industri rumah tangga
 - h) Kawasan peruntukan pariwisata, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: pariwisata budaya, pariwisata alam, pariwisata buatan
 - i) Kawasan peruntukan permukiman, yang dapat dirinci meliputi kawasan peruntukan: permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Sebagai

kawasan budidaya makan permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing- masing permukiman terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya

j) Kawasan peruntukan lainnya



Gambar . Ilustrasi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

G. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota

Rencana Tata Ruang Wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota; rencana struktur ruang wilayah kota; rencana pola ruang wilayah kota; penetapan kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

❖ Struktur Ruang Wilayah Kota

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

- Memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan
- Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota yang bersangkutan
- Penentuan pusat-pusat pelayanan di dalam struktur ruang kota harus berhirarki dan tersebar secara proporsional di dalam ruang kota serta saling terkait menjadi satu kesatuan sistem
- Sistem jaringan prasarana kota dibentuk oleh sistem jaringan transportasi

- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan:

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota
- b. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota
- c. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

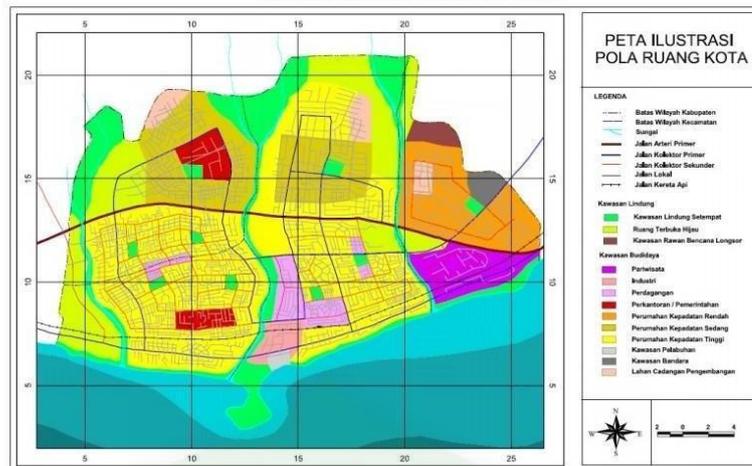
Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan dengan kriteria:

- a. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan rencana rincinya
- b. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP dan rencana rincinya
- c. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten /kota yang berbatasan
- d. Memperhatikan mitigasi bencana pada wilayah kota
- e. Memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan dalam wilayah kota
- f. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota
- g. Menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal
- h. Menyediakan ruang terbuka non hijau untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota
- i. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan
- j. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai berikut:
 - 1) Kawasan lindung, terdiri atas:
 - a) Kawasan hutan lindung
 - b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air
 - c) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air
 - d) Ruang terbuka hijau (RTH) kota, yang antara lain meliputi taman RT, taman RW, taman kota dan pemakaman
 - e) Kawasan suaka alam dan cagar budaya
 - a) Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir
 - b) Kawasan lindung
- 2) Kawasan budidaya, meliputi:
 - a) Kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah
 - b) Kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern
 - c) Kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran

- pemerintahan dan perkantoran swasta
- d) Kawasan industri yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan
 - e) Kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan
 - f) Kawasan ruang terbuka non hijau
 - g) Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi
 - h) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal
 - i) Kawasan peruntukan lainnya meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.
- k. Mengikuti pemetaan pola ruang wilayah kota sebagai berikut:
- 1) Rencana pola ruang wilayah kota harus digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang
 - 2) Cakupan rencana pola ruang wilayah kota meliputi ruang darat dan ruang laut dengan batasan 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai di wilayah kota atau sampai batas negara yang disepakati secara internasional apabila kota terkait berbatasan laut dengan negara lain
 - 3) Rencana pola ruang wilayah kota dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta RBI atau Bakosurtanal. Untuk wilayah kota yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan perlu dilengkapi dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut) skala 1:25.000
 - 4) Penggambaran rencana pola ruang wilayah kota harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang, antara lain memuat sistem jaringan prasarana utama dan sungai
 - 5) Rencana pola ruang untuk ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi wilayah kota diatur lebih lanjut dengan pedoman tersendiri
 - 6) Harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait pemetaan rencana tata ruang

Gambar 2.2

Ilustrasi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota



Gambar . Ilustrasi Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota

H. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

1. Peraturan zonasi

Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan keberlanjutan. Ketentuan lain yang dibutuhkan antara lain adalah ketentuan pemanfaatan ruang yang terkait dengan keselamatan penerbangan, pembangunan pemancar alat komunikasi, dan pembangunan jaringan listrik tegangan tinggi.

2. Perizinan

- Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana di atas, dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

- f. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
3. Pemberian insentif dan disinsentif

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Insentif sebagaimana dimaksud di atas, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
- d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

Disinsentif sebagaimana dimaksud, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:

- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah kepada masyarakat.
4. Pengenaan sanksi
- Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

I. Permasalahan Dalam Penerapan Tata Ruang Wilayah

1. Masalah Kebijakan dan Integritas Para Kepala Daerah

Kebijakan dan integritas para kepala daerah sangat berpengaruh terhadap keberadaan dokumen tata ruang baik RTRW maupun RDTR yang biasanya membutuhkan **waktu yang lama** untuk menyusunnya. Proses penyusunan yang panjang ini karena adanya tarik ulur antara DPR, Pemda dan masyarakat. Sebagai contoh di Bali, belum satupun Pemda Kabupaten di Bali yang memiliki RTRW. Terlebih untuk Kabupaten Tabanan tidak mempunyai RTRW sejak tahun 2000-an. Dengan kata lain selain Kota Denpasar seluruh Kabupaten yang ada di Bali harus mengacu pada RTRW tingkat Provinsi (Perda 16/2009). Hal ini disebabkan karena kebijakan dari para pemimpin daerah kabupaten tersebut **belum ada niat** untuk menyusun RTRW yang sesuai dengan UU dan PP tentang penata ruangan yang berlaku.

Langkanya penetapan hukum ini dilengkapi dengan belum satupun Pemda Kabupaten yang memiliki Perda tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diamatkan oleh UU No 41 tahun 2009. Walaupun telah ada landasan hukum peraturan Pemerintah (PP) tentang Penetapan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PP 11/2011), dan PP tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PP 12/2012). Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa adanya penetapan **kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan membatasi gerak langka pembangunan di sektor ekonomi**. Ini terkait dengan kebutuhan lahan dan sanksi yang lebih berat dari sanksi dalam tata ruang. Hal ini perlu adanya *mainset* yang semula pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan diubah menjadi pembangunan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan berbasis kearifan lokal dalam bingkai NKRI.

Langkanya Perda tentang RTRW, RDTR, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB), dapat diidentifikasi bahwa: **kebijakan dan integritas para Pemimpin daerah di tingkat kabupaten sangat kurang untuk melindungi wilayahnya secara berkelanjutan**. Salah satu faktornya adalah: **garansi kekuasaan yang hanya lima tahun dalam satu periode**, sementara dalam proses pencalonan membutuhkan biaya yang sangat tinggi, mendorong usaha pengembalian modal yang cukup besar. Salah satu sumber dana adalah proses pembangunan di daerahnya, seperti pengeluaran berbagai jenis perizinan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan bangunan. RTRW dan PLPPB dianggap membatasi proses pembangunan. Dengan dalih investasi dan membuka lapangan pekerjaan sering penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya. Walaupun adanya sanksi dalam UU dan Perda, namun dalam pelaksanaannya sering tidak dapat menjangkau para penguasa dan pemilik modal, walaupun telah **melanggar tata ruang**, seperti sempadan pantai, danau, sungai dan jurang.



Gambar Rapat para Kepala Daerah

2. Masalah Pembiayaan dan Tenaga Ahli/ Kepakaran

Pembiayaan dan kualitas tenaga ahli yang rendah sering berpengaruh terhadap kualitas produk dokumen RTRW. Penyusunan dokumen tata ruang

didahului oleh kajian akademik yang meliputi analisis aspek fisik, lingkungan, ekonomi, sosial budaya. Analisis berbagai aspek tersebut diperlukan spesifikasi tenaga ahli yang sesuai dengan kepakarannya. Anggaran RTRW yang rendah berdampak pada kualitas dan kepakaran tim penyusun yang rendah pula. Bahkan beberapa nama pakar hanya sebatas dicantumkan. Namun dalam pelaksanaannya sering tidak terlibat.

Penyusunan RTRW dan penataan ruang lainnya, seperti rencana detail tata ruang (RDTR), rencana strategis atau rencana rinci, sering **dikerjakan oleh pihak ketiga**. Pihak ini mengerjakan RTRW di beberapa daerah. Anggapannya proses penyusunan RTRW sudah baku merupakan kelemahan, karena intuisi keilmuannya kurang dan hanya mengejar keuntungan, maka sering ditemukan adanya autoplagiat atau *copy paste*.

Oleh karena itu, dalam draf laporan final sering ditemukan kata dan kalimat yang sama dengan dokumen RTRW daerah lain. Kedekatan antara para pengambil keputusan di tingkat Pemda dengan pelaksana pihak ketiga merupakan salah satu faktor rendahnya kualitas keahlian dan kepakaran dalam penyusunan RTRW dan RDTR atau perencanaan lainnya. Rendahnya kualitas ini ditambah dengan ciri swasta yang melakukan pekerjaan secara efisien dan kurang mementingkan kualitas produk, berdampak pada dokumen RTRW hanya merupakan koleksi.

3. Masalah Tingkat Ketelitian dan Keterbaruan Data Base

Data fisik, lingkungan, sosial budaya dan ekonomi merupakan data pokok yang sering disebut data base atau data dasar yang digunakan untuk analisis kesesuaian lahan dalam penentuan berbagai kawasan. Demikian pula data untuk analisis daya dukung lahan dan air serta ruang wilayah. Banyaknya data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dari data primer, data sekunder dan data hasil analisis. Berbagai data tersebut diperoleh dari hasil survei, analisis dan klasifikasi tertentu sesuai dengan tingkatan yang telah disyaratkan, seperti halnya data penduduk dan data penggunaan dan pemanfaatan lahan harus data terkini, yang diproyeksikan untuk 20 tahun mendatang.

Demikian pula data fisik, lingkungan dan sosial budaya serta ekonomi membutuhkan data primer, disamping data sekunder sebagai pembanding. **Mahal dan lamanya memperoleh data** tersebut, sering dijadikan alasan menggunakan data lama. Oleh karena itu, dalam perencanaan sering tidak sesuai dengan kebutuhan tingkat kualitas datanya. Seperti halnya data penggunaan lahan untuk seluruh Bali membutuhkan waktu dan biaya yang mahal dan lama. Oleh karena itu, sering digunakan data tahun 2000-an, padahal perencanaan tahun 2010-an. Demikian pula data iklim 10 tahun ke belakang berbeda dengan pola iklim 20 tahun sebelumnya. Ini jelas datanya sudah kadaluarsa alias data tidak valid. Berbeda dengan data kemiringan lereng, relief, data jenis tanah dan kerentanan terhadap bencana alam letusan gunung, longsor tanah, tsunami, angin kencang, dll merupakan data yang cukup stabil, kecuali terjadi bencana alam.

Dalam pelaksanaan penyusunan RTRW sering menggunakan data lama dan berkualitas rendah. Akibatnya banyak lokasi perencanaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya untuk kawasan-kawasan tertentu. Penentuan kawasan yang tidak sesuai dengan kemampuan, kesesuaian lahan

dan daya dukung serta daya tampung lahannya dalam rancangan Permen LH 2011 digolongkan ke dalam lahan kritis.

4. Masalah Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan antara konsep pelestarian dan pembangunan ekonomi merupakan permasalahan yang sering terjadi. Sebagai contoh, mahalnya harga tanah di Bali, dan daya tarik wisata pantainya serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seolah membatasi penggunaan dan pemanfaatan lahan. Adanya sempadan ditujukan untuk menjaga kelestarian obyek yang dilindungi dan cara untuk pencegahan adanya dampak negatif terhadap obyek, lokasi dan kawasan yang dilindungi.

Kegiatan pariwisata yang bertumpu pada sapta pesona (keindahan, keramah-tamahan, kebersihan, keamanan, kenyamanan, keunikan dan kenangan) berdampak pada daya tarik alam dan budaya yang unik, seperti jurang yang harus dilindungi, namun dianggap unik maka dijadikan obyek wisata, demikian pula panorama yang indah di pegunungan mendorong pembangunan yang mengurangi tingkat kelestarian dan resapan air tanah. Demikian pula panorama laut yang indah mendorong terjadinya pelanggaran sempadan pantai. Dengan kata lain di Singapura dan di negara lain adanya pembangunan di atas laut dan danau, tidak mungkin terjadi di Indonesia khususnya Bali, karena selain merupakan kawasan yang harus dilindungi secara nasional, juga merupakan kawasan suci, seperti gunung, danau, sungai, dan laut.

Di Bali, konflik kepentingan terjadi akibat dari kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah milik dengan penetapan kawasan lindung dalam rangka pelestarian kawasan suci dan kawasan ruang terbuka hijau publik dan privat. Masyarakat yang tanahnya terdapat di ruang terbuka hijau atau berada dalam kawasan suci, akan mendapatkan nilai jual ekonomi yang rendah bila dibanding dengan lahan yang berada di kawasan pariwisata, kawasan perdagangan dan jasa, industri dan pemukiman.

Masyarakat desa adat yang akan membangun rumah, sementara lahan yang akan dibangun merupakan RTH atau kawasan suci akan terjadi konflik kepentingan, karena permasalahan keikutsertaan dalam adat yang sebagian besar tidak dapat pindah ke adat lainnya, terutama dalam kegiatan suka dan duka. Menyebabkan alokasi ruang tidak sesuai dengan peruntukannya karena pemerintah belum mampu untuk membeli tanah yang ditetapkan sebagai RTH dan kawasan lindung.

5. Masalah Ekonomi

Harga tanah di kawasan budidaya pertanian seperti RTH, RTHK, dan kawasan lindung setempat jauh lebih murah dibanding dengan kawasan budidaya non- pertanian (perumahan, perdagangan, industri, pariwisata dll). Di Bali, Walaupun lokasi tanah tersebut jauh dari kota dan secara ekologis tidak sesuai dengan kemampuannya namun bila ditetapkan sebagai kawasan pariwisata seperti di kawasan Bukit Jimbaran dan di Nusa Dua, harga tanah tersebut jauh lebih mahal bila dibanding dengan wilayah RTHK di kawasan Tanjung Bungkak yang dekat dengan pusat pemerintahan.

Kebutuhan akan lahan di Bali tidak hanya untuk etnis Bali. Masyarakat

Indonesia, bahkan para pembisnis dari manca negara juga memerlukan lahan di Bali. Hal ini disebabkan Bali sebagai tujuan pariwisata dunia. Oleh karena itu apabila tanah di Bali dibuka sebagai kawasan budidaya non-pertanian yang dilengkapi dengan aksesibilitas sangat baik seperti jalan dengan kelas tertentu sehingga segera terjadi pembangunan. Kita bisa menyaksikan dimana ada jalan yang menghubungkan pusat-pusat pariwisata dan bisnis, seperti Jalan Gatot Subroto, Malboro, Mahendradata, Sunset Road, Ida Bagus Mantera, maka tidak sampai lima tahun bermunculan berbagai jenis usaha penunjang pariwisata.

Harga tanah yang semula sebagai lahan pertanian sangat murah, dan meningkat sangat tinggi berpuluh bahkan beratus kali lipat bila dijadikan kawasan non- pertanian yang dilengkapi dengan aksesibilitas yang baik. Hal inilah baik masyarakat, maupun para spekulan tanah justru mengajukan konsolidasi tanah karena telah mengetahui peningkatan harga tanah yang tinggi bila lahan pertaniannya diubah menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, jasa, dan sarana penunjang pariwisata lainnya.

Di Bali, masyarakat yang tanah miliknya ditetapkan menjadi kawasan lindung pada umumnya mengadakan perlawanan **dengan dalih tidak mempunyai nilai ekonomis**. Untuk itu adanya PP tentang insentif dan disinsentif membantu mengatasi permasalahan tersebut. Usaha mengatasi persepsi masyarakat bahwa lokasi fungsi lindung ekologis, sosial budaya seperti kawasan suci Pura, maka diperlukan penatagunaan tanah yang memungkinkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dengan tetap dalam bingkai sesuai dengan fungsi kawasannya.

Pemerintah telah **melakukan langkah insentif** terhadap tanah-tanah yang berada di kawasan RTH dan kawasan lindung lainnya, seperti pembebasan pajak bumi dan bangunan, pemberian subsidi sarana usaha tani dan kemudahan lainnya dalam berusaha yang sesuai dengan alokasi ruangnya. Usaha pemerintah ini dianggap belum mencukupi karena para pemilik tanah merasa ada pembatasan penggunaannya dan hak atas tanah yang semakin hari semakin meningkat di kawasan budidaya non-pertanian. Di samping itu banyaknya spekulan tanah yang memberikan informasi yang tidak akurat, menyebabkan banyaknya transaksi jual

beli tanah di kawasan ini.

HARGA TANAH TERMAHAL / M ²	
JAKARTA	RP 24,6 JUTA
DEPOK	RP 15,2 JUTA
BEKASI	RP 14,2 JUTA
BOGOR	RP 11 JUTA
KENDARI	RP 9,3 JUTA

Gambar . Harga Tanah di berbagai Daerah

6. Masalah Sosial Budaya

Di Bali, apabila masyarakat beserta pemerintah Bali ingin melestarikan kawasan suci seperti kawasan perlindungan Pura, maka pemerintah seharusnya menyewa dan atau membeli tanah tersebut. Demikian pula tanah yang terletak di kawasan lindung seperti di daerah pegunungan hulu DAS, RTH dan RTHK. Kepemilikan tanah di luar tanah negara akan sangat rentan terjadi pelanggaran, apabila tanah tersebut merupakan hak milik masyarakat.

Permasalahan di wilayah perkotaan yang mengalami urbanisasi dan pembangunan yang pesat di sektor ekonomi, seperti di wilayah Kota Denpasar sering **terjadi permasalahan sosial**, seperti timbulnya lingkungan kumuh, akibat dari sewa menyewa tanah yang digunakan untuk kebutuhan pemukiman para urban. Pemukiman kumuh di Bali berbeda pemukiman kumuh di wilayah lainnya. Karena pada umumnya para pemukim tersebut menyewa tempat, baik merupakan kos-kosan dan atau menyewa tanah dari penduduk lokal. Para urban bukan menempati tanah negara, namun tanah milik perseorangan. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan aturan tentang sewa menyewa tanah dan penggunaan lahannya, agar dapat mengurangi pemukiman kumuh.

Lahan pertanian yang semula mampu melaksanakan usaha pertanian secara berkesinambungan, dengan melestarikan alam (tanah dan air) yang sangat baik, serta pelestarian budaya agraris yang unggul. Sebagai gambaran sebagian besar sarana upakara berasal dari produk pertanian secara luas (tanaman, dan hewan). Fenomena ini telah hilang di wilayah perkotaan karena tanahnya telah berubah fungsi menjadi lahan beton dan mengalami degradasi.

Para pemilik tanah terpinggirkan digantikan oleh pemilik modal dan pengusaha makro, meso dan mikro lainnya yang menggantikan kepemilikan tanah tersebut. Para urban tersebut umumnya lebih ulet dan mampu mengidentifikasi peluang bisnis di berbagai sektor. **Keterdesakan ruang terjadi dimana-mana**. Ruang terbuka hijau yang berupa lapangan digantikan oleh kawasan perdagangan. Demikian pula sarana olahraga, kuburan dan perumahan yang dianggap tidak ekonomis digantikan oleh pasar modern dan kawasan perdagangan lainnya yang dianggap mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi. Lapangan sepak bola yang merupakan RTH dan tempat interaksi dari berbagai kalangan status ekonomi yang beragam, serta kegiatan olah raga yang paling murah sangatlah langka. Digantikan oleh kawasan perdagangan dan jasa. Para

pemuda mengalami keterbatasan sarana umum. Kegiatan sepak bola digantikan sepak bola mini dan bola sodok yang cukup di ruangan, namun harus membayar merupakan permasalahan sosial remaja yang perlu disikapi.

Dampak dari keterdesakan ruang adalah semua kegiatan **dihargakan dengan nilai ekonomi**, walaupun **semula lahan tersebut berfungsi sosial budaya**. Fenomena ini mengantarkan para remaja untuk terbawa ke pikiran membeli (*user*), bukan menciptakan (*produser*). Dampak keterdesakan ruang lainnya adalah terjadinya gangguan keamanan, ketertiban dan keharmonisan lingkungan. Budaya agraris yang mengedepankan kebersamaan, tenggang rasa dan kegotong royongan, saling asah, dan saling asuh, tergantikan oleh budaya kota yang mengedepankan persaingan, individualis dan egoisme. Permasalah adat sering terjadi adanya sengketa tapal batas antara satu banjar/desa adat dengan banjar/desa adat yang lainnya. Karena semula perbatasan semula lebih bernilai sosial budaya, berubah fungsinya menjadi nilai ekonomi. Hal inilah penyebab adanya konflik kepentingan sosial budaya karena adanya nilai



ekonomi.

Gambar Permukiman Kumuh di Bantaran Rel Kereta Api

7. Masalah Kelestarian Lingkungan Hidup

Penataan ruang ditujukan untuk melestarikan lingkungan hidup agar dapat digunakan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan, dan mengurangi dampak negatif lingkungan hidup. Azas keberlanjutan, keserasian dan keterpaduan, serta kepentingan umum tidak dapat diterapkan, bila mengedepankan nilai ekonomi dan mengeliminir nilai lingkungan hidup. Berbagai pelanggaran **pembangunan yang secara ekologis tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya** banyak diumpai di daerah pantai, muara sungai dan tebing sungai. Di Bali, fenomena ini banyak terjadi di wilayah Kabupaten Badung dan Gianyar Seperti pembangunan hotel di sempadan sungai Ayung terjal, di sempadan pantai dan muara sungai dan di daerah RTH untuk vila dengan dalih pembangunan pariwisata membutuhkan keunikan. Pelanggaran terhadap RTHK di wilayah perkotaan marak terjadi, dengan dalih kebutuhan lahan untuk pemukiman.

Fungsi pelaksanaan dan pengawasan seolah tidak dilakukan. Oleh karena itu kajian AMDAL berapa kalipun tentunya akan menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Namun kenyataannya pembangunan tetap berjalan.

Di Bali yang sering membaca dan mendengar di media masa adalah pelaksanaan fungsi pembangunan untuk tinggi bangunan. Namun untuk penggunaan lahan penunjang pariwisata di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya jarang terdengar. Walaupun sanksi administrasi dan sanksi hukum sangat jelas, bagi yang memberikan izin dan bagi yang melanggar tata ruang.

Gambar Ayana Resort



8. Masalah Politik

Salah satu tujuan penataan ruang adalah untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Dalam era otonomi daerah, dimana para Legislatif memiliki konstituen di suatu daerah dan atau wilayah tertentu. Demikian pula kandidat pasangan calon kepala Pemerintahan Daerah (Pemda) mempunyai basis pendukung di lokasi tertentu, sering terjadi sebagai faktor kendala dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang wilayah. Alokasi ruang dan pengguna lahannya, pada umumnya menghindari wilayah konstituen tersebut diadikakan kawasan lestari, seperti ruang terbuka hijau kota (RTHK) di wilayah perkotaan dan RTH di wilayah perdesaan dan atau kawasan lindung. Sering diumpai bahwa banyaknya pesanan dari para politikus dan pemuka masyarakat tertentu untuk mempengaruhi penetapan fungsi-fungsi kawasan, agar tanah miliknya diadikakan kawasan ekonomi. Bila berada pada kawasan lindung dan lindung setempat, maka sedapat mungkin mengubahnya menjadi kawasan budidaya non-pertanian.

Pelaksanaan penataan ruang juga pengaruh dari berbagai pihak cukup tinggi. Bangunan yang tidak sesuai dengan alokasi ruang di Bali sering dijumpai di berbagai lokasi. Pelanggaran di RTH, RTHK dan kawasan lindung sering dilakukan oleh orang yang mengerti tentang tata ruang. Bila kita menelusuri siapa pemilik bangunan tersebut, jawabannya adalah orang yang bermodal dan orang-orang yang didukung oleh politisi atau tokoh yang berpengaruh kepada pemerintah.

Para spekulasi tanah dan pemodal yang mengetahui bahwa pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang sangat lemah, maka dengan tidak segan-segan memasang iklan di lokasi untuk mengapling dan menggunakan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya banyak terjadi tanah-tanah yang seolah-olah terlantar, pada kenyataannya adalah perpindahan tangan dari pemilik yang satu dengan kepemilikan lainnya akibat dari adanya calo tanah dan

para spekulasi lainnya. Penertiban tanah terlantar di kawasan Jalan Gatot Subroto dan kawasan lainnya, seperti di Serangan dan lokasilokasi yang pembangunannya mangkrak semenjak tahun 2007 menjadi tanah terlantar. Walaupun adanya PP No 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah-tanah terlantar.

Pelaksanaannya hanya sebatas inventarisasi. Namun, belum adanya tindakan kongkrit penertiban dan pendayagunaan tanah-tanah terlantar. Tanah terlantar di kawasan pantai Kediri telah dimanfaatkan oleh para petani dengan pola perjanjian melalui desa adat. Secara fisik tanah tersebut berada di sempadan pantai < 100 m dari bibir pantai. Para spekulasi dan pemilik tanah yang ditetapkan sebagai RTH dan kawasan lindung cenderung melakukan pelanggaran. **Hal ini disebabkan oleh adanya pola pikir, bahwa kalau sudah banyak pelanggaran di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti kawasan RTH dan kawasan perlindungan setempat, maka pada perencanaan berikutnya akan diubah menjadi kawasan budidaya non-Pertanian.**

9. Masalah Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang tinggi serta urbanisasi yang tidak terkendali, berdampak pada keterdesakan ruang. Dampak negatif diantaranya adalah menimbulkan berbagai permasalahan, dari mulai penyediaan pemukiman dan sarana prasarana, serta lapangan pekerjaan. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan percepatan pembangunan, seolah penataan ruang jauh tertinggal dari kebutuhan masyarakat akan sarana-prasarana dan persediaan lahan untuk berbagai kegiatan usaha. Akibatnya adanya tata ruang seolah sering dilanggar karena masyarakatnya dalam menggunakan dan memanfaatkan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya. **Dampak yang nyata** adalah tumbuhnya pemukiman kumuh, yang semakin hari semakin banyak, gangguan ketertiban dan keamanan, semakin macetnya lalu lintas, banyaknya calo tanah, kurangnya saranaprasarana umum, dan dampak negatif dikalangan remaja.

Permasalahan utama adalah tidak seimbangnya pembangunan sarana-prasarana umum yang dapat dinikmati oleh warga masyarakat dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan tentunya berbeda dengan di wilayah perdesaan. Urbanisasi sebagai dampak positif dapat menambah tenaga kerja untuk pembangunan kota. Para urban yang berpendidikan rendah dan tidak mempunyai keahlian pada umumnya merupakan pekerja kasar. Di Bali, dipandang dari segi sosial, ekonomi, politik dan hankam dapat berdampak positif dan negatif. Dari segi kegiatan, maka para urban ini mempunyai waktu usaha lebih banyak dibanding dengan penduduk Bali yang terikat dengan adatnya.

Mobilitas dan etos kerja yang tinggi sering menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi dari penduduk asli Bali, akibatnya dapat menyebabkan kecemburuan sosial. Adanya pengendalian dan penertiban penduduk yang ketat oleh lembaga adat di suatu wilayah menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti ketidaknyamanan dalam berusaha. Masyarakat Bali yang tidak mengenal adanya bulan suci, dan perputaran uang dalam 24 jam, Bali dibanjiri oleh para usahawan baik dari Jawa, maupun dari daerah lainnya. Lapangan kerja yang terbatas di kawasan NTB dan NTT memicu aliran tenaga kerja yang datang dari kedua wilayah tersebut. Untuk itu di Bali terjadi heterogenitas etnis dan suku, serta para usahawan dari mancanegara ikut mendorong terciptanya keanekaragaman lapangan pekerjaan yang semuanya membutuhkan ruang dan lingkungan yang harmonis.



Gambar . Kepadatan Penduduk menjadi Salah Satu Permasalahan Penataan Ruang

10. Masalah Keamanan

Keamanan akan lebih terkendali bila penduduknya homogen seperti di wilayah perdesaan. Gangguan keamanan tentunya lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan, akibat dari persaingan dan semua kekuatan dan produk diharagakan dengan nilai ekonomi. Penduduk yang heterogen dengan berbagai pandangan dan persepsi yang melekat di wilayah dari daerah asalnya, tentunya akan berbeda dengan masyarakat yang berasal dari komunitas etnis dan suku yang berbeda. Komunikasi yang kurang lancar dapat menimbulkan kesalah persepsi data lanjut ke masalah gangguan keamanan.

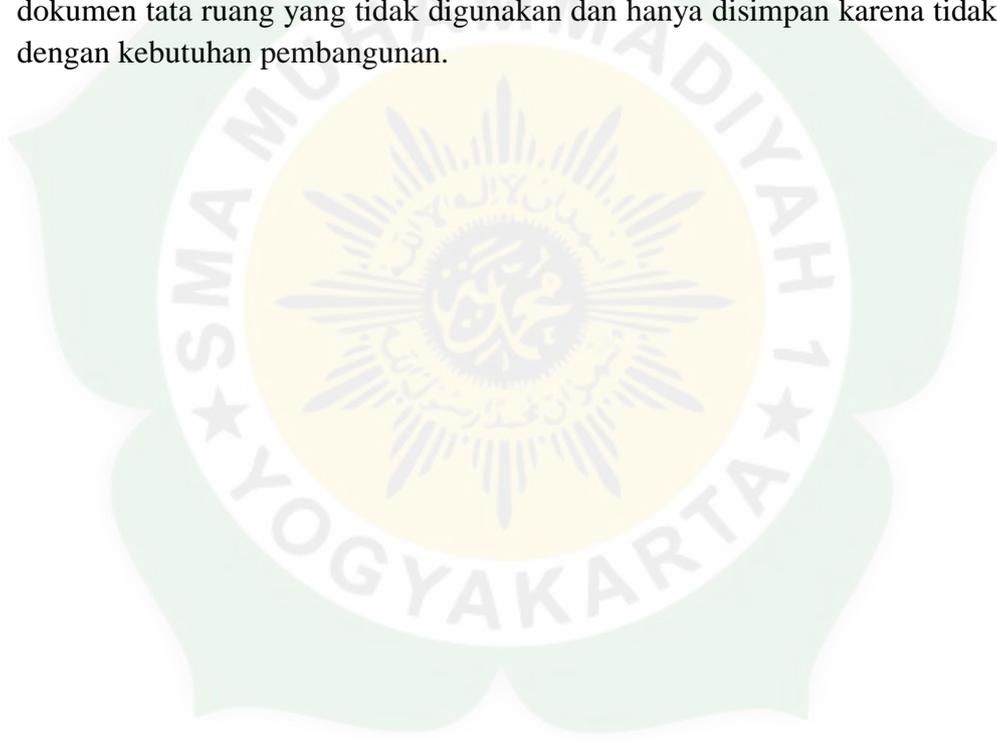
Tujuan penataan ruang salah satunya adalah agar tidak terjadi tumpang tindih peruntukan lahannya yang secara lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif penggunaan dan pemanfaatan lahan yang satu dengan yang lainnya. Dalam alokasi ruang yang harmonis, seimbang dan serasi memisahkan antara peruntukan lahan sebagai kawasan pemukiman dengan kawasan industri dan kawasan perdagangan dan jasa. Fenomena yang terjadi sepanjang jalan merupakan tempat perdagangan dan jasa dengan berbagai jenis usaha. Pemukiman pada umumnya terletak di belakangnya. Oleh karena itu, pola-pola pemukiman di Bali pada umumnya mengikuti pola jalan. Dimana jalan dibuka, disitu

tumbuh pemukiman dan perdagangan pada berbagai skala usaha sesuai dengan kelancarannya.

Kawasan Pariwisata dan pendukungnya seyogyanya tidak bercampur dengan kawasan pemukiman, terlebih pemukiman tradisional. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif dari pariwisata. Walaupun dampak positif dari segi ekonomi, namun dampak negatif sosial budaya akan terjadi bila penunjang pariwisata tumbuh dengan subur di kawasan pemukiman. Tumbuhnya kafe-kafe liar yang berada di kawasan pemukiman, akan mengganggu keamanan dan kenyamanan dari warga.

11. Belum Optimalnya Peran Institusi

Masalah institusi adalah masalah kemampuan teknis dan manajemen tata ruang yang masih terbatas. Masalah pertama kurang efektif dan efisien dalam menggunakan sumber- sumber dana. Masalah kedua perencanaan program tidak tepat dan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ketiga masalah dokumen tata ruang yang tidak digunakan dan hanya disimpan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan.



4.3 TES FORMATIF (PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN)

1. Sebutkan tujuan dari Rencana Tata Ruang Wilayah!
2. Jelaskan masalah lingkungan hidup terkait dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Rangkuman

1. Wilayah adalah suatu unit dari geografi yang dibatasi oleh parameter tertentu dan bagian-bagiannya tergantung secara internal.
2. Jenis-jenis wilayah dapat dibedakan berdasarkan 2 kriteria, yaitu berdasarkan kondisi geografi dan ciri-ciri umum.
3. Wilayah berdasarkan kondisi geografi dibagi menjadi tiga wilayah yaitu berdasarkan perbedaan waktu, bentuk dasar relief, dan wilayah pembangunan.
4. Wilayah berdasarkan ciri-ciri umum dibagi menjadi empat, yaitu wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan, dan wilayah administrasi.
5. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan bagi daerah sekitarnya.
6. Teori pusat pertumbuhan di antaranya teori tempat sentral, teori Losch, dan teori kutub pertumbuhan.
7. Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup manusia.
8. Pengembangan wilayah harus mempertimbangkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan fungsi budi daya dan fungsi lindung, waktu, dan sumber daya yang tercantum dalam rencana tata ruang wilayah.
9. Perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Hal ini dikarenakan adanya kemajemukan masyarakat dan suku bangsa, adanya kesenjangan antara masyarakat desa dan kota, masalah kependudukan, masih adanya masyarakat terpencil dan terasing, adanya daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, dan luasnya wilayah di Indonesia.

Apakah ananda sudah benar-benar paham isi modul geografi ini dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4? Untuk meyakinkan cobalah ananda isi table refleksi diri dibawah ini:

Refleksi Diri				
<i>Centang pilihan jawaban yang ananda anggap sesuai !</i>				
No	Pertanyaan	SS	S	TS
1	Saya bisa menganalisis konsep wilayah dan tata ruang			
2	Saya bisa menganalisis pembangunan dan pertumbuhan wilayah			
3	Saya bisa mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah			
4	Saya bisa menganalisis konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota			
5	Saya bisa membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten/kota/provinsi berdasarkan data wilayah setempat			
6	Saya bisa menyajikan laporan hasil diskusi tentang konsep wilayah dan tata ruang dilengkapi peta			
Keterangan : SS (sangat setuju), S (setuju), dan TS (tidak setuju)				

Ananda telah menjawab table refleksi diri di atas. Semoga Ananda sudah memahami keseluruhan isi modul ini. Setelah itu Ananda boleh mencoba tes mandiri . Untuk mengukur kemampuan Ananda, cobalah cocokkan jawaban Ananda dengan guru. Selamat mengerjakan

EVALUASI

A. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR

1. Suatu wilayah merupakan ekosistem yang terdiri atas
 - A. Sosial, ekonomi, dan lingkungan
 - B. Biotik, dan abiotik
 - C. Ruang, dan waktu
 - D. Administrasi dan fungsional
 - E. Fisik dan non fisik
2. Wilayah yang memiliki karakter seragam disebut sebagai wilayah
 - A. Homogen
 - B. Heterogen
 - C. Admistrasi
 - D. Nodal
 - E. Fungsional
3. Karakteristik wilayah nodal yaitu
 - A. Cenderung seragam
 - B. Memiliki ketergantungan dengan hinterland
 - C. Dibatasi oleh alam
 - D. Sangat variatif
 - E. Berkaitan dengan keruangan
4. Suatu wilayah yang terdapat pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan disebut sebagai
 - A. Pusat pertumbuhan wilayah
 - B. Wilayah terbelakang
 - C. Wilayah hinterland
 - D. Wilayah penyangga
 - E. Wilayah urban
5. Perwilayahan dilakukan dengan mengelompokkan unsur – unsur yang sama, tujuan perwilayahan adalah
 - A. Menjaga kelestarian lingkungan
 - B. Mendukung progam pembangunan berkelanjutan
 - C. Pemekeran wilayah
 - D. Memudahkan pengelolaan wilayah
 - E. Menyangga wilayah lain
6. Pegunungan karst dan hutan mangrove termasuk dalam klasifikasi perwilayahan
 - A. Uniform region
 - B. Specific region
 - C. Generic region
 - D. Wilayah fungsional
 - E. Nodal region
7. Wilayah dataran rendah dan dataran tinggi, termasuk *uniform region* karena
 - A. Jenis tanah yang sama
 - B. Keseragaman penduduk
 - C. Persamaan ketampakan topografi
 - D. Terdapat variasi kenampakan
 - E. Variasi vegetasi
8. Wilayah yang memiliki sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan gas lebih cepat berkembang dibanding lainnya karena ...
 - A. Mudah diolah
 - B. Modal dasar dalam mengembangkan wilayahnya.
 - C. Banyak yang membutuhkan
 - D. Tingginya produksi dan permintaan
 - E. Termasuk SDA tidak dapat diperbaharui.
9. indonesia diantaranya
 - A. Sentralisasi industri
 - B. Pembangunan di bidang industri
 - C. Pemerataan pembangunan
 - D. Distribusi penduduk lebih merata

10. Teori tempat pusat dikembangkan oleh Christaller berdasarkan
- Pemenuhan kebutuhan maksimal
 - Ambang batas dan jarak
 - Produksi dan konsumsi
 - Kebutuhan minimum
 - Kebutuhan produksi
11. Syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan teori Christaller adalah
- Topografi dan tingkat ekonomi
 - Kondisi budaya dan politik
 - Iklim dan tanah
 - Sumber daya alam dan sumber daya manusia
 - Heterogenitas topografi
12. Kemampuan penduduk dalam menjangkau dan memperoleh kebutuhannya disebut
- Threshold*
 - Batas kemampuan
 - Range*
 - Kemampuan individu
 - Juvenil*
13. Pembangunan suatu wilayah dikatakan ideal apabila
- Seimbang dan merata
 - Kondisi sosial ekonomi stabil
 - Penduduk berkualitas
 - Tingkat kesehatan tinggi
 - Tidak ada konflik antar kelompok
14. Perlunya melibatkan masyarakat dalam pembangunan karena
- Masyarakat yang melestarikan alam
 - Objek dan subjek pembangunan
 - Penentuan kebijakan pembangunan
 - Menjaga kestabilan ekonomi
 - Menjaga kestabilan sosial
15. Untuk menentukan apakah suatu wilayah memiliki potensi atau tidak dilakukan
- Evaluasi sumber daya alam
 - Efisiensi sumber daya alam
 - Peningkatan kualitas penduduk
 - Evaluasi kebijakan
 - AMDAL
16. Suatu wilayah mengalami ketertinggalan dalam pembangunan disebabkan oleh
- Masyarakat sulit menerima perubahan
 - Sumber daya alam yang terbuang sia-sia
 - Kondisi geografis yang sulit dijangkau
 - Masyarakat tidak memanfaatkan potensi
 - SDM yang rendah
17. Aspek pembangunan berkelanjutan terdiri atas
- Sosial, ekonomi, dan ekologi
 - Kebijakan dan pelaksanaan
 - Manusia dan lingkungan
 - Perencanaan dan pembangunan
 - Politik dan hukum
18. Supaya pembangunan dapat berkelanjutan, maka harus dilakukan dengan cara
- Peningkatan kualitas penduduk
 - Pemenuhan kebutuhan masa depan
 - Memperhatikan pemerataan dan kebutuhan masa depan
 - Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien

19. Tujuan dilakukannya rencana tata ruang wilayah adalah

- A. Pemerataan pembangunan
- B. Memanfaatkan ruang wilayah sesuai kemampuan dan daya dukung
- C. Menciptakan pembangunan berkeadilan
- D. Menata ruang wilayah
- E. Pembangunan berkelanjutan

20. Ruang wilayah yang tidak dimanfaatkan sesuai kemampuannya berakibat

- A. Pembangunan lebih mudah dilakukan
- B. Mudah dalam mengambil kebijakan
- C. Pembangunan tidak

sesuai perencanaan
D. Terciptanya *slum area*

B. JAWABLAH DENGAN SINGKAT DAN JELAS

1. Jelaskan yang dimaksud dengan wilayah homogen dan wilayah nodal?
2. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan ?
3. Identifikasilah ciri-ciri pertumbuhan wilayah!
4. Sebutkan dan jelaskan pengendalian pemanfaatan ruang!
5. Jelaskan mengapa permukiman kumuh menjadi permasalahan sosial dalam penerapan tata ruang wilayah!



BAB II

POLA KERUANGAN DESA DAN KOTA

1. KEGIATAN BELAJAR I

Pengertian dan perkembangan desa kota

1.1. KD DAN IPK

3..2 Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan	3.2.1 Mengemukakan pengertian dan ciri-ciri desa 3.2.2 Membedakan tingkat Perkembangan desa. 3.2.3 Menganalisis pola persebaran dan tata ruang desa.
--	--

1.2. MATERI

A. POLA KERUANGAN DESA

1. Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa *Sanskerta* yaitu *deshi* yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan administratif yang terletak di luar kota. Desa menjadi tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama agar apat mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Pada umumnya penduduk desa bermatapencaharian sebagai petani. Pengertian desa menurut ahli dan menurut undang-undang antara lain sebagai berikut:

a. UU no 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. R Bintarto

Desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya.

c. Paul H. Landis

Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal.
- 2) Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan.
- 3) Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, topografi, dan sumber daya alam.

d. S.D. Misra

Desa tidak hanya kumpulan tempat tinggal, tetapi juga kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya 50-1.000 Hektare.

1. Unsur-unsur Desa

Desa memiliki tiga unsur pokok yaitu sebagai berikut:

a. Wilayah

Wilayah merupakan tempat bagi manusia untuk dapat melakukan berbagai aktivitas baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Pemilihan wilayah sebagai tempat aktivitas tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor iklim, topografi, keadaan tanah, dan air. Adanya perbedaan kondisi fisik antarwilayah menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah. Contohnya daerah yang relatif datar dan terletak di dekat daerah perkotaan akan berkembang lebih cepat daripada daerah pegunungan yang jauh dari perkotaan.

b. Penduduk

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam suatu wilayah. Di dalam upaya mengembangkan wilayah, penduduk akan bertindak sebagai tenaga kerja, perencana, pelaksana, sekaligus yang akan memanfaatkan segala potensi yang ada. Hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan dalam suatu wilayah antara lain jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, persebaran penduduk, dan mata pencaharian. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pola penggunaan lahan yang ada di perdesaan.

c. Perilaku

Perilaku kehidupan masyarakat perdesaan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan yang melatarbelakangi masyarakat desa. Perilaku masyarakat desa ditunjukkan oleh adanya ikatan antarwarga yang sangat erat. Hal itu dapat dilihat dengan adanya sikap gotong royong yang mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

2. Ciri-ciri Desa

Secara umum desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam.

- b) Pertanian sangat bergantung pada musim.
- c) Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja.
- d) Struktur perekonomian bersifat agraris.
- e) Hubungan antarmasyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat (*gemmeinschaft*).
- f) Perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal.
- g) Norma agama dan hukum adat masih kuat.

Menurut Rouceck dan Warren ciri-ciri masyarakat perdesaan adalah sebagai berikut:

- a) Kelompok penduduk yang bermatapencaharian utama di daerah tertentu dan mempunyai peran yang cukup besar.
- b) Komunikasi keluarga terjalin secara langsung, mendalam, dan informal.
- c) Suatu kelompok dibentuk berdasarkan faktor geografis.
- d) Hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan.
- e) Mobilitas penduduk rendah, baik mobilitas yang bersifat horizontal (perpindahan tempat) maupun mobilitas vertikal (status sosial).
- f) Keluarga di pedesaan yang masih tradisional memiliki banyak fungsi, khususnya sebagai unit ekonomi.

Menurut Dirjen Pembangunan Desa, wilayah perdesaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Perbandingan tanah dengan manusia (*man land ratio*) yang besar.
- b) Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani (agraris).
- c) Penduduknya masih bersifat tradisional.

3. Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan desa merupakan keadaan tertentu yang dicapai oleh penduduknya dalam menyelenggarakan kehidupan dan mengelola sumber daya yang ada. Tingkat perkembangan desa dinilai berdasarkan tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosio kultural, dan faktor prasarana. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, tingkat perkembangan desa dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Desa Tradisional

Desa tradisional atau pra desa yaitu tipe desa pada masyarakat terasing yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam sekitarnya. Ketergantungan itu misalnya dalam hal bercocok tanam, cara membuat rumah, pengolahan makanan dan lain-lainnya. Pada desa semacam ini

penduduk cenderung tertutup, atau kurang komunikasi dengan pihak luar. Sistem perhubungan dan komunikasi tidak berkembang.

b. Desa Swadaya

Desa swadaya merupakan kondisi suatu desa yang sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah atau orang lain. Adapun ciri-cirinya adalah:

- Administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik.
- Lembaga desa masih sederhana.
- Aktivitas / kehidupan masyarakat masih terikat oleh adat istiadat.
- Tingkat pendidikan masyarakat rendah.
- Kegiatan penduduk dipengaruhi oleh keadaan alam.
- Mata pencaharian penduduk pada umumnya bertani.
- Teknologi yang digunakan masih sederhana sehingga tingkat produktivitasnya rendah.
- Kegiatan ekonomi masyarakat ditujukan pemenuhan kebutuhan sendiri.
- Umumnya masyarakat cenderung tertutup sehingga sistem perhubungan dan pengangkutan kurang berkembang.

c. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah desa yang tingkat perkembangannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Desa ini adalah desa yang sedang mengalami masa transisi, ciri-cirinya sebagai berikut:

- Adat istiadat masyarakat sedang mengalami transisi.
- Adanya pengaruh dari luar yang mulai masuk ke masyarakat desa dan mengakibatkan perubahan cara berfikir.
- Mata pencaharian penduduk mulai beraneka ragam, tidak hanya pada sektor agraris.
- Produktivitas mulai meningkat.
- Sarana dan prasarana desa semakin lengkap dan membaik.
- Mulai tumbuh kesadaran serta tanggung jawab masyarakat untuk membangun desa.
- Roda pemerintahan desa mulai berkembang baik dalam tugas maupun fungsinya.
- Bantuan pemerintah hanya bersifat sebagai stimulus.

d. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang telah maju, ciri-cirinya sebagai berikut:

- Adat istiadat sudah tidak mengikat aktivitas masyarakat.
- Lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang ada sudah dapat menjaga kelangsungan hidup masyarakat.
- Sarana dan prasarana desa sudah meningkat.
- Teknologi semakin maju sehingga produktivitas meningkat.
- Mata pencaharian masyarakat sudah beraneka ragam.
- Tingkat pendidikan dan ketrampilan penduduk telah tinggi sehingga cara berfikirnya telah maju (rasional).
- Kondisi transportasi sudah baik sehingga berpengaruh terhadap kelancaran hubungan dengan daerah lain.
- Pada desa swasembada, sistem perhubungan dan pengangkutan tersedia dengan baik. Masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitasnya karena berbagai sarana dan prasarana sudah tersedia.

4. Potensi Desa dan Fungsi Desa

a. Potensi Desa

Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa. Potensi desa merupakan modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Secara umum potensi desa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Potensi fisik

Potensi fisik adalah segenap sumber daya alam yang terdapat di desa dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran, kelangsungan, dan perkembangan desa. Potensi fisik tersebut meliputi tanah, air, iklim dan angin, ternak, serta manusia

a) Tanah

Bagi masyarakat desa, tanah merupakan tumpuan kehidupan sehingga menjadi potensi fisik yang sangat penting. Misalnya, tanah pertanian yang dapat menghasilkan tanaman bahan makanan dan bahan perdagangan. Oleh karena itu, di pedesaan yang masih bersifat agraris, petani sangat bergantung pada kesuburan tanah.

b) Potensi air

Potensi air sangat beragam dan bergantung pada masing-masing wilayah. Air dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan rumah tangga, irigasi, dan perikanan. Bagi desa-desa di daerah pantai, air laut dapat diolah menjadi garam.

c) Iklim dan angin

Potensi iklim dan angin sangat penting terutama bagi desa-desa agraris. Iklim berpengaruh terhadap perencanaan waktu tanam dan jenis tanamannya. Angin dapat dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak kincir untuk keperluan pengairan.

d) Manusia

Desa memiliki potensi sumber tenaga yang dapat dimanfaatkan bagi petani. Contohnya sapi, kerbau, dan kuda yang dapat dipekerjakan dalam mengolah sawah dan sebagai tenaga pengangkut.

2) Potensi non fisik

Potensi nonfisik adalah segenap potensi sumber daya sosial dan budaya yang terdapat di desa. Potensi non fisik meliputi sikap gotong royong lembaga dan organisasi sosial serta aparatur pemerintahan.

a) Gotong royong

Kehidupan yang bersifat gotong royong merupakan potensi yang sangat kuat dalam rangka pembangunan desa.

b) Lembaga dan organisasi sosial

Lembaga dan organisasi sosial serta lembaga pendidikan yang ada di desa merupakan potensi positif bagi pembangunan desa.

c) Aparatur pemerintahan

Perangkat pemerintahan desa merupakan potensi yang sangat menentukan kelancaran sistem pemerintahan.

b. Fungsi Desa

Sebuah desa memiliki fungsi tertentu bagi kota, antara lain sebagai berikut:

- 1) Desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota.
- 2) Desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota.
- 3) Desa sebagai mitra pembangunan wilayah kota.
- 4) Desa merupakan *hinterland* (daerah penyokong atau penyuplai kebutuhan masyarakat kota).

5. Pola Desa

a. Pola memanjang

Pola desa yang memanjang antara lain karena mengikuti jalan, sungai, rel kereta api, atau sungai.

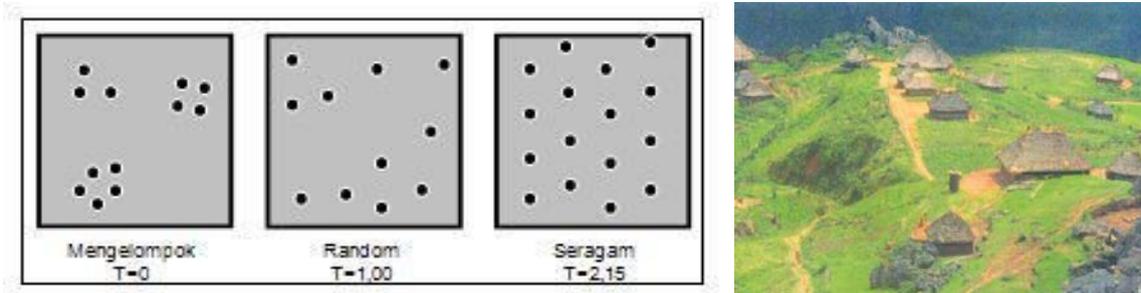
b. Pola mengelompok

Pola desa mengelompok biasanya terdapat pada daerah yang memiliki tanah yang subur. Penduduk akan membentuk permukiman secara mengelompok pada daerah pertanian yang tanahnya subur. Pola ini juga dipengaruhi oleh keadaan air tanahnya. Penduduk akan mengelompok pada sumber air tanah yang dangkal.

c. Pola menyebar

Pola desa menyebar terdapat di daerah dataran tinggi atau daerah gunung api. Penduduk akan mendirikan permukiman secara tersebar karena mencari daerah-daerah yang relatif aman, tidak terjal, dan

morfologi yang relatif rata. Pla menyebar juga terdapat di wilayah karst (kapur). Penduduk akan menyebar mencari daerah yang memiliki kondisi air yang baik karena biasanya di daerah karst kondisi airnya sangat buruk.



Gambar 2. Pola desa menyebar

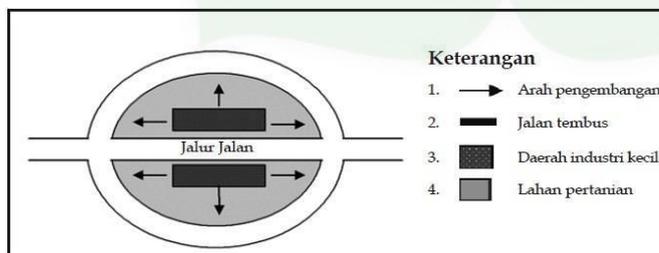
6. Tata ruang Desa

Tata ruang adalah pola pemanfaatan ruang atau lahan, baik direncanakan maupun tidak untuk dijadikan tempat tinggal dengan memanfaatkan lingkungan demi kelangsungan hidup penduduk. Pola tata ruang suatu wilayah berbeda dengan wilayah lain. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi lingkungan di setiap wilayah.

Pola tata ruang suatu wilayah dapat mencerminkan tingkat adaptasi penduduk terhadap kondisi lingkungannya. Pola tata ruang itu sangat terkait dengan aktivitas penduduk, khususnya dalam bidang ekonomi.

Pola tata ruang desa dapat dibedakan menjadi empat bentuk yaitu:

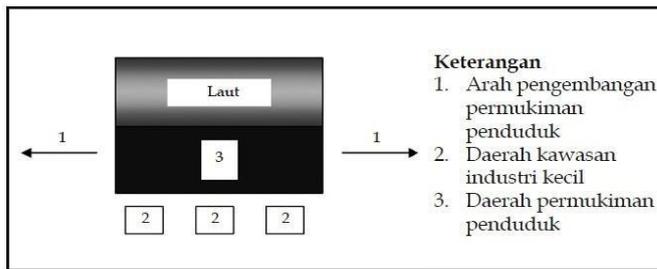
Bentuk desa yang linier atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Pola persebaran desa semacam ini dapat kita temui di daerah yang merupakan areal datar, terutama di dataran rendah. Maksud dari pola desa yang memanjang atau linier tersebut adalah untuk mendekati prasarana transportasi (jalan atau sungai), sehingga memudahkan untuk berpergian ketempat lain apabila ada keperluan. Selain itu juga untuk memudahkan pergerakan barang dan jasa.



Sumber: Geografi Kota dan Desa, 1987

Gambar 3. Bentuk desa linier mengikuti jalan raya

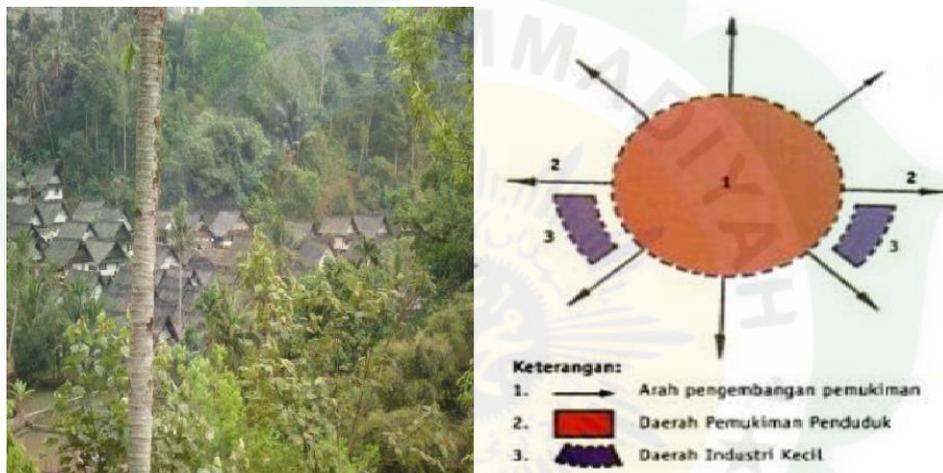
- a. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai Di daerah-daerah pantai, pola persebaran desa biasanya memanjang mengikuti arah garis pantai.



Sumber: *Geografi Kota dan Desa*, 1987

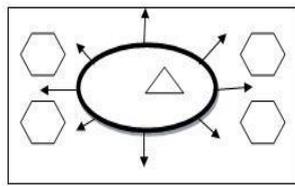
Gambar 4. Bentuk desa linier mengikuti garis pantai

- b. Bentuk desa yang terpusat. Bentuk desa yang memusat terdapat di wilayah pegunungan yang dihuni oleh penduduk yang berasal dari satu keturunan yang sama, sehingga umumnya semua warga masyarakat di daerah itu adalah keluarga atau kerabat. Dusun-dusun yang terdapat di desa yang bentuknya terpusat biasanya sedikit saja, yaitu tidak lebih dari 40 rumah.



Gambar 5. Bentuk desa terpusat

- c. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk desa semacam ini terdapat di dataran rendah dan memiliki fasilitas-fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat, misalnya mata air, danau, waduk, atau fasilitas lainnya.



Gambar 2.4 Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu
Sumber : Dakjoeni, 1987

Keterangan:

- a. → Arah pengembangan permukiman penduduk
- b. ○ Kawasan permukiman masyarakat
- c. ⬡ Kawasan industri kecil
- d. △ Fasilitas umum yang telah ada



- ⊠ Pemukiman penduduk
- Pusat kegiatan
- Jalan utama
- Rumah-rumah penduduk



Gambar farm village type di daerah Sulawesi

Gambar 6 : Bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu

4.4 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN)

Latihan Kegiatan 1 : Mari Mengumpulkan Data

Kerjakan tugas berikut dengan santai, serius, selesai dan sukses (ingat 4-S)!

1. Jelaskan pengertian desa menurut R. Bintarto!
2. Sebutkan tiga unsur desa !
3. Sebutkan 3 ciri-ciri desa!
4. Jelaskan Perbedaan desa Swadaya dan desa Swakarya !
5. Perhatikan gambar di bawah ini!



- Keterangan:
- 1. → Arah pengembangan permukiman
 - 2. ■ Daerah Pemukiman Penduduk
 - 3. ■ Daerah Industri Kecil

Struktur keruangan desa yang berbentuk seperti pada gambar biasanya terdapat di wilayah pegunungan. Jelaskan mengapa Demikian?

Setelah menjawab tugas/tes mandiri kegiatan 1, maka Ananda boleh mencocokkan dengan guru. Jika Ananda sudah menjawab dengan benar danmemahaminya, selamat! Berarti Ananda sudah berjuang, silahkan melanjutkan pada kegiatanbelajar 2.

2. KEGIATAN BELAJAR II

Struktur keruangan desa kota

2.1. KD DAN IPK

Kompetensi Dasar	Indikator
3..2 Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan	3.2.4 Mengemukakan pengertian kota dan ciri-ciri kota 3.2.5 Menjelaskan tahapan perkembangan kota. 3.2.6 Menganalisis Struktur ruang kota

2.2. MATERI

A. POLA KERUANGAN KOTA

1. Definisi Kota

Para ahli memberi pengertian tentang kota sesuai dengan sudut pandang keilmuannya masing-masing. Pengertian kota menurut beberapa ahli sebagai berikut

1. Bintarto (1983:36) menyebutkan bahwa kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Hal menonjol yang membedakan desa dengan kota adalah desa merupakan masyarakat agraris, sedang kota nonagraris;
2. Wirth, kota adalah suatu permukiman yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kehidupan sosialnya;
3. Max Weber, kota adalah suatu daerah tempat tinggal yang penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal.

2. Klasifikasi Kota

Kota dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduk dan Fungsi Kota Berdasarkan jumlah penduduknya, di Indonesia kota dapat dibedakan atas :

- a) Kota kecil : 20.000 - < 100.0000 orang
- b) Kota sedang : 100.000 - < 500.000 orang
- c) Kota besar : 500.000 - < 1000.000 orang
- d) Kota metropolis : 1000.000- 5.000.000 orang
- e) Kota megapolitan : lebih dari 5.000.000 orang

Berdasarkan fungsi, di Indonesia kota dapat dibedakan Atas

- 1) Kota pusat perdagangan, baik perdagangan domestik maupun

- internasional, contoh kota Singapura, Hongkong, Jakarta
- 2) Kota pusat kebudayaan, misal kota Yogyakarta, Surakarta
 - 3) Kota pusat perkebunan, misalnya Bogor, Tangjung Balai, Pematang Siantar
 - 4) Kota pusat pemerintahan, contoh Jakarta, Kuala Lumpur, Manila
 - 5) Kota pusat pertambangan, contoh Timika, Tembaga-pura, Soroako

3. Karakteristik Kota

Menurut Bintarto, ciri-ciri kota dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1. Ciri-Ciri Fisik, Di wilayah kota terdapat:
 - a) Sarana perekonomian seperti pasar atau supermarket.
 - b) Tempat parkir yang memadai.
 - c) Tempat rekreasi dan olahraga.
 - d) Alun-alun.
 - e) Gedung-gedung pemerintahan.
2. Ciri-Ciri Sosial
 - a) Masyarakatnya heterogen.
 - b) Bersifat individualistis dan materialistis.
 - c) Mata pencaharian nonagraris.
 - d) Corak kehidupannya bersifat gessellschaft (hubungan kekerabatan mulai pudar).
 - e) Terjadi kesenjangan sosial antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin.
 - f) Norma-norma agama tidak begitu ketat.
 - g) Pandangan hidup lebih rasional.
 - h) Menerapkan strategi keruangan, yaitu pemisahan kompleks atau kelompok sosial masyarakat secara tegas.

4. Tahap Perkembangan Kota

Setiap kota mengalami perkembangan dari tahun ke tahun J.M. Houston berpendapat bahwa karakteristik perkembangan kota melalui tiga tahap berikut:

- a. *Stadium Pembentukan Inti Kota*,
Stadium ini dikenal dengan istilah CBD (*Central Business District*). Pada tahap ini, pembangunan gedung-gedung sebagai penggerak kegiatan mulai berkembang. Namun kenampakan fisik kota masih meliputi wilayah yang sempit.
- b. *Stadium Formatif*
Pada tahap ini, inti kota mulai berkembang akibat perkembangan industri. Perkembangan sektor industri, transportasi, dan perdagangan menyebabkan makin luasnya keadaan pabrik-pabrik di perkotaan.

Perluasan daerah umumnya terjadi di daerah yang transportasinya lancar, seperti di pinggir jalan raya.

c. *Stadium Modern*

Di stadium ini mulai terlihat terjadinya kemajuan bidang teknologi. Makin majunya transportasi dan komunikasi menyebabkan seseorang tak bergantung lagi pada tempat tinggal yang dekat tempat kerja. Oleh karena itu, ada gejala perkembangan kota yang mengarah keluar. Kenampakan kota tak sederhana stadium pertama dan kedua, tetapi jauh lebih kompleks. Pada tahap ini, terjadi penggabungan beberapa pusat kegiatan sehingga menentukan batas wilayah perkotaan sudah makin sulit.

Sedangkan tahap perkembangan kota menurut Lewis Mumford, dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Eopolis

Adalah tahap perkembangan desa yang teratur sehingga organisasi masyarakat penghuni daerah tersebut sudah mulai memperlihatkan ciri- ciri perkotaan. Tahap ini merupakan peralihan dari pola kehidupan desa yang tradisional ke arah kehidupan kota.

b. Tahap Polis

Adalah tahapan suatu daerah kota yang masih bercirikan sifat-sifat agraris atau berorientasi pada sektor pertanian. Sebagian besar kota di Indonesia masih berada pada tahap ini.

c. Tahap Metropolis

Adalah kelanjutan dari tahap polis. Tahap ini ditandai oleh orientasi kehidupan ekonomi sebagian besar penduduknya yang mengarah ke sektor industri. Kota-kota di Indonesia yang tergolong metropolis adalah Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

d. Tahap Megalopolis

Tahap megalopolis (kota mahabesar) adalah suatu wilayah perkotaan yang ukurannya sangat besar, biasanya terdiri dari beberapa kota metropolis yang menjadi satu sehingga membentuk jalur perkotaan. Dalam beberapa segi, kota metropolis telah mencapai titik tertinggi dan memperlihatkan tanda-tanda akan mengalami penurunan kualitas.

e. Tahap Tiranopolis

Adalah tahapan kota yang kehidupannya sudah dikuasai oleh tirani, kemacetan kemacetan, kekacauan pelayanan, kejahatan, dan kriminalitas yang sudah biasa terjadi.

f. *Tahap Nekropolis*

Adalah tahap perkembangan kota yang perkembangan kotanya menuju ke arah kematian.

5. Struktur Ruang Kota

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan serta meliharkan kelangsungan hidupnya. Menurut Undang Undang Nomer 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Bab I pasal 1, struktur ruang adalah

susunan pusat – pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Struktur ruang wilayah kota merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal kota dan jaringan infrastruktur kota sampai akhir masa perencanaan, yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani fungsi kegiatan yang ada/direncanakan dalam wilayah kota pada skala kota, yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional, provinsi, nasional bahkan internasional.

Unsur pembentuk struktur tata ruang kota terdiri dari pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan jaringan jalan. Kota atau kawasan perkotaan pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem spasial, yang secara internal mempunyai unsur-unsur yang menjadi pembentuknya serta keterkaitannya satu sama lain. Kota sebagai suatu sistem/tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang mencirikan kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota adalah unsur-unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hierarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang kota. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota di antaranya meliputi hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan, seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan; yang ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal.

Kota berawal dari sebuah pemusatan penduduk di suatu area. Dengan akal dan pikiran manusia untuk bertahan hidup, terjadi perkembangan di area tersebut yang sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah kota. Terdapat berbagai penggunaan tanah yang menunjang aktifitas penduduk. Susunan berbagai penggunaan tanah sebagai komponen – komponen kota kemudian dilihat sebagai sebuah susunan pembentuk kota yang dikenal dengan struktur kota.

Studi – studi mengenai geografi perkotaan, terutama struktur kota telah diuraikan oleh beberapa ahli, antara lain :

1) Teori Konsentris (*Concentric Theory*)

Penelitian mengenai teori struktur kota dan perkotaan pertama yang dipublikasikan ialah penelitian yang dilakukan oleh Park dan Burgess. Dalam periode tahun 1920-an, Robert E Park bersama dengan Ernest W Burgess melakukan penelitian dengan kota Chicago Amerika Serikat sebagai fokus utamanya. Mengadopsi teori evolusi Darwin, dimana kompetisi menjadi hal utama, Park dan Burgess menyatakan bahwa perebutan sumberdaya urban, terutama tanah, akan menuju pada kompetisi di antara kelompok sosial dan yang lebih besar berpengaruh pada pembagian ruang kota ke dalam “ area alami “, dimana manusia dengan karakteristik sosial yang sama akan menempati ruang yang sama pula. Pertarungan untuk mendapatkan tanah dan sumberdaya lain akan berujung pada deferensiasi spasial dari ruang kota menjadi zona – zona yang memiliki kesamaan karakteristik, dengan area ideal memiliki harga tanah yang lebih tinggi. Ketika kotanya semakin makmur, penduduk dan kegiatan perekonomian semakin bergeser keluar dari pusat kota.

Selanjutnya Burgess memberikan teori konsentris dengan membagi kota ke dalam zona – zona seperti :

a. **Central Business District (CBD) atau Daerah Pusat Kegiatan**

Merupakan daerah yang merupakan pusat dari segala kegiatan kota berfungsi sebagai fokus kegiatan perdagangan, perekonomian, kemasyarakatan, sosial budaya dan teknologi. Zona ini terdiri dari bangunan yang menunjang perdagangan, toko, swalayan, bank, hotel, perkantoran.

b. **Transtition Zone atau Daerah peralihan**

Merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan terus menerus dan bertambah besar penurunannya. Daerah ini berupa kawasan perindustrian, diselingi oleh rumah pribadi yang kuno. Banyak di antaranya telah diubah dari perkantoran dan pertokoan atau dibagi – bagi menjadi kawasan perumahan berukuran relatif sempit. Zona ini setelah kemudian bangunannya bobrok dimanfaatkan oleh para imigran baru sebagai natural area, yaitu pemukiman kaum miskin sehingga timbullah daerah pemukiman kumuh (slum area), yang semakin lama menjadi daerah miskin (areas of proverty), disitulah biasanya berpusat pula kenakalan remaja, kejahatan, dan lain sebagainya.

c. **Low Class Residential Homes atau Zone Pemukiman Buruh Rendahan**

Merupakan zona yang berfungsi sebagai pemukiman bagi pekerja – pekerja, antara lain oleh pekerja pabrik, dan industri yang diantaranya adalah pedatang – pendatang baru dari zona peralihan, sekalipun penduduknya masih masuk dalam kategori “ low-medium status. Zona ini dijadikan pilihan sebagai tempat tinggal karena lokasinya yang berdekatan dengan lokasi tempat kerja.

d. **Zone of better resident atau Zona Pemukiman Buruh Menengah**

Merupakan zone yang dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi

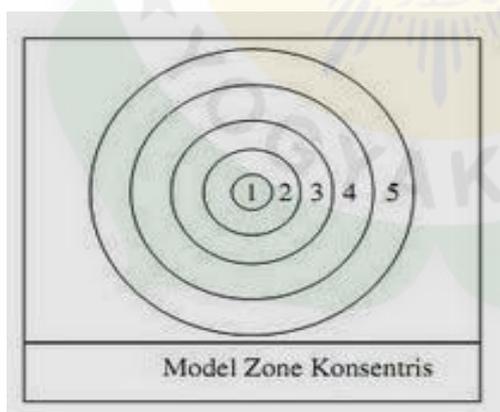
menengah hingga tinggi. Kondisi ekonomi mereka pada umumnya stabil sehingga lingkungan pemukimannya menunjukkan derajat keteraturan yang cukup tinggi. Fasilitas pemukiman terencana dengan baik, sehingga kenyamanan tempat tinggal dapat dirasakan pada zona ini.

e. Commuters zone atau zona penglaju

Timbulnya penglaju merupakan suatu akibat adanya proses desentralisasi pemukiman sebagai dampak sekunder dari aplikasi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi. Di daerah pinggiran kota mulai bermunculan perkembangan pemukiman baru yang berkualitas tinggi sampai kualitas mewah. Kecenderungan penduduk untuk memilih zona ini didorong oleh kondisi lingkungan daerah asal yang dianggap tidak nyaman dan tertarik oleh kondisi lingkungan zona ini yang menjanjikan kenyamanan hidup yang jauh lebih baik, bebaspolusi, tinggal dengan aman dan nyaman, namun dengan konsekuensi lebih jauh dari tempat bekerja. Pada zone ini, alamnya masih terbuka luas, perumahan – perumahan banyak diselingi suasana pedesaan dan kawasan orang kaya itu berfungsi sebagai kota kecil untuk beristirahat atau tidur malam (dormitory towns).

Perlu diingat bahwa teori konsentris merupakan model yang ideal yang hanya dapat diterapkan di negara Barat yang maju, ditambahkan oleh Burgess lokasinya di kawasan dimana tidak ada faktor *opposing* (pelawan) seperti topografi yang menghambat transportasi dan rute yang merugikan komunikasi. Dalam kenyataannya zona – zona konsentris itu tidak dapat ditemukan dalam bentuk yang murni.

Keterangan :



Gambar 8. Model konsentris

1. *Central Business District* (CBD) atau Daerah Pusat Kegiatan
2. *Transition Zone* atau Daerah peralihan
3. *Low Class Residential Homes* atau Zone Pemukiman Buruh Rendahan
4. *Zone of better resident* atau Zona Pemukiman Buruh Menengah *Commuters zone* atau zona penglaju

2) Teori Sektoral (*Sectoral Theory*)

Homer Hoyt pada tahun 1939 memperkenalkan teori sektoral untuk mengatasi ketidaksesuaian terhadap teori konsentris yang sebelumnya telah dikemukakan oleh E.W Burgess. Pemikiran teori ini merupakan perkembangan dari teori konsentris, yang ditandai dengan beberapa kesamaan, seperti terdapat central bussiness district (CBD) yang berfungsi sebagai pusat kota dan beberapa zona yang mengelilinginya. Namun zone dalam teori ini tidaklah melingkar keluar, namun masih dalam jarak yang sama dari pusat kota atau CBD.

Menurut teori sektoral, unit-unit kegiatan di perkotaan tidak mengikuti zona-zona teratur secara konsentris, tetapi membentuk sektor-sektor yang sifatnya lebih bebas. Dalam teori sektoral, Hoyt menggambarkan bahwa perkembangan kota dipengaruhi oleh faktor ketersediaan jaringan jalan atau aksesibilitas yang memadai seperti rel kereta api dan jalan raya. Dengan demikian sebuah kota seolah – olah terdiri dari masing – masing sektor yang mengalami perkembangan keluar. Penggunaan tanah yang membedakan teori sektoral dengan teori konsentris adalah keberadaan penggunaan tanah untuk industri, yang tidak dimiliki oleh teori konsentris. Menurut Hoyt, zona industri terletak di sepanjang jalur kereta, begitupun dengan zona pemukiman kumuh atau tempat tinggal buruh. Sementara zona perdagangan berada di daerah dengan harga tanah tertinggi, yaitu di pusat kota. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai rute dan moda transportasi menuju daerah perkotaan, seperti rel kereta api, dermaga atau pelabuhan (bagi yang berbatasan dengan perairan), serta jalan raya yang menggambarkan mudahnya aksesibilitas. Dengan mudahnya aksesibilitas, maka suatu daerah menjadi strategis dan harga tanahpun akan menjadi mahal. Zona pemukiman menengah dan zona pemukiman atas akan berada menjauh dari kota, terletak di pinggiran kota untuk menghindari kemacetan, bising, dan polusi udara.

Secara garis besar, pembagian teori sektoral menurut Hoyt sebagai berikut :

a. **Central Bussines District atau Daerah Pusat Kegiatan**

Merupakan pusat daerah kegiatan yang merupakan inti kota.

b. **Industri / perdagangan**

Industri ataupun perdagangan mengikuti aliran sungai, jalur kereta api, jalan raya. Pekerja kelas bawah bekerja di daerah ini memproduksi barang kebutuhan kota.

c. **Low Class Residential atau Pemukiman Kelas Bawah**

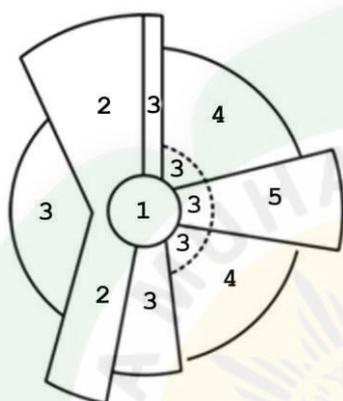
Merupakan pemukiman pekerja kelas bawah, dekat dengan lokasi pabrik untuk mengurangi biaya transport. Tingkat polusi di daerah ini sangat tinggi dan lingkungan yang buruk karena pengaruh pabrik.

d. Middle Class Residential atau pemukiman Kelas Menengah

Merupakan zona pemukiman terluas, dihuni pekerja dengan taraf ekonomi menengah. Kondisi lingkungan lebih baik karena agak jauh dari daerah pabrik.

e. High Class Residential atau pemukiman Kelas Atas

Merupakan zona pemukiman kelas atas, kondisi lingkungan sangat baik dan sarana transportasi sangat nyaman tanpa kemacetan. Akses menuju pusat kota sangat lancar.



Keterangan :

1. Central Bussines District atau Daerah Pusat Kegiatan
2. Industri / perdagangan
3. Low Class Residential atau Pemukiman Kelas Bawah
4. Middle Class Residential atau pemukiman Kelas Menengah
5. High Class Residential atau pemukiman Kelas Atas

Gambar 9. Teori sektoral

3) Teori Inti Ganda (Multiple Nuclei Theory)

Teori ini dikemukakan oleh Chauncy Harris dan Edward Ullman pada tahun 1945, yang kemudian lebih dikenal dengan teori Harris-Ullman. Mereka berpendapat bahwa meskipun dalam suatu kota terdapat pola konsentris dan sektoral, namun kenyataannya lebih rumit dari apa yang sekedar diteorikan Burgess dan Hoyt. Harris dan Ullman menjelaskan, suatu kota bermula dari sebuah CBD atau pusat kota, namun dalam perkembangannya kota memiliki sub-pusat atau inti – inti baru sebagai dampak dari aglomerasi. Pertumbuhan kota yang berawal dari suatu pusat menjadi bentuk yang kompleks. Bentuk yang kompleks ini disebabkan oleh munculnya nukleus-nukleus baru yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan. Nukleus-nukleus baru akan berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya yang fungsional dan membentuk struktur kota yang memiliki sel-sel pertumbuhan.

Nukleus kota dapat berupa kampus perguruan tinggi, bandar udara, kompleks industri, pelabuhan laut, dan terminal bus. Keuntungan ekonomi menjadi dasar pertimbangan dalam penggunaan lahan secara

mengelompok sehingga berbentuk nukleus. Misalnya, kompleks industri mencari lokasi yang berdekatan dengan sarana transportasi. Perumahan baru mencari lokasi yang berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan tempat pendidikan.

Dalam teori ini tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti halnya pada teori konsentris dan sektoral, walaupun CBD yang sebenarnya masih berfungsi sebagai pusat kota. Kegiatan – kegiatan yang memiliki kemiripan akan berlokasi dalam satu area dan menciptakan subpusat dalam suatu kota, sehingga memiliki kesan terbentuk “ inti-inti “ baru bagi masing – masing area.

Berikut penjelasan mengenai masing-masing zona dalam teori pusat kegiatan berganda :

1) Central Business District atau Daerah Pusat Kegiatan

Seperti halnya teori konsentris dan sektoral, zona ini berupa pusat kota yang menampung sebagian besar kegiatan kota. Zona ini berupa pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat district spesialisasi pelayanan, seperti “retailing” distrik khusus perbankan, theater dan lain-lain.

2) Industri Ringan

Oleh karena keberadaan fungsi sangat membutuhkan jasa angkutan besar maka fungsi ini banyak mengelompok sepanjang jalan kereta api dan dekat dengan CBD. Zona ini tidak berada di sekeliling zona CBD tetapi hanya berdekatan saja. Sebagaimana “*wholesale*”, “*Light manufacturing*” yaitu: transportasi yang baik, ruang yang memadai, dekat dengan pasar dan tenaga kerja.

3) Pemukiman Kelas Rendah

Pemukiman memang membutuhkan persyaratan khusus. Dalam hal ini ada persaingan mendapatkan lokais yang nyaman antara golongan berpenghasilan tinggi dengan golongan yang berpenghasilan rendah. Hasilnya sudah dapat diramalkan bahwa golongan tinggi akan mendapatkan daerah yang nyaman dan golongan rendah akan memperoleh daerah yang kurang baik. Zona ini mencerminkan daerah yang kurang baik untuk permukiman sehingga penghuninya umumnya dari golongan rendah dan permukimannya juga relatif lebih jelek dari zona pemukiman kelas menengah. Zona ini dekat dengan pabrik-pabrik, kалан kereta api dan drainase jelek.

4) Pemukiman Kelas Menengah

Zona ini tergolong lebih baik dari pada zona pemukiman kelas rendah baik dari segi fisik maupun penyediaan fasilitas

kehidupannya. Penduduk yang tinggal disini pada umumnya mempunyai penghasilan lebih tinggi dari pada penduduk zona pemukiman kelas rendah.

5) Pemukiman Kelas Atas

Zona ini mempunyai kondisi paling baik untuk permukiman dalam artian fisik maupun penyediaan fasilitas. Lingkungan alamnya pun menjajikan kehidupan yang tenteram, aman, sehat dan menyenangkan. Hanya golongan penduduk yang berpenghasilan tinggi yang mampu memiliki lahan dan rumah disini. Lokasinya relatife jauh dari CBD, industri berat dan ringan, namun untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari didekatnya dibangun *Business District* baru yang fungsinya tidak kalah dengan CBD. Pusat-pusat baru seperti kampus, pusat rekreasi, taman-taman sangat menarik perkembangan permukiman menengah dan tinggi.

6) Heavy Manufacturing atau Industri Berat

Zona ini merupakan konsentrasi pabrik-pabrik besar. Berdekatan dengan zona ini biasanya mengalami berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara, kebisingan, kesemerawutan lalu lintas dan sebagainya, sehingga untuk kenyamanan tempat tinggal tidak baik, namun di daerah ini terdapat berbagai lapangan pekerjaan yang banyak. Adalah wajar apabila kelompok penduduk berpenghasilan rendah bertempat tinggal dekat dengan zona ini.

7) Business District atau kawasan Bisnis Pinggiran Kota

Zona ini muncul untuk memenuhi kebutuhan penduduk zona pemukiman kelas menengah dan pemukiman kelas atas dan sekaligus akan menarik fungsi-fungsi lain untuk berada di dekatnya. Sebagai salah satu pusat (nuclei) zona ini akan menciptakan suatu pola tata ruang yang berbeda pula, sehingga tidak mungkin terciptanya pola konsentris, tetapi membentuk sebaran "cellular" lagi sesuai dengan karakteristik masing-masing.

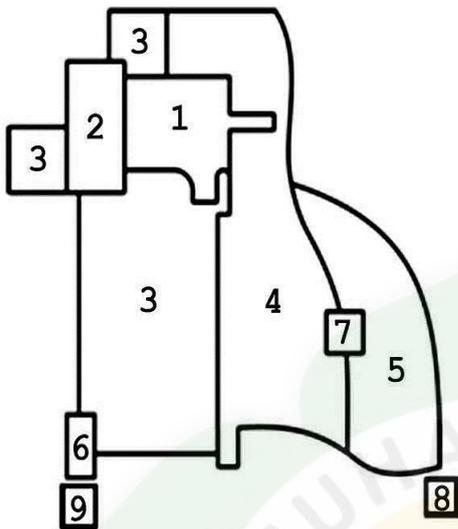
8) Pemukiman pinggiran atau zona penglaju

Zona ini membentuk komunitas tersendiri dalam artian lokasinya. Penduduk disini sebagian besar bekerja di pusat-pusat kota dan zona ini semata-mata digunakan untuk tempat tinggal. Walaupun demikian makin lama akan makin berkembang dan menarik fungsi lain juga, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran dan lain-lain. Proses perkembangannya akan serupa dengan kota lama.

9) Kawasan Industri Luar Kota

Sebagaimana perkembangan industri-industri lainnya unsur transportasi selalu persyaratan untuk hidupnya fungsi ini. Walaupun

terletak di daerah pinggiran zona ini dijangkau jalur transportasi yang memadai. Sebagai salah satu pusat (*nuclei*) pada perkembangan selanjutnya dapat menciptakan pola-pola persebaran keruarganya sendiri dengan proses serupa.



Gambar 10. Teori inti ganda

Keterangan :

1. *Central Business District* atau Daerah Pusat Kegiatan
2. *Industri Ringan*
3. Pemukiman Kelas Rendah
4. Pemukiman Kelas Menengah
5. Pemukiman Kelas Atas
6. *Heavy Manufacturing* atau Industri Berat
7. *Business District* atau kawasan Bisnis Pinggiran Kota
8. *Pemukiman pinggiran atau zona penglaju*
9. Kawasan Industri Luar Kota

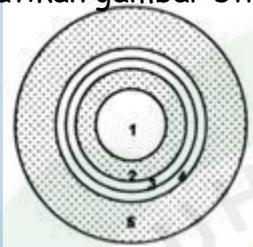
Sejauh ini belum ada dampak yang menonjol adanya kelemahan teori inti ganda. Teori ini merupakan penyempurna dari teori konsentris dan sektoral yang lebih kompleks.

4.5 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN)

Latihan Kegiatan 2 : Mari Mengumpulkan Data

Kerjakan tugas berikut dengan santai, serius, selesai dan sukses (ingat 4-S)!

1. Jelaskan pengertian kota menurut R. Bintarto!
2. Jelaskan klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk!
3. Sebutkan Ciri Fisik Kota!
4. Jelaskan Tahapan Perkembangan kota menurut J.M Houston!
5. Perhatikan gambar struktur keruangan kota di bawah ini!



Jelaskan gambar pola persebaran penggunaan ruang kota di atas!

Seandainya ada keraguan atau masih kurang memahami untuk isian format pada latihan 2, silahkan Anda membaca kembali uraian mengenai Pola Keruangan Kota di atas. Nah! Jika Ananda sudah jelas dan memahaminya maka lanjutkanlah ke materi berikutnya mengenai Interaksi desa dan kota. Semoga Ananda sukses!

3. KEGIATAN BELAJAR III

Faktor yang menyebabkan terbentuknya interaksi desa kota

3.1. KD DAN IPK

3.2 Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan	3.2.1 Menjelaskan faktor-faktor yang mendasari interaksi desa – kota 3.2.2 Mendefinisikan teori interaksi, teori titik henti, dan teori konektivitas
---	---

3.2. MATERI

A. INTERAKSI DESA DAN KOTA

1. Faktor-faktor yang mendasari interaksi desa – kota Gravitasi

Istilah gravitasi lebih dikenal setelah lahirnya Hukum Gravitasi Newton yang menyatakan bahwa:

- Setiap benda mempunyai kekuatan menarik terhadap benda lain
- Di antara dua benda terjadi proses saling tarik-menarik
- Besarnya kekuatan tarik-menarik antara dua benda berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya.

Hubungan antara Hukum Gravitasi Newton dengan interaksi desa – kota, adalah sebagai berikut :

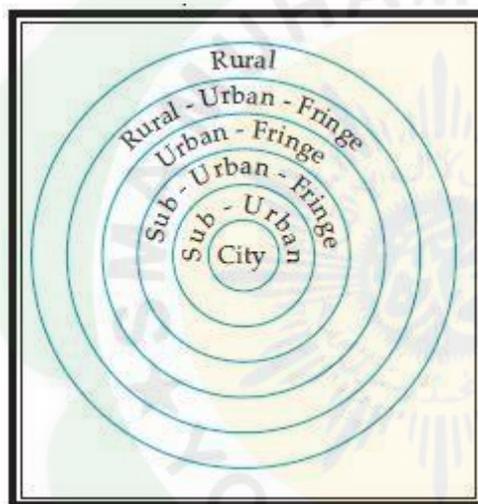
- Proses interaksi desa – kota terjadi karena masing-masing mempunyai kekuatan untuk menarik.
- Kota mempunyai kekuatan menarik terhadap desa karena alasan berikut:
 - Di kota terdapat beragam pusat daerah kegiatan dan aneka ragam lapangan kerja.
 - Kota sebagai simbol kemajuan dan jendela pembaharuan untuk hal-hal baru.
- Desa mempunyai kekuatan menarik terhadap kota karena alasan berikut:
 - Desa mempunyai banyak sumberdaya alam
 - Desa sebagai lumbung serta memberi aneka bahan pangan, bahan sandang, bahan perumahan, dan aneka bahan mentah industri.
 - Desa sebagai pusat tenaga kerja.
 - Desa mempunyai keanekaragaman sumberdaya lingkungan dan panorama alam.
- Besar kecilnya kekuatan tarik-menarik antara kota dan desa

tergantung pada tinggi-rendahnya potensi fisik-nonfisik kota dan desa tersebut serta tergantung ada atau tidaknya sarana dan prasarana transportasi penghubung kota dan desa.

Konsep model gravitasi ini didasarkan atas pernyataan bahwa jika ukuran salah satu atau kedua wilayah bertambah, maka pengaruh yang terjadi di antara kedua kota tersebut juga akan bertambah. Semakin jauh jarak antara kedua wilayah, maka akan semakin berkurang juga pengaruh yang terjadi di antara keduanya.

2. Zona Interaksi Desa – Kota

Kekuatan hubungan suatu wilayah kota yang berinteraksi dengan wilayah pedesaan biasanya sesuai dengan jarak ke pusat kota dan membentuk wilayah tertentu. Semakin jauh letak suatu daerah dari pusat kota, maka semakin lemah interaksinya dengan pusat kota tersebut. Wilayah interaksi ini akan membentuk lingkaran-lingkaran, di mulai dari pusat kota sampai ke wilayah desa.



Keterangan:

1. *City* = kota
2. *Suburban* = sub daerah perkotaan
3. *Suburban fringe* = jalur tepi subdaerah
4. *Urbanfringe* = jalur tepi daerah perkotaan paling luar
5. *Rural urban fringe* = jalur batas desa-kota
6. *Rural* = pedesaan

Gambar 12. Perkembangan kota

Zona-zona interaksi desa dan kota oleh Bintarto (1986:66) dijelaskan sebagai berikut:

1. *City*, diartikan sebagai pusat kota
2. *Suburban* (sub daerah perkotaan), suatu wilayah yang lokasinya dekat pusat atau inti kota, dihuni oleh para penglaju.
3. *Suburban Fringe* (jalur tepi sub wilayah perkotaan), suatu wilayah yang melingkari suburban dan merupakan wilayah peralihan antara kota dan desa.
4. *Urban Fringe* (jalur tepi wilayah perkotaan paling luar) yaitu semua wilayah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota, kecuali inti kota.
5. *Rural Urban Fringe* (jalur batas desa dan kota), merupakan wilayah yang terletak antara kota dan desa, yang ditandai dengan pola

penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non pertanian.

6. *Rural* (wilayah desa), wilayah yang masih menitikberatkan pada kegiatan pertanian.

Zona *suburban*, *suburban fringe*, *urban fringe*, dan *rural urban fringe* merupakan wilayah yang memiliki suasana kehidupan moder, sehingga dapat disebut perkotaan jalur-jalur yang digambarkan tersebut merupakan gambaran yang ideal. Dalam kenyataannya jalur-jalur zona interaksi desa dan kota tidak selalu konsentris.

Manfaat Interaksi Desa-Kota bagi Perkotaan :

- a. Terpenuhinya sumber daya alam sebagai bahan mentah/bahan baku industri.
- b. Terpenuhinya kebutuhan pokok yang dihasilkan pedesaan.
Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan bagi perkotaan.
- c. Tersedianya tempat pemasaran hasil industri.



Gambar 13 : sayur dan buah merupakan kebutuhan pokok untuk masyarakat perkotaan yang di dapat dari pedesaan.

Manfaat Interaksi Desa-Kota bagi Pedesaan :

- a. Terpenuhinya barang-barang yang tidak ada di desa.
- b. Masuknya pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kota ke pedesaan.
- c. Membuka lapangan kerja baru disektor pertanian.



Gambar 14 : internet masuk kampung merupakan bagian dari modernisasi teknologi di pedesaan.

1. Intervening Opportunity (kesempatan untuk berintervensi)
Adalah adanya kesempatan untuk timbulnya interaksi antarwilayah dan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya wilayah tersebut. Jadi, semakin besar intervening opportunity, semakin kecil arus komoditas.
2. Spatial Transfer Ability (kemudahan pemindahan dalam ruang)



Gambar 15 : jalan trans papua diharapkan mampu meningkatkan Spasial Transfer Ability antar daerah di Pulau Papua.

Kemudahan pemindahan dalam ruang baik berupa barang, jasa, manusia maupun informasi. Proses pemindahan dari kota ke desa atau sebaliknya dipengaruhi antara lain :

- a. Jarak mutlak maupun jarak relatif antarwilayah
- b. Biaya transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain
- c. Kelancaran transportasi antarwilayah

Jadi, semakin mudah transferabilitas, semakin besar arus komoditas. Suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh

antardua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan maupun permasalahan baru

3. Wujud Interaksi Antarkota Atau Antardesa

Interaksi wilayah dapat terjadi antara desa dan desa, kota dan desa, kota dan kota, daerah industri dan daerah pemasaran dsb. Dalam hubungan timbal balik ini terdapat proses :

1. Pegerakan barang dari desa ke kota atau sebaliknya seperti pemindahan hasil pertanian, produk industri dan barang tambang.
2. Pergerakan gagasan dan informasi terutama dari kota ke desa.
3. Pergerakan manusia dalam bentuk rekreasi, urbanisasi, mobilitas penduduk baik yang sifatnya sirkulasi maupun komutasi.

Interaksi antara desa - kota melahirkan suatu perkembangan baru bagi desa maupun bagi kota. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan potensi yang dimiliki desa maupun kota, dan adanya persamaan kepentingan.

Interaksi antar wilayah dapat dilihat dari dua wujud yaitu dalam wujud fisik dan dalam wujud sosial. Beberapa wujud interaksi yang bersifat fisik adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan penggunaan lahan. Misalnya, daerah permukiman berubah menjadi daerah pusat pertokoan.
- b. Pembangunan berbagai sarana dan prasarana. Misalnya, gedung perkantoran, jalan, pertokoan, sekolah dan perumahan.
- c.

B. TEORI INTERAKSI DESA DAN KOTA

Terdapat beberapa teori keruangan interaksi wilayah diantaranya

Model Gravitasi, Teori Titik Henti, dan Teori Grafik.

1. Teori Gravitasi

Teori **Gravitasi** kali pertama diperkenalkan dalam disiplin ilmu Fisika oleh Sir Issac Newton (1687). Inti dari teori ini adalah bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik menarik antara keduanya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. Kekuatan gaya tarik menarik ini akan berbanding lurus dengan hasil kali kedua massa benda tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Secara matematis, model gravitasi Newton ini dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$G = g \cdot \frac{m_A \cdot m_B}{(d_{A,B})^2}$$

Keterangan :

- G : Kekuatan gravitasi antara dua benda (cm/det^2)
 g : Tetapan gravitasi Newton, besarnya $6,167 \times 10^{-5} \text{ cm}^3$
 m_A : Massa benda A (gram)
 m_B : Massa benda B (gram)
 $d_{A,B}$: Jarak antara benda A dan B

Model gravitasi Newton ini kemudian diterapkan oleh **W.J. Reilly (1929)**, seorang ahli geografi untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitiannya, Reilly berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Untuk mengukur kekuatan interaksi antarwilayah digunakan formulasi sebagai berikut.

$$I_{A,B} = k \cdot \frac{P_A \cdot P_B}{(d_{A,B})^2}$$

Kekuatan interaksi antara wilayah A dan B k : Angka konstanta empiris, nilainya 1

- P_A : Jumlah penduduk wilayah A
 P_B : Jumlah penduduk wilayah B
 $d_{A,B}$: Jarak wilayah A dan wilayah B

Perbandingan potensi interaksi antarwilayah dengan memanfaatkan formula yang dikemukakan Reilly ini dapat diterapkan jika kondisi wilayah-wilayah yang dibandingkan memenuhi persyaratan tertentu.

Adapun persyaratan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencarian, mobilitas, dan kondisi sosial-budaya penduduk setiap wilayah yang dibandingkan relatif memiliki kesamaan.
2. Kondisi alam setiap wilayah relatif sama, terutama berkaitan dengan kondisi topografinya.
3. Keadaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah yang dibandingkan relatif sama.

2. Teori Titik Henti (Breaking Point Theory)

Teori Titik Henti (*Breaking Point Theory*) merupakan hasil modifikasi dari Model Gravitasi Reilly. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori Titik Henti juga dapat digunakan dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat. Penempatan dilakukan di antara dua wilayah yang berbeda jumlah penduduknya agar terjangkau oleh penduduk setiap wilayah.

Menurut teori ini jarak titik henti (titik pisah) dari lokasi pusat perdagangan (atau pelayanan sosial lainnya) yang lebih kecil ukurannya adalah berbanding lurus dengan jarak antara kedua pusat perdagangan. Namun, berbanding terbalik dengan satu ditambah akar kuadrat jumlah penduduk dari kota atau wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi jumlah penduduk kota yang lebih sedikit penduduknya. Formulasi Teori Titik Henti adalah sebagai berikut.

$$D_{AB} = \frac{d_{AB}}{K + \sqrt{\frac{P_B}{P_A}}}$$

D_{AB} : Jarak lokasi titik henti, diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil (dalam hal ini kota A)

d_{AB} : Jarak Kota A dan B

P_A : Jumlah penduduk kota yang lebih kecil (kota A)

P_B : Jumlah penduduk kota yang lebih besar (kota B)

K : Konstanta = 1

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan wilayah, Model Gravitasi dan Teori Titik Henti dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan faktor lokasi. Model Gravitasi dan Teori Titik Henti dapat dimanfaatkan untuk merencanakan pusat-pusat pelayanan masyarakat, seperti pusat perdagangan (pasar, super market, bank), kantor pemerintahan, sarana pendidikan dan kesehatan, lokasi industri, ataupun fasilitas pelayanan jasa masyarakat lainnya.

2. Teori Grafik

Salah satu faktor yang mendukung kekuatan dan intensitas interaksi antarwilayah adalah kondisi prasarana transportasi yang menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lain di sekitarnya. Jumlah dan kualitas prasarana jalan, baik jalan raya, jalur udara, maupun laut, tentunya sangat memperlancar laju dan pergerakan distribusi manusia, barang, dan jasa antarwilayah. Anda tentu sependapat bahwa antara satu wilayah dan wilayah lain senantiasa dihubungkan oleh jalur-jalur transportasi sehingga membentuk pola jaringan transportasi. Tingkat kompleksitas jaringan yang menghubungkan berbagai wilayah merupakan salah satu indikasi kuatnya arus interaksi.

Sebagai contoh, dua wilayah yang dihubungkan dengan satu jalur jalan tentunya memiliki kemungkinan hubungan penduduknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan dua wilayah yang memiliki jalur transportasi yang lebih banyak.

Untuk menganalisis potensi kekuatan interaksi antarwilayah ditinjau dari struktur jaringan jalan sebagai prasarana transportasi, K.J. Kansky mengembangkan Teori Grafik dengan membandingkan jumlah kota atau daerah yang memiliki banyak rute jalan sebagai sarana penghubung kota-kota tersebut. Menurut Kansky, kekuatan interaksi ditentukan dengan Indeks Konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks, semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota atau wilayah yang sedang dikaji. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang, dan jasa karena prasarana jalan sangat memperlancar tingkat mobilitas

antarwilayah. Untuk menghitung indeks konektivitas ini digunakan rumus sebagai berikut.

$$\beta = \frac{e}{v}$$

- β = Indeks konektivitas
- e = Jumlah jaringan jalan
- v = Jumlah kota

Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan wilayah, analisis indeks konektivitas dapat dijadikan salah satu indikator dan pertimbangan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur jalan serta fasilitas transportasi lainnya. Dengan analisis indeks konektivitas dapat meningkatkan hubungan suatu wilayah dengan wilayah-wilayah lainnya, serta memperlancar arus pergerakan manusia, barang, dan jasa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.1 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN)

Latihan Kegiatan 3 : Mari Mengumpulkan Data

Kerjakan tugas berikut dengan santai, serius, selesai dan sukses (ingat 4-5)!

1. Jelaskan faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi desa - kota!
2. Sebutkan dan jelaskan zona interaksi desa - kota menurut Bintarto!
3. Sebutkan dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota?
4. Diketahui pada suatu daerah, jumlah penduduk dari kota A = 32.000 jiwa dan jumlah penduduk dari kota B = 16.000 jiwa. Jarak antara kota A dan B adalah 50 km. Jika akan mendirikan tempat pelayanan umum, maka lokasi yang tepat adalah berada di...

5. Perhatikan gambar di bawah ini!



Seandainya ada keraguan atau masih kurang memahami untuk isian format pada latihan 3, silahkan Anda membaca kembali uraian mengenai Interaksi desa dan kota di atas. Nah! Jika Ananda sudah jelas dan memahaminya maka lanjutkanlah ke materi berikutnya mengenai Pemerataan Pembangunan di desa dan kota. Semoga Ananda sukses!

4. KEGIATAN BELAJAR IV

Usaha pemerataan pembangunan desa kota dan dampak interaksi desa kota

4.1. KD DAN IPK

Kompetensi Dasar	Indikator
3.2 Menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan	3.2.7 Menjelaskan usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota 3.2.8 Menganalisis dampak interaksi desa kota
4.2. Membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan/atau diagram	4.2.1 Membuat makalah mengenai kota di Indonesia yang berpotensi menjadi pusat pembangunan.

4.2. MATERI

A. USAHA PEMERATAAN PEMBANGUNAN DI DESA KOTA DESA DAN KOTA

1. Usaha Pemerataan Pembangunan Desa

a. Masalah yang berkaitan dengan proses pembangunan pedesaan

Masalah di desa yang berkaitan dengan pembangunan dapat dikategorikan dalam beberapa masalah. Masalah ini antara lain adalah keadaan masyarakat, pemerintah, dan kondisi geografis.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan keadaan masyarakat desa meliputi sebagai berikut:

- 1) Rendahnya tingkat kesehatan penduduk desa
- 2) Tingginya tingkat kematian penduduk desa
- 3) Kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan pembangunan
- 4) Rendahnya tingkat pendapatan penduduk desa
- 5) Rendahnya tingkat ketrampilan kerja penduduk desa

Beberapa masalah mengenai pemerintahan desa, antara lain sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya koordinasi antarlembaga yang ada di pedesaan dalam melaksanakan pembangunan
- 2) Masih banyak lembaga ekonomi masyarakat yang belum berfungsi sebagaimana mestinya
- 3) Pola penggunaan dan penguasaan tanah belum mencerminkan pemerataan pendapatan

- 4) Kurang koordinasinya lembaga pemerintah desa dengan lembaga di atasnya atau lembaga di luar lembaga pemerintahan desa

Beberapa masalah pada kondisi geografis desa antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya prasarana yang menyebabkan desa tidak dapat berkembang dengan baik
- 2) Jumlah penduduk dengan lahan pertanian tidak seimbang, yaitu banyak penduduk yang menempati wilayah pertanian desa yang relatif sempit
- 3) Jumlah penduduk yang jarang dan terpencar – pencar sehingga terjadi kekurangan tenaga kerja di desa.

b. Pengertian program pembangunan desa

Program pembangunan desa merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan memperhatikan kendala yang ada. Menurut UU nomor 6 Tahun 2014, Program pembangunan desa ini sesuai dengan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Dalam hal ini peran pemerintah hanyalah memberikan bantuan, mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan. Maksudnya adalah agar masyarakat dapat meningkatkan usaha swadaya dan gotong royong serta menumbuhkembangkan desa

menuju desa swasembada. Pembangunan desa hendaknya dilakukan secara dinamis, berkelanjutan, menyeluruh, terpadu, dan serasi sehingga akan tercapai sasaran yang tepat.

c. Prinsip – prinsip pembangunan desa

Prinsip – prinsip pembangunan desa disusun berdasarkan pokok – pokok kebijakan sebagai berikut ini:

- 1) Pengembangan tata desa yang teratur dan serasi
- 2) Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif
- 3) Pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada
- 4) Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat
- 5) Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat

d. Sistem kerja pembangunan desa

Agar kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa dapat mencapai sasaran, maka diperlukan sistem kerja dan mekanisme kerja yang baik. Untuk keperluan itu, maka dibentuklah lembaga – lembaga pemerintah yaitu sebagai berikut:

- 1) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di tingkat desa
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat desa
- 3) Unit daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan.



Gambar 17 : Lembaga Desa

Berikut ini adalah koordinasi pembangunan tingkat desa:

- 1) Kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan pemeliharaan sarana dan prasarana desa seperti jalan, serta hal – hal yang berhubungan dengan pembentukan kelompok kerja (pokja) dilakukan melalui LKMD dengan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ketrampilan penduduk, pengembangan sosial budaya, kesejahteraan keluarga, dan kesehatan masyarakat dikoordinasi oleh LKMD.
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi masyarakat dan pengawasan kinerja kepala desa dikoordinasi oleh BPD.

- 4) Kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi desa, seperti pertanian, pengembangan industri, dan kerajinan rakyat terkoordinasi melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa ini memberikan pelayanan dalam bidang pemodalan, bimbingan teknis, dan pemasaran kepada masyarakat desa.

e. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

LKMD dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 dengan tujuan untuk membantu pemerintah desa/ kelurahan dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil – hasil pembangunan kepada masyarakat. Berikut ini adalah usaha – usaha yang bersifat pengembangan oleh LKMD, yaitu:

- 1) Latihan ketrampilan dalam pembangunan dan pemugaran perumahan desa
- 2) Latihan keterampilan dalam pelaksanaan permukiman penduduk.
- 3) Latihan kursus bidang perekonomian desa, tata desa, dan prasarana desa bagi pengurus LKMD
- 4) Latihan keterampilan wirausaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan
- 5) Penyuluhan dan peningkatan motivasi anggota masyarakat di desa – desa yang belum berkembang
- 6) Penerbitan brosur – brosur penyuluhan
- 7) Menggali dan memanfaatkan potensi gotong royong masyarakat desa untuk pembangunan
- 8) Sarana komunikasi, baik antara pemerintah dan masyarakat atau antar warga masyarakat.

f. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2016 menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lembaga ini memiliki batas masa kerja selama 6 tahun sejak dilaksanakan pelantikan oleh Bupati. Fungsi dan tugas BPD tertera jelas pada pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 Tahun 2016.

BPD memiliki fungsi sebagai berikut ini:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Tugas dari BPD dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut ini:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat
- 2) Menampung aspirasi masyarakat
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD
- 6) Menyelenggarakan musyawarah desa
- 7) Pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa



Gambar 18 : Badan Permusyawaratan desa

g. Unit Daerah Kerja pembangunan (UDKP)

Unit Daerah Kerja pembangunan (UDKP) adalah suatu wadah sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengevaluasian pembangunan yang terkoordinasi dan terpadu di suatu wilayah kecamatan. Sistem pelaksanaan UDKW diutamakan untuk daerah perbatasan, kepulauan, daerah padat penduduk, wilayah kecamatan yang tergolong miskin, rawan dan terbelakang serta daerah yang rata – rata kepadatan penduduknya rendah. UDKP harus bekerja sama dengan berbagai pihak, antara lain adalah bekerjasama dengan:

- 1) Tenaga kerja Sukarela (TKS)
- 2) Bantuan mahasiswa KKN di berbagai wilayah
- 3) Temukarya LKMD
- 4) Penempatan sarjana penggerak pembangunan pedesaan (SP3)

Usaha – usaha yang dilakukan UDKP dalam pembangunan desa.

Usaha – usaha tersebut antara lain adalah:

- 1) Mengkoordinasi berbagai kegiatan pembangunan sektoral, regional, dan swadaya masyarakat desa
- 2) Mengadakan diversifikasi usaha dan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan produksi dan pendapatan

- 3) Mengkoordinasi aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat desa dengan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah
- 4) Menginformasikan data dan permasalahan desa – desa dalam wilayah kecamatan yang hendak diatasi dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
- 5) Mewujudkan laju pembangunan dan pemerataan hasil – hasilnya bagi seluruh masyarakat desa.

2. Usaha Pemerataan Pembangunan Kota

a. Permasalahan Perkotaan

Kota secara fisik dapat didefinisikan sebagai area yang terdiri atas bangunan-bangunan yang saling berdekatan yang berada di atas tanah atau dekat dengan tanah, instalasi-instalasi di bawah tanah dan kegiatan-kegiatan di dalam ruangan kosong di angkasa. Bangunan merupakan tempat yang dapat memberikan perlindungan bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Oleh karenanya, bangunan merupakan unsur pertama yang dibangun di kota setelah air dan makanan tersedia.

Kategori utama penggunaan bangunan yang terdiri atas permukiman, komersial, industri, pemerintahan, transportasi merupakan unsur unsur pembentuk pola penggunaan tanah kota. Selain tersusun atas bangunan seperti kategori di atas, kota juga berisikan struktur atau bangunan yang lain yang bukan berupa bangunan gedung, yaitu: jembatan, gardu-gardu listrik, pengilangan minyak, dan berbagai instalasi lain yang tidak lazim disebut sebagai bangunan, karena struktur bangunan tersebut tidak sebagaimana bangunan umumnya dalam hal menutupi tanah yang ada dibawahnya. Struktur-struktur yang bukan berupa bangunan juga memiliki fungsi yang penting bagi sebuah kota, sebagaimana pentingnya bangunan gedung. Kota juga tersusun atas jaringan utilitas yang berada di bawah permukaan tanah. Bangunan gedung di atas baik yang digunakan untuk permukiman, komersial, industri, pemerintahan maupun transportasi akan terhubung dengan jaringan utilitas umum yang ada di bawah tanah seperti jaringan air bersih, kabel telepon, saluran pengolahan limbah, bak-bak penampungan, gorong-gorong, saluran irigasi dan pengendali banjir (Branch, 1996).

1) Masalah Permukiman

Pada dasarnya kota terdiri dari bangunan tempat tinggal, perkantoran dan perniagaan. Gambaran tentang satu kota selalu berupa susunan bangunan fisik yang berjejer sepanjang jalan ekonomi, gugus perkantoran pemerintahan dan perniagaan, perkampungan atau permukiman warga kota, rumah ibadah dan pertamanan. Seluruh bangunan fisik ini biasanya berkembang lebih

lambat dibanding dengan penambahan penduduk kota, baik penambahan penduduk kota secara alami maupun karena derasnya arus urbanisasi (Marbun, 1994).



Gambar 19 : Kepadatan Pemukiman Kota

Permukiman sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan budaya dari para penghuninya. Tidak hanya menyangkut kuantitas melainkan juga kualitas. Selama ini kawasan permukiman baru lebih ditekankan pada aspek fisik bangunannya saja. Sedangkan permukiman lama yang sudah ada tumbuh dan berkembang dengan pesat tanpa terkendali karena kurang adanya tertib dan pengawasan pembangunan. Kedua hal di atas tersebut mengakibatkan semakin menurunnya kualitas permukiman dalam arti (Marbun, 1994):

- a. Kepadatan bangunan yang terlalu tinggi.
 - b. Hilangnya taman-taman dan ruang terbuka.
 - c. Tidak mencukupinya jaringan air bersih, listrik dan pembuangan air kotor.
 - d. Berkurangnya tingkat pelayanan dan fasilitas umum seperti sekolah, tempat pertemuan dan olahraga, rekreasi, dan lain-lain.
 - e. Hilangnya ciri-ciri khas atau karakter spesifik dari daerah permukiman tertentu.
- 2) Masalah Lingkungan

Laju urbanisasi dan pembangunan kota yang tinggi akan membawa dampak tersendiri bagi lingkungan hidup di dalam maupun di sekitar kota. Perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan jumlah penduduk membawa perubahan besar dalam keseimbangan lingkungan hidup di kota. Aktivitas kota dan pertumbuhan penduduk tersebut telah menyita areal taman, tanah

kosong, hutan ladang di sekelilingnya untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat pendidikan, kantor, ataupun tempat berolahraga dan untuk jalan. Hal ini otomatis memperburuk keseimbangan lingkungan mulai dari menciutnya areal tanaman, merosotnya daya absorpsi tanah yang kemudian sering berakibat banjir apabila hujan, sampai masalah sampah dengan segala akibatnya.

Demikian pula dengan perkembangan industri dan teknologi mencemari lingkungan dengan asap knalpot kendaraan bermotor, jelaga dari cerobong pabrik, air buangan pabrik dan segala buangan produk obat-obatan anti hama seperti DDT dan lain-lain. Sampah plastik juga turut menambah permasalahan bagi lingkungan hidup karena tidak hancur lebur dengan tanah seperti sampah daun atau sampah lainnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Akibat dari pembangunan kota dan perkembangan teknologi ini adalah timbulnya pencemaran lingkungan yang berupa (Marbun, 1994):

- a. Pencemaran udara;
- b. Pencemaran air;
- c. Pencemaran tanah;
- d. Kebisingan.

3) Masalah Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti pembangunan. Pendidikan memainkan peranan utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Demikian pula halnya dengan kesehatan, kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat.

Karena perannya yang sangat penting maka pelayanan pendidikan dan kesehatan harus senantiasa ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Todaro dan Smith (2006) mengatakan pada tahun 1950, sebanyak 280 dari setiap 1.000 anak di semua negara berkembang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun. Pada tahun 2002, angka tersebut telah menurun menjadi 120 per 1.000 di negara-negara miskin,

dan 37 per 1.000 di negara-negara berpendapatan menengah, sementara negara-negara berpendapatan tinggi berhasil menekan angka tersebut menjadi 7 per 1.000 anak. Demikian pula halnya dengan pendidikan, sejak beberapa dekade terakhir kemampuan baca tulis (literacy) dan pendidikan dasar sudah dinikmati secara meluas oleh sebagian besar orang di negara-negara berkembang. PBB melaporkan bahwa walaupun masih terdapat 857 juta orang berusia di atas 15 tahun yang buta huruf di dunia pada tahun 2000, namun sekarang 80 persen penduduk dunia telah mampu membaca dan menulis dibandingkan dengan 63 persen pada tahun 1970.

Pertumbuhan sudah barang tentu dapat juga terjadi melalui pembentukan modal konvensional meskipun tenaga buruh yang ada kurang terampil dan kurang pengetahuan. Tetapi laju pertumbuhan tersebut akan sangat terbatas tanpa adanya faktor modal manusia. Karena itu, modal manusia diperlukan untuk menyiapkan tenaga-tenaga pemerintahan yang semakin penting untuk memperkenalkan system baru penggunaan lahan dan metode baru pertanian, untuk membangun peralatan baru komunikasi, untuk melaksanakan industrialisasi, dan untuk membangun sistem pendidikan. Dengan kata lain, pembaharuan atau proses perubahan dari masyarakat statis atau tradisional, memerlukan sejumlah besar modal manusia strategis

b. Prinsip Pembangunan Dasar Kota yang Berkelanjutan

Untuk dapat menciptakan suatu kota yang berkelanjutan, diperlukan lima prinsip dasar, yaitu ekologi, ekonomi, equity (pemerataan), engagement (peran serta), dan energi (Budiharjo, 1996).

1. Equity (Pemerataan)
2. Ekonomi
3. Energi
4. Ekologi
5. Engagement (Peran Serta)

c. Usaha Pemerataan Pembangunan Kota

Pembangunan suatu kota dan wilayah, ditentukan atas empat aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek fisik dan aspek lingkungan (Widyaningsih, 2001).

Keempat aspek inilah yang dapat dijadikan dasar kriteria terhadap Analysis Hierarchy Process (AHP) strategi pembangunan Kota. Dari keempat aspek ini dapat dijabarkan lagi menjadi sub-sub kriteria, yaitu :

1. Sub kriteria berdasarkan aspek ekonomi terdiri dari :
 - a. Pendapatan daerah (PAD), merupakan hal pokok yang diperlukan menuju kemandirian wilayah menyongsong otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk itu daerah harus memaksimalkan sumber-

- sumber pendapatan daerah dan berinovasi mencari sumber lain.
- b. Pendapatan masyarakat. Daerah yang mandiri dan maju akan diperlihatkan oleh kemakmuran masyarakatnya (social welfare) ditandai dengan pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang tinggi akan menciptakan sumber pembiayaan pembangunan dari saving, investasi dan produktivitas yang tinggi.
 - c. Kesempatan kerja. Daerah yang maju akan menarik datangnya tenaga kerja, karena tingkat upah dan kesempatan kerja yang tinggi.
2. Sub kriteria berdasarkan aspek sosial budaya, terdiri dari :
- a. Kelembagaan, merupakan salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan pengelolaan daerah, yaitu struktur kelembagaan yang profesional dan kaya fungsi.
 - b. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi menjadi ciri kemajuan penduduk suatu daerah dan memberi andil terhadap daerahnya secara keseluruhan.
 - c. Kesehatan. Tingkat kesehatan yang tinggi menjadi ciri kemajuan penduduk suatu daerah dan memberi andil terhadap daerahnya secara keseluruhan.
3. Sub kriteria berdasarkan aspek fisik, terdiri dari :
- a. Tata guna lahan. Pola tata guna lahan meliputi pengaturan penggunaan tanah dan ruang. Kepastian penggunaan tata guna lahan merupakan faktor keteraturan struktur kota baik fisik maupun non-fisik.
 - b. Ketersediaan prasarana dan sarana, menjadi faktor penunjang perkembangan daerah. Ini akan menciptakan kelancaran aksesibilitas dan menarik investasi.
 - c. Hubungan antar daerah. Keberadaan suatu daerah akan tergantung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya, tidak ada daerah yang maju tanpa keterkaitan dengan yang lain. Hubungan komplementer yang saling menguntungkan akan berdampak terhadap kemajuan daerah.

B. DAMPAK PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP MASYARAKAT DESA DAN KOTA

Kota selalu mempunyai hubungan erat dengan wilayah sekitarnya. Penduduk kota yang terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah dan swasta, tukang-tukang, seniman, guru dan sebagainya, hidup dari hasil pertanian yang dihasilkan oleh para petani di pedesaan. Penduduk kota sangat tergantung secara ekonomis terhadap penduduk pedesaan. Demikian pula sebaliknya, penduduk desa mempunyai ketergantungan terhadap perkotaan terutama menyangkut sandang, pangan, dan barang jadi. Timbulnya pasar bisa menjadi ajang pertukaran kebutuhan antara penduduk desa dan kota.

Interaksi antara dua atau lebih daerah yang berbeda akan berpengaruh pada masing-masing wilayah sehingga akan memicu terjadinya perubahan. Seberapa besar perubahan yang terjadi tergantung dari jarak, jumlah

penduduk, dan berbagai factor pendukung lainnya seperti sarana transportasi, komunikasi, listrik, dan lain sebagainya. Pengembangan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut.

1. Dampak Interaksi Desa-Kota

Interaksi terjadi karena adanya usaha seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat diusahakan sendiri atau didapatkan dari tempat tinggalnya sendiri, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain yang berada di tempat lain. Contohnya, seorang petani di daerah pedesaan menghasilkan beras, namun untuk mendapatkan alat pertanian yang dibutuhkannya ia harus menjual berasnya ke daerah lain dan membeli alat pertanian yang diproduksi oleh industri di daerah perkotaan. Dalam segala aspek kehidupan, penduduk dari suatu tempat harus berinteraksi dengan penduduk di daerah lain. Interaksi tersebut menyebabkan terjadinya hubungan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Interaksi antar wilayah akan menimbulkan pengaruh sebagai berikut:

a. Interaksi desa dengan desa

Berdasarkan perkembangannya desa dikelompokkan menjadi desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Apabila desa-desa yang saling berinteraksi memiliki potensi fisik (tanah, air, iklim, topografi, pertanian dan peternakan) yang baik dan didukung oleh potensi non fisik (sikap masyarakat dan pamong desa), maka desa akan cepat mengalami perkembangan sesuai tujuan yang telah dibuat.

b. Interaksi kota dengan kota

Kota merupakan pusat pertumbuhan, sehingga interaksi antar kota akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan kota lainnya. Contohnya, kota-kota saling mendukung, saling berhubung, dan saling bekerjasama demi kemajuan bersama.

c. Interaksi desa dengan kota

Interaksi antara desa dan kota memiliki beberapa manfaat yaitu:

- 1) Hubungan sosial ekonomi penduduk desa dan kota meningkat.
- 2) Pengetahuan penduduk desa meningkat, terutama dalam penggunaan teknologi di bidang pertanian, berita dan informasi melalui televisi.
- 3) Banyaknya urbanisasi
- 4) Terjadinya hubungan yang saling menguntungkan atau saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga

memudahkan akses ke desa.

Interaksi antara desa dan kota juga menimbulkan dampak bagi kedua wilayah tersebut. Dampak tersebut adalah:

- Dampak positif
 - a. Bagi desa
 - 1) Pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat karena banyak sekolah dibangun di desa
 - 2) Angka buta huruf penduduk desa semakin berkurang dengan banyaknya dibangun sekolah
 - 3) Perluasan jalur jalan desa kota dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor sehingga hasil panen dari desa mudah diangkut ke kota dan kelangkaan bahan pangan di kota dapat dihindari.
 - 4) Produktivitas desa makin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna.
 - 5) Pelestarian lingkungan hidup pedesaan dapat dilakukan dengan hadirnya para ahli dari berbagai disiplin ilmu.
 - 6) Peningkatan kegiatan wiraswasta yang menghasilkan produk berkualitas dapat dilakukan karena pemerintah turun tangan
 - 7) Kesadaran memiliki keluarga kecil telah diterima oleh masyarakat desa
 - 8) Koperasi dan organisasi sosial yang berkembang di perdesaan telah memberi manfaat dalam peningkatan kesejahteraan penduduk dan pembangunan desa.
 - b. Bagi kota
 - 1) Tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah perdesaan
 - 2) Jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa yang pergi ke kota
 - 3) Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar
- Dampak negatif
 - a. Bagi desa
 - 1) Modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian yang menjadi pokok kehidupan mereka
 - 2) Penduduk desa dengan mudah meniru iklan dan tindak kejahatan dalam film yang ditayangkan di televisi
 - 3) Pengurangan tenaga produktif bidang pertanian di desa, karena banyak tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di kota.
 - 4) Perubahan tata guna lahan di perdesaan akibat perluasan wilayah kota dan banyak orang kota membeli lahan di wilayah perbatasan

desa-kota.

- 5) Tata cara dan kebiasaan yang menjadi budaya kota masuk ke pelosok desa dan cenderung mengubah budaya desa
- 6) Ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan pengangguran, dan pencemaran lingkungan menjadi masalah penting akibat interaksi desa-kota.

b. Bagi kota

- 1) Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin
- 2) Penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya
- 3) Nilai lahan di perkotaan yang mahal, memaksa warga menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak untuk pemukiman
- 4) Terjadi degradasi kualitas lingkungan
 - a) Degradasi kualitas lingkungan fisik
 - ✓ Pencemaran air
 - ✓ Pencemaran udara
 - ✓ Pencemaran suara
 - b) Degradasi kualitas lingkungan sosial
 - ✓ Kepadatan lalu lintas kendaraan yang banyak dimiliki penduduk kota. dapat menimbulkan perasaan jengkel dan kesal pemakai jalan akibat kemacetan.
 - ✓ Semakin berkembangnya sikap hidup materialistis dan individualistis.
 - ✓ Tumpukan sampah yang terdapat di banyak tempat, terutama dekat pemukiman, mengganggu kesehatan, dan keindahan lingkungan.
 - ✓ Rumah dan bangunan kota yang terlantar atau tidak terawat mengganggu pemandangan di sekitarnya.

2. Dampak Perkembangan Kota

Kota adalah suatu pemukiman yang bangunan rumahnya serba rapat dan penduduknya bermatapencaharian non agraris. Kota memiliki ciri prasarana meliputi bangunan pemerintahan, rumah sakit, sekolah, pasar, jalan beraspal, alun-alun, taman, dan pusat perbelanjaan. Suatu kota umumnya memiliki rumah-rumah yang mengelompok atau pemukiman terpusat. Struktur bangunan kota semakin ke tengah makin tinggi karena jumlah penduduk semakin banyak. Ekonomi kota berupa industri dan jasa yang tidak memerlukan tanah yang luas, sehingga bentuk kota kompak, bangunan berdekatan, dan kepadatan penduduk tinggi.

Perkembangan kota-kota di Indonesia pada saat ini telah memberikan banyak perubahan pada ruang-ruang perkotaan. Ruang-ruang perkotaan dituntut untuk bisa mewadahi berbagai aktivitas manusia yang terus berkembang dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Pembangunan di

kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Umumnya kota selalu dipandang sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan pendidikan, pusat pemerintahan dan sebagainya.

Menurut Bintarto modernisasi kota mempunyai pengaruh terhadap, jumlah penduduk kota, keanekaragaman struktur sosial dan ekonomi, kebijaksanaan penggunaan sumber-sumber keuangan, kelembagaan kota dan sebagainya. Modernisasi ternyata juga tidak selalu memberi manfaat terhadap kehidupan, tetapi dapat juga berpengaruh sebaliknya dan untuk itu tentunya diharapkan modernisasi dapat melenyapkan pencemaran lingkungan terutama dikota yang sudah terjadi penurunan kualitas lingkungan.

Dampak perkembangan kota bagi:

1. Kota
 - a. Dampak Positif :
 - 1) Fasilitas umum semakin beragam dan semakin baik.
 - 2) Tingkat pendidikan merata.
 - 3) Komunikasi dan informasi lebih cepat dan mudah.
 - 4) Pembagian kerja berdasarkan kemampuan
 - 5) Kegiatan ekonomi semakin beragam jenisnya.
 - 6) Membantu kota di sekitarnya untuk ikut berkembang.
 - b. Dampak Negatif :
 - 1) Jumlah penduduk meningkat
 - 2) Peningkatan urbanisasi
 - 3) Alih fungsi lahan.
 - 4) Semakin sempitnya lahan terbuka hijau.
 - 5) Pemukiman kumuh meningkat karena banyaknya urbanisasi.
 - 6) Memudarnya budaya dan munculnya sikap individualis
2. Desa
 - a. Dampak Positif
 - 1) Komunikasi dan informasi semakin baik.
 - 2) Tingkat upah di pedesaan meningkat (misalnya : upah buruh tani).
 - 3) Tingkat pengangguran di daerah pedesaan berkurang.
 - 4) Tingkat kepadatan penduduk berkurang
 - b. Dampak Negatif
 - 1) Daerah pedesaan kehilangan tenaga kerja potensiil, terdidik, terampil dan produktif.
 - 2) Penduduk produktif banyak yang melakukan urbanisasi.
 - 3) Jumlah petani menurun.
 - 4) Lahan pertanian semakin berkurang karena alih fungsi lahan.
 - 5) Perkembangan desa berjalan lambat.

5.2 TES FORMATIF PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN)

Ananda sudah menyelesaikan kegiatan 4 untuk melatih data kritis dan analisis kerjakan soal ketrampilan berikut ini :

Latihan Kegiatan 4 : Keterampilan

Kerjakan tugas berikut dengan santai, serius, selesai dan sukses (ingat4-5)!

Buatlah suatu makalah tentang kota di Indonesia yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya!

Makalah terdiri dari dengan cover, daftar isi, pendahuluan , isi , penutup, dan daftar pustaka

Kirim ke google form yang disediakan guru

Allhamdulillah Ananda sudah menyelesaikan kegiatan 1 sampai kegiatan 4 , untuk memudahkan mereview materi, ananda bisa membaca rangkuman modul di bawah ini :

Rangkuman

- Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pola permukiman di desa yaitu pola mengelompok, pola linear/ memanjang, dan pola menyebar.
- Unsur-unsur desa antara lain penduduk, wilayah, dan tata kehidupannya.
- Tipe-tipe desa berdasarkan perkembangan masyarakatnya yaitu desa tradisional, desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada.
- Kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, strata sosial ekonomi yang beragam, atau dapat juga diartikan sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan nonalami dengan gejala-gejala aglomerasi yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.
- Pola penggunaan lahan di kota berdasarkan tiga teori keruangan kota, yaitu teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda.
- Interaksi merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling berpengaruh antara dua wilayah atau lebih, yang dapat menimbulkan gejala, ketampakan, ataupun permasalahan baru.
- Zona interaksi perkotaan terdiri atas city, suburban, suburban fringe, urban fringe, rural urban fringe, dan rural.
- Faktor-faktor yang mendasari atau memengaruhi interaksi antarwilayah, antara lain adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi, adanya kesempatan untuk berintervensi, dan adanya kemudahan pemindahan dalam ruang.
- Teori-teori interaksi antara lain teori model gravitasi, teori titik henti, dan teori grafik.
- Terjadinya interaksi desa kota mengakibatkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif bagi desa dan kota.

Apakah ananda sudah benar-benar paham isi modul geografi ini dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4? Untuk meyakinkan cobalah ananda isi table refleksi diri dibawah ini:

Refleksi Diri				
<i>Centang pilihan jawaban yang ananda anggap sesuai !</i>				
No	Pertanyaan	SS	S	TS
1	Saya bisa mengemukakan pengertian dan ciri-ciri desa			
2	Saya bisa membedakan tingkat Perkembangan desa.			
3	Saya bisa menganalisis pola persebaran dan tata ruang desa.			
4	Saya bisa mengemukakan pengertian kota dan ciri-ciri kota			
5	Saya bisa menjelaskan tahapan perkembangan kota.			
6	Saya bisa menganalisis Struktur ruang kota			
7	Saya bisa Menjelaskan faktor-faktor yang mendasari interaksi desa – kota			
8	Saya bisa mendefinisikan teori intereksi, teori titik henti, dan teori konektivitas			
9	Saya bisa menjelaskan usaha pemerataan pembangunan di desa dan di kota			
10	Saya bisa menganalisis dampak interaksi desa kota			
11	Saya bisa membuat makalah mengenai kota di Indonesia yang berpotensi menjadi pusat pembangunan			
Keterangan : SS (sangat setuju), S (setuju), dan TS (tidak setuju)				

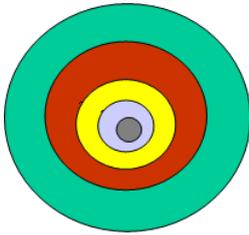
Ananda telah menjawab table refleksi diir di atas. Semoga Ananda sudah memahami keseluruhan isi modul ini. Setelah itu Ananda boleh mencoba tes mandiri. Untuk mengukur kemampuan Ananda, cobalah cocokkan jawaban Ananda dengan jawaban guru. Selamat mengerjakan 😊

EVALUASI

A. PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN YANG PALING BENAR

- Desa merupakan hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lainnya, adalah definisi desa menurut...
 - R. Bintarto
 - S. D. Misra
 - Grunfeld
 - Sutardjo Kartodikusumo
 - Northarm
- Dibawah ini merupakan ciri-ciri masyarakat desa, *kecuali*...
 - Dasar kekeluargaan yang masih kuat
 - Masyarakat bersifat homogen
 - Mata pencahariannya agraris
 - Corak kehidupannya bersifat *gesselschaft*
 - Norma agama masih dipegang kuat
- Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis, merupakan definisi kota menurut...
 - Bintarto
 - Wirth
 - Max Webber
 - P.J.M Nas
 - Carth Churtlow
- Perhatikan tahap perkembangan kota di bawah ini!
 - infantil stage
 - tahap dewasa
 - juvenil stage
 - senile stageBerikut tahap tahap perkembangan kota sesuai dengan urutannya adalah.....
 - 3, 1, 4, 2
 - 3, 1, 2, 4
 - 1, 3, 2, 4
 - 1, 3, 4, 2
 - 1, 2, 3, 4

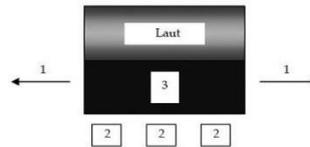
6. Perhatikan gambar lingkaran terluar dari pola keruangan kota menurut Burgess!



Lingkaran terluar dari gambar itu merupakan daerah permukiman.....

- A. penglaju
 - B. pedagang
 - C. penguasaan
 - D. pengusaha
 - E. buruh berpenghasilan rendah
7. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam.
 - 2) Struktur perekonomian bersifat industri.
 - 3) Hubungan antarmasyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat (gemmeinschaft).
 - 4) Perkembangan sosial relatif cepat dan sosial kontrol ditentukan oleh hukum formal
 - 5) Norma agama dan hukum adat masih kuat
- Yang merupakan ciri- ciri desa ditunjukkan oleh nomor :
- A. 2, 4, dan 5
 - B. 2, 3, dan 4
 - C. 1, 2, dan 3
 - D. 1, 3, dan 4
 - E. 1, 3, dan 5

8. Perhatikan gambar di bawah ini!



Desa dengan bentuk seperti pada gambar biasanya tertelak di wilayah.....

- A. pesisir pantai
 - B. pegunungan
 - C. daerah berbukit
 - D. daerah cekungan
 - E. pusat kota
9. Suku bangsa Badui Dalam merupakan suku bangsa terasing di pulau Jawa. Berdasarkan perkembangan masyarakatnya, desa-desa tempat tinggal suku bangsa tersebut tergolong bertipe..
- A. desa terasing
 - B. desa tertinggal
 - C. desa swakarsa
 - D. desa tradisional
 - E. desa swakarya
10. Pemerintah membangun jalan aspal di desa untuk memudahkan hubungan antara sumber bahan baku dengan industri pengolah. Tujuan utama dari pemerintah adalah
- A. Meningkatkan produktifitas desa
 - B. Memudahkan akses jalan
 - C. Meningkatkan keinginan bekerja masyarakat
 - D. Melancarkan arus perdagangan
 - E. Memajukan kota disekitarnya

11. Desa-desa di Kecamatan Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, dan Dampit mensuplai kebutuhan sayuran dan buah-buahan bagi masyarakat Kota Malang. Demikian pula desa-desa di Kecamatan Pakisaji, Kepanjen, Bululawang, dan Gondanglegi mensuplai kebutuhan beras dan gula bagi masyarakat Kota Malang. Sedangkan desa-desa di Kecamatan Pagak dan sekitarnya mensuplai kebutuhan bahan-bahan bangunan bagi masyarakat Kota Malang. Dengan demikian desa-desa tersebut bagi masyarakat Kota Malang berfungsi sebagai.....
- lowland
 - highland
 - hinterland
 - village
 - open country
12. Ada desa yang berinteraksi dengan kota dan menjadikan desanya maju karena memanfaatkan teknologi dari kota. Ada juga desa yang berinteraksi dengan kota sehingga menumbuhkan pasar moderen seperti mini market di desa sehingga pasar tradisional mulai ditinggalkan. Hal ini hasil dari proses
- Ruralisasi desa
 - Urbanisasi kota
 - Interaksi desa kota
 - Dampak interkasi
 - Keuntungan dan kerugian interaksi
13. Terdapat 3 buah wilayah A, B, dan C, dengan data sebagai berikut.
- Jumlah penduduk wilayah A = 20.000 jiwa, B = 20.000 jiwa, dan C = 30.000 jiwa.
 - Jarak antara A ke B = 50 km, dan B ke C = 100 km. Kekuatan interaksi antara wilayah A dan B adalah... .
- 100.000
 - 125.000
 - 60.000
 - 160.000
 - 80.000
14. Kota A berpenduduk 40.000 jiwa dan kota B berpenduduk 80.000 jiwa. Jarak antara kota A dengan kota B 80 km. Jika kedua kota tersebut berinteraksi, maka titik hentinya berada pada.....
- 33,10 km dari kota A
 - 33,14 km dari kota A
 - 33,3 km dari kota B
 - 35,3 km dari kota A
 - 37,5 dari kota B
15. Salah satu teori yang menganalisis potensi kekuatan interaksi antarwilayah ditinjau dari struktur jaringan jalan sebagai prasarana transportasi adalah... .
- Teori titik henti
 - Teori gravitasi
 - Teori grafik
 - Breaking point theory
 - Teori interaksi
16. Perhatikan gambar di bawah ini!

Salah satu dampak negarifyang ditimbulkan dari lingkungan yang terdapat pada gambar adalah... .

- A. Sikap gotong-royong yang tinggi diantara penduduk
 - B. Terpenuhinya kebuuhan hidup penduduk dengan baik
 - C. Tidak mencukupinya jaringan air bersih, listrik dan pembuangan air kotor
 - D. Banyaknya ruang terbuka hijau
 - E. Tercipanya lingkungan yang asri dan nyaman
17. Salah satu usaha yang dilakukan dalam melakukak pemerataan pembangunan kota adalah dalam hal aspek fisik yang meliputi... .
- A. Tata guna lahan, ketersediaan sarana prasarana, hubungan antar daerah
 - B. Pendapatan daerah (PAD), pendapatan masyarakat, kesempatan kerja
 - C. Kelembagaan, pendidikan, dan kesehatan
 - D. Tata guna lahan, pendapatan daerah (PAD), kelembagaan
 - E. Hubungan antar daerah, kesempatan kerja, dan kelembagaan
18. Perhatikan pernyataan berikut ini!
- 1) Rendahnya tingkat kesehatan penduduk desa
 - 2) rendahnya tingkat kematian penduduk desa
 - 3) Kekurangan sumber daya



manusia dalam melaksanakan pembangunan

4) Tingkat ketrampilan kerja penduduk desa tinggi

Yang merupakan permasalahan yang terdapat pada masyarakat desa adalah...

- A. 1 dan 2
- B. 2 dan 3
- C. 2 dan 4
- D. 1 dan 3
- E. 1 dan 4

19. Usaha yang dilakukan terhadap desa melalui kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ketrampilan penduduk, pengembangan sosial budaya, kesejahteraan keluarga, dan kesehatan masyarakat dikoordinasi oleh... .

- A. LKMD
- B. BPD
- C. LPPM
- D. KUD
- E. Bappeda

20. Hasil pertanian di desa mengalami penurunan, dampak yang ditimbulkan terhadap kota ialah...

- A. Terganggunya proses produksi
- B. Menurunnya produktivitas industri
- C. Terganggunya kebutuhan pangan
- D. Menipisnya produktivitas pupuk kimia
- E. Menurunnya kualitas industry

21. Perkembangan kota-kota besar di Indonesia seringkali menyebabkan alih fungsi lahan yang berada di pinggiran kota. Hal ini disebabkan

- A. pembangunan di kota sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan secara vertical
- B. ketersediaan lahan di kota sudah tidak memungkinkan untuk

dikembangkan secara horisontal
C. adanya perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang besar

- D. lahan yang ada di pinggiran kota harganya lebih murah dengan luasannya terbatas
- E. lahan di pinggiran kota merupakan potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan baru

B. JAWABLAH DENGAN SINGKAT DAN JELAS

1. Sebutkan ciri-ciri desa swasembada !
2. Jelaskan pola persebaran penggunaan ruang menurut teori sektoral?
3. Sebutkan sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi wilayah!
4. Jelaskan contoh bentuk interaksi desa dengan kota!
5. Terdapat empat kotamadya di Jawa Tengah dan D. I Yogyakarta, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, dan Magelang yang lokasinya mengelilingi kompleks gunung kembar Merapi-Merbabu. Dengan jumlah penduduk pada tahun X sebagai berikut :
 - Yogyakarta (Y) = 398.192 orang,
 - Surakarta (Su) = 462.825 orang,
 - Salatiga (Sa) = 87.740 orang dan
 - Magelang (M) = 123.358 orang.Andaikata jarak terdekat antara
 - Yogyakarta (Y) – Surakarta (Su) = 60 km
 - Surakarta (Su) – Salatiga (Sa) = 42 km
 - Salatiga (Sa) – Magelang (M) = 40 km
 - Magelang (M) – Yogyakarta (Y) = 41 km
 - a. Hitung kekuatan Interaksi antar wilayah !
 - b. Manakah interaksi antar wilayah yang paling besar dan paling kecil ?
 - c. Setelah mengukur besar Interaksi dengan menggunakan rumus tersebut, jelaskan manfaat menghitung kekuatan interaksinya !

PENUTUP

Syukur Alhamdulillah, dan selamat Ananda telah selesai mempelajari modul tentang konsep wilayah dan tata ruang serta pola keruangan desa kota. Belajar Ananda dikatakan sukses bila Ananda telah mengerjakan tugas pengetahuan dan keterampilan yang terdapat di setiap akhir kegiatan dan evaluasi pada setiap akhir Bab yang ada di modul ini. Adapun materi penting yang telah Ananda pelajari BAB 1 dan Bab 2, adalah tentang konsep wilayah dan tata ruang serta pola keruangan desa kota

Sekarang silahkan Ananda bertanya kepada diri Ananda sendiri, sudahkah Ananda memahami seluruh materi yang telah Ananda pelajari, jika masih ada yang belum Ananda pahami silahkan Ananda pelajari sekali lagi, jangan malu-malu berdiskusi dengan teman dan bertanya pada guru mata pelajaran geografi. Ananda dinyatakan berhasil bila sedikitnya 75% jawaban Ananda pada tes evaluasi pada akhir bab. Semoga yang telah Ananda pelajari dari modul ini bermanfaat, untuk lebih mendalami materi ini silahkan Ananda pelajari buku-buku geografi yang membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang serta pola keruangan desa kota buku-buku lain yang sesuai. Silahkan Ananda untuk mempelajari modul berikutnya di kelas XII .

Sekian dan terima kasih semoga Ananda berhasil!

DAFTAR PUSTAKA

Aji Arifin. 2016. Geografi Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial untuk SMA/MA Kelas XII. Surakarta: CV. Mediatama

Gatot Hermanto. Geografi untuk SMA/MA Kelas XII Kelompok Peminataan Ilmu-Ilmu Sosial.

Hariyanto dan Tukidi. 2010. *Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah* (Jurnal Online). Tersedia: download.portalgaruda.org/article.php?article=136594&val=5671.

Human Development Report 2016 Team. 2016. Human Development Report 2016: Human Development for Everyone. New York: United Nation Development Programme

Indayati Lanya, N. Netera Subadiyasa. 2012. *Penataan Ruang Dan Permasalahannya di Provinsi Bali*. Universitas Udayana

Jahid, J. 2012. *Analisis Kritis Terhadap UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang* (Jurnal Plano Madani Vol. I Nomor 1/2012-Online). Tersedia: journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/planomadani/article/download/758/730.

K. Wardiyatmoko. 2013. *Geografi untuk SMA/MA kelas XII*. Jakarta: Erlangga

Lutfi Muta'ali. 2012. *Daya Dukung Lingkungan untuk Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFGE) UGM.

Oswar Mungkasa. 2014. *Perencanaan Tata Ruang : Sebuah Pengantar*. Jakarta : UNJ. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

- Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Robinson Tarigan. 2003. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Sirojuzilam. 2010. *Perencanaan Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah (Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah Vol.2, No.3- Online)*. Tersedia:
[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17927/wah-apr2007-2%20\(4\).pdf;jsessionid=E66B3F860F5470A23A5C6D615F259FE3?sequence=1](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/17927/wah-apr2007-2%20(4).pdf;jsessionid=E66B3F860F5470A23A5C6D615F259FE3?sequence=1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- World Bank. 2016. Annual Report 2016. New York: World Bank.
<http://eprints.undip.ac.id/32955/1/JURNAL.pdf> (diakses pada tanggal 22 April 2020)
<http://www.sselajar.net/2012/12/pusat-pusat-pertumbuhan-diindonesia.html> (diakses pada tanggal 23 April 2020)
<http://www.menlh.go.id/klhs-kajian-klhs-sebagai-solusi-daya-dukung-wilayah/> (diakses tanggal 27 April 2020)
www.penataanruang.com (diakses tanggal 21 April 2020)
<http://kotaku.pu.go.id/wartadetil.asp?mid=8450&catid=2&> (diakses tanggal 25 April 2020)
- Wardiyatmoko, K. 2013. Geografi untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta: Erlangga.
- Yasinto Sindhu P. 2016. Geografi untuk SMA/MA kelas X. Jakarta: Erlangga.
- Video Profil Desa Sidoharjo. <https://www.youtube.com/watch?v=fQSE3pbR-TQ> .
 Diunduh pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 09.15
- Jakarta Tempo Dulu. <https://www.youtube.com/watch?v=j5pPwczpbLE&pbjreload=10> .

Diunduh Pada Tanggal 24 Agustus 2020 pukul 09.30

Penggunaan Lahan Perkotaan. <https://www.youtube.com/watch?v=-qhotXTcB3A>

Diunduh pada Tanggal 24 Agustus 2020 pukul 09.45

